

**POSISI DAN EKSISTENSI PERS MAHASISWA**

(Studi Eksplorasi pada Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa  
Universitas Brawijaya Malang)

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Komunikasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama  
Komunikasi Massa

Oleh:

Alief Berri Auri

NIM: 105120204111007



**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**POSISI DAN EKSISTENSI PERS MAHASISWA (Studi Eksplorasi pada Unit  
Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang)**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:

**ALIEF BERRI AUFİ**

**NIM 105120204111007**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana pada tanggal

5 Agustus 2017

**Pembimbing I**



**Anang Sujoko. S.Sos., M.Si., D.COMM**  
NIK. 19700624 20050210 01

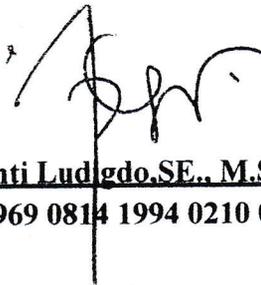
**Pembimbing II**



**Dr. Antoni. S.Sos., M.Si**  
NIK. 19721010 20050110 02

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



**Prof. Dr. Unti Ludigdo. SE., M.S.i., Ak**  
NIP. 1969 0814 1994 0210 01

## LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SRIKPSI

NAMA : ALIEF BERRI AUFİ

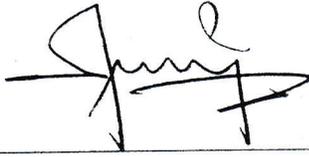
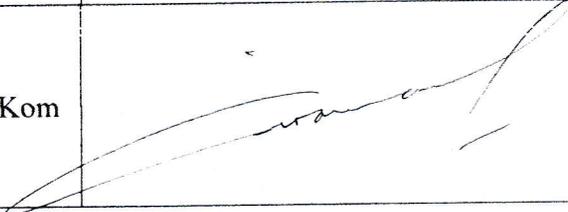
NIM : 105120204111007

TANGGAL UJIAN : 5 Agustus 2017

JURUSAN : ILMU KOMUNIKASI

PEMINATAN : KOMUNIKASI MASSA

JUDUL SKRIPSI : POSISI DAN EKSISTENSI PERS MAHASISWA (Studi Eksplorasi pada Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang)

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM	
2	Dr. Antoni, S.Sos., M.Si	
3	Abdul Wahid, S.I.Kom., M.A	
4	M. Irawan Saputra, S.I.Kom., M.I.Kom	

TELAH DIREVISI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alief Berri Aufti

NIM : 105120204111007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul

“POSISI DAN EKSISTENSI PERS MAHASISWA (Studi Eksplorasi pada

Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang)”  
adalah betul-betul karya saya. Hal – hal yang bukan karya saya dalam skripsi  
tersebut diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya  
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang  
saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 25 Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan



**Alief Berri Aufti**

NIM. 105120204111007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Alief Berri Aufi

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 12 Mei 1992

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Single (Belum Menikah)

TB /BB : 165 cm, 45 kg

Hobi : Mengoleksi Diecast, Bermusik, Bermain Bulu tangkis

Alamat : Jl. Masalembu III/07

RT. 002 RW. 011 Pamolokan, Kec. Kota Sumenep.

Kode pos: 69412

Telepon : 088805511846

E-mail : [bons.berry@gmail.com](mailto:bons.berry@gmail.com)

### Pendidikan

#### ❖ Formal

- 1996 - 1998 : TK. Melati Sumenep
- 1998 - 2004 : SDN Pangarangan 1 Sumenep
- 2004 - 2007 : SMPN 1 Sumenep
- 2007 - 2010 : SMAN I Sumenep

#### ❖ Non Formal

1. PKK MABA 2010 (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
2. Workshop Komunikasi Massa, Communication In Action "Strategi dan Jurnalisme Media", Malang 30 November 2011.
3. Seminar "Sukses Berkarir di Dunia Televisi", (Akademi Indosiar 2012) di Universitas Brawijaya

4. Seminar Creativepreneurship “Mengembangkan Jiwa Kreatifitas dan Inovatif Untuk Mewujudkan Iklim Wirausaha Indonesia yang Berbasis Kreatif dan Kemandirian ” from Prasetya Mulya Business School at INBIS UB on April 27, 2013.
5. Praktek Kerja Nyata (PKN) di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID Jatim) 2013, sebagai Anggota Divisi Monitoring
6. Journalism Clinic Federal Matic Goes to Campus, 20 November 2014 di Universitas Brawijaya Malang
7. Seminar Business Practice “Developing Entrepreneurial Mindset & basic Business Skill” oleh STMIK/STIE ASIA Malang, 28 April.
8. TV One Goes to Campus “Pemimpin Berprestasi”, Malang 7 Oktober 2016.

### **Pengalaman Organisasi**

1. Ekstra Kurikuler Bulu Tangkis SMPN 1 Sumenep 2005-2006, sebagai Sekretaris.
2. Ekstra Kurikuler Bulu Tangkis SMAN 1 Sumenep 2007-2009, sebagai Koordinator Acara.
3. *Brawijaya University Student from Sumenep (BUSS)2011, sebagai Anggota*
4. Bakti Sosial GPS 2012 (Generasi Peduli Sumenep) “Ramadhan Indah dengan Berbagi” sebagai Wakil Ketua Pelaksana
5. Pengabdian Masyarakat Ilmu Komunikasi FISIP UB “Finish Your Food”, Juni 2013.
6. Screening & Coaching Clinic Kellner National Film Festival “Lima Meter dari Pinggir Jalan” dalam rangkaian acara Lustrum II Ilmu Komunikasi FISIP UB, September 2014 sebagai admin Social Media & Sponsorship

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan Saya mengucapkan banyak terima kasih.

Malang, 26 Februari 2017

Alief Berri Aufi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam skripsi ini penulis menjumpai banyak hambatan ataupun halangan, baik dalam mengumpulkan data ataupun dalam penyelesaian penulisannya. Di samping itu, juga banyak mendapat saran, bimbingan dan pengarahan baik yang bersifat moril maupun materil serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, dengan segala hormat peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang beserta Rasul Muhammad SAW yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya dan memberikan petunjuk dikala penulis menemui jalan buntu, memberikan kesehatan dan kelancaran selama proses penelitian dan penyusunan laporan.
2. Kedua orang tua (Heriyanto dan Hamimah) tercinta dan adik saya Dwi Wahyu Maghfirati yang selalu hadir dalam memberikan semangat serta motivasi untuk tetap berjuang menyelesaikan tanggung jawab ini.
3. Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.S.i., Ak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM dan Dr. Antoni, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan memberikan arahan kepada peneliti, dalam membimbing setiap langkah untuk menghadapi proses penelitian sampai pada akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
5. Abdul Wahid, S.I.Kom., M.A dan M. Irawan Saputra, S.I.Kom., M.I.Kom sebagai dosen penguji yang banyak memberikan masukan untuk kebaikan skripsi ini.

6. Mas Bayu Indra Pratama, S.I.Kom., MA selaku mentor dan teman yang sangat baik dalam berdiskusi, memberikan ide awal bagaimana menyusun skripsi dalam ranah pers mahasiswa. Mas Kholis yang banyak membantu peneliti dalam hal administrasi.
7. Pak Djanalis Djanaid, Pak Mondry, Mas Heyder Affan, Asep Wahyu, Rohman Budianto, Wignyo Adiyoso, Yunan Saifullah, Dedi Nurtanio, Yudi Arianto, Faiz Nasrillah, Ahmad Yani Ali, Fadrin Fadhlhan B, Elyvia Inayah, Bunga Astana, Ainun Syahida yang telah bersedia dengan senang hati memberikan informasi terhadap penelitian ini.
8. Saudara seperantauan Radhitya Dwi Nugraha, Subhan Kurniawan Hadi, Dini Siswanto, Nurul Alimy, Fery Imam Kurniawan, Aldy Prasetyo Utomo, Rayhana Sahidah Akisa, Riskiani Putri Akisa, Rofilah Layanah Akisah, Muhammad Thaifururrahman, Samsul Arifin Arif, Ilham Firmansyah, Diden MS, Yoga Pratama, Frendy Indra Anggara, Eka
9. Teman-teman seperjuangan dari “Serpihan 2010”, Subhan Muttaqin, Arya Baskoro Putra, Rizal Akbari Nanda, Gusti Sutisna, M. Thoriq Zakiri, Dwiki Wiliarezka, Heru Tri M, Bangun Sasongko Putra, Kutub Boy, Denny Yanuar, Irza Akmal Z, Buyung Angga, Irawan Aprilianto, dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meramaikan Fiscor dan bersama-sama saling memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan masa studi yang semakin menipis.
10. Sahabat-sahabat Ilmu Komunikasi FISIP UB angkatan 2010 yang telah mewarnai kehidupan penulis dalam selama menuntut ilmu di kota rantau, Boy Christian Lahea, M. Indra Sukma Perdana, Puguh Prima Andhika,

Fira Nurbillah, Bagus Wimono Putra, Durrotun Nafisah, Abdud Dimats A,  
Tyssa Madelina, Himiatul A. Kurnia, Syarifatul Khodijah M.

11. Teman-teman BTW yang selalu mendo'akan serta mendukung penulis  
agar menyelesaikan skripsi ini.

Dan semua pihak yang ikut serta terlibat dan mendukung hingga selesainya  
skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tidak bisa  
menyebutkan satu persatu.

Malang, 27 Juli 2017

Alief Berri Aofi

## ABSTRAK

Alief Berri Auli. 105120204111007. 2017. **POSISI DAN EKSISTENSI PERS MAHASISWA (Studi Eksplorasi pada Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang)**. Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Peminatan Komunikasi Massa, FISIP. Universitas Brawijaya. Pembimbing: Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM dan Dr. Antony, S.Sos., M.Si.

---

Eksistensi pers mahasiswa di Indonesia banyak memberikan kontribusi positif bersama gerakan mahasiswa dalam menumbangkan rezim Orde Lama dan Reformasi. Kota Malang memiliki nilai historis dalam menjaga stabilitas pers mahasiswa di Indonesia pada era Orde Baru. Dideklarasikannya PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) pada tahun 1992 di Kota Malang memberikan warna baru bagi kehidupan pers mahasiswa yang membutuhkan wadah baru pers mahasiswa dalam lingkup nasional. Penelitian ini mengkaji UAPKM (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa) dalam mempertahankan eksistensinya sebagai pers mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dengan metode *historical research* yang digunakan untuk menyelidiki fenomena secara menyeluruh dan lebih mendalam. Dengan *historical research*, penggunaan data terdahulu dari alumni mendapatkan porsi yang sama dengan pengurus harian dan produk terbitan UAPKM sebagai sumber primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi UAPKM sebagai pers mahasiswa di Universitas Brawijaya lebih berfokus dalam membentuk jejaring antar aktivis pers mahasiswa pada fase awal pembentukannya. Dengan terbitnya majalah Ketawanggede pada tahun 1992 merupakan langkah awal dalam menekuni penerbitan mahasiswa.

Permasalahan yang dialami UAPKM merupakan hambatan klise yang biasa dialami oleh pers mahasiswa seperti pembatasan dan pengekangan kreativitas dari pihak birokrasi, pendanaan yang kurang lancar dan masih bergantung pada subsidi dari rektorat sehingga berpengaruh pada periodisasi terbit yang tidak rutin, serta keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia). Pasca Reformasi memang merupakan fase kemunduran bagi kehidupan pers mahasiswa namun UAPKM tetap berdinamika dengan mengikuti zaman yang berbeda terbukti dengan hadirnya Jurnal Ospek, Kronik Kampus, Manuskrip Tembok Ketawanggede, Buletin Kavling 10, Majalah Kavling 10, Buletin Ketawanggede, Buletin Swara Brawijaya dan website kavling10.com sebagai media alternatif disaat media cetak tak kunjung terbit.

Kata Kunci: Pers Mahasiswa, Metode Penelitian Sejarah, Eksplorasi

## ABSTRACT

Alief Berri Afi. 105120204111007. 2017. **POSITION AND EXISTENCE OF STUDENTS PRESS (Exploration Study at Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang)**. Undergraduated Thesis, Communication Science Major, Mass Communication Interest, Faculty of Social and Political Science. University of Brawijaya. Supervised by: Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM dan Dr. Antony, S.Sos., M.Si

---

The existence of the student press in Indonesia gave many positive contributions together with the student movement in overthrowing the “Orde Baru” and “Reformasi” regime. Malang City has historical value in maintaining stability of student press in Indonesia during “Orde Baru” era. The establishment of PPMI (Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia) in 1992 in Malang City gave a new color for the life of the student press which required a new organization of student press in the national scope. This study examines UAPKM (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa) in maintaining its existence as a student press in Brawijaya University Malang.

This type of research is qualitative explorative with historical research method used to investigate the phenomenon as a whole and more deeply. With historical research, the use of previous data from alumni gets the same portion as daily management and UAPKM products as the primary source. The results of this study indicate that UAPKM's position as a student press in Universitas Brawijaya is more focused on forming a network among student press activists in the initial phase of its formation. With the publication of Ketawanggede magazine in 1992 is the first step in pursue student publishing.

The problems faced by UAPKM are the usual cliches that experienced by the student press such as restriction and restraint of creativity from the bureaucracy, the lack of funding and still depend on subsidy from rectorate so that it can influence the period of non-routine publication, and the limitations of human resources (Human Resources) . Post-“Era Reformasi” is a phase of decline for the life of the student press but UAPKM still struggling by publishing and producing various kinds of magazine, buletins, such as; Jurnal Ospek, Kronik Kampus, Manuskrip Tembok Ketawanggede, Buletin Kavling 10, Majalah Kavling 10, Buletin Ketawanggede, Buletin Swara Brawijaya and website kavling10.com as an alternative media when print media never published during those era.

Keywords: Student Press, Student Press History, Historical Research Methods, Exploration



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “POSISI DAN EKSISTENSI PERS MAHASISWA (Studi Eksplorasi pada Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sekaligus persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Penelitian ini merupakan studi eksplorasi dengan metode *historical research* dengan tujuan untuk menggambarkan posisi UAPKM UB sebagai pers mahasiswa di tingkat universitas dalam mempertahankan eksistensinya dari pertama kali didirikan sampai saat ini. Skripsi ini dapat dijadikan literatur bagi mahasiswa ilmu komunikasi, terutama dalam kajian studi sejarah dan pers mahasiswa yang masih minim dilakukan. Selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi anggota UAPKM, penggiat pers mahasiswa, dan akademisi dalam memperkaya wawasan dan memahami sejarah yang dilakukan para aktivis pers mahasiswa kota Malang dalam memperjuangkan wadah baru bagi pers mahasiswa tingkat nasional.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I (PENDAHULUAN)</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	11
1.4.2 Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)</b> .....	13
2.1 Pengertian Pers dan Peran Mahasiswa .....	13
2.2 Pengertian Pers Mahasiswa .....	18
2.3 Sejarah Pers Mahasiswa di Indonesia .....	22
2.3.1 Pers Mahasiswa pada Masa Penjajahan Belanda .....	22
2.3.2 Pers Mahasiswa pada Masa Penjajahan Jepang .....	25
2.3.3 Pers Mahasiswa pada Masa Kemerdekaan .....	26
2.3.4 Pers Mahasiswa pada Era Demokrasi Liberal .....	27
2.3.5 Pers Mahasiswa pada Era Demokrasi Terpimpin .....	28
2.3.6 Pers Mahasiswa pada Era Orde Baru .....	31
2.3.7 Pers Mahasiswa menjelang Reformasi .....	36
2.4 Pers Mahasiswa sebagai Pers Alternatif .....	38
2.5 Teori Pers .....	41
2.6 Faktor yang mempengaruhi isi media .....	46
2.7 Penelitian Terdahulu .....	48
<b>BAB III (METODOLOGI PENELITIAN)</b> .....	52
3.1 Jenis Penelitian .....	52
3.2 Metode Penelitian .....	54
3.3 Teknik Pemilihan Informan .....	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.5 Sumber Data .....	58
3.6 Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV (HASIL DAN PEMBAHASAN)</b> .....	62
4.1 Gambaran Umum Pers Mahasiswa di Kota Malang .....	62
4.2 UAPKM sebagai Wadah Ekspresi Aktivis Pers Mahasiswa (1990-2000an) .....	73
4.2.1 Lewat Temu Aktivis hingga PPMI dideklarasikan .....	76



4.2.2 Ketawanggede, Langkah Baru yang Bersejarah (1992-1994) ..... 90

4.3 Mimbar Mahasiswa sebagai Media Alternatif ..... 101

4.4 Hambatan Klise Pers Mahasiswa ..... 107

4.5 Pembahasan ..... 117

**BAB V (PENUTUP) ..... 127**

5.1 Kesimpulan ..... 127

5.2 Saran ..... 128

**DAFTAR PUSTAKA ..... 129**

Buku ..... 129

Artikel Elektronik ..... 131

Situs Internet/Halaman Web ..... 132

**DAFTAR LAMPIRAN ..... 133**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Daftar Pers Mahasiswa Di Kota Malang. Sumber: wawancara dengan Ahmad Yani Ali (Sekjen PPMI Kota Malang 2013-2015)..... 6

Tabel 2 Penelitian Terdahulu Tentang Pers Mahasiswa di Kota Malang ..... 49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	60
Gambar 2 Perwakilan UAPKM UB dalam acara Diklat dan Temu Aktivis di Yogyakarta pada Tahun 1991. Sumber: Facebook Heyder Affan .....	77
Gambar 3 Heyder Affan (UAPKM UB) sebagai SC Jawa Timur dalam acara Sarasehan Penerbitan Mahasiswa se-Malang di Universitas Brawijaya pada tahun 1991. Sumber: Sumber: Facebook Heyder Affan .....	79
Gambar 4 Sidang komisi yang dipimpin oleh Ariansyah (Unila Lampung), Tugas Supriyanto (Isola Pos IKIP Bandung), dan Heyder Affan (UAPKM UB) dalam acara Sarasehan Pers Mahasiswa se-Indonesia di IKIP Bandung pada tahun 1991. Sumber: Facebook Heyder Affan.....	83
Gambar 5 Pemberitaan mengenai “Bandung Informal Meeting” dan protes aktivis mahasiswa terhadap DPR dimuat di <i>Harian Suara Pembaruan dan Koran Jayakarta</i> pada bulan Juli 1991. Sumber: Facebook Heyder Affan .....	84
Gambar 6 Sarasehan FKPMU yang dimuat dalam Majalah Dianns pada Edisi 25 Desember 1992. Sumber: Facebook Heyder Affan .....	86
Gambar 7 Luapan kebahagiaan dari para aktivis pers mahasiswa setelah dideklarasikannya PPMI di Universitas Brawijaya pada tahun 1992. Sumber: Facebook Heyder Affan .....	89
Gambar 8 Cover majalah Ketawanggede dan halaman keredaksian pada edisi I bulan Agustus 1992.....	91
Gambar 9 Cover majalah Ketawanggede edisi ke II, Ludruk Sekarat pada tahun 1993.....	94
Gambar 10 Princen dan Ali Sadikin dalam rubrik <i>tafsir</i> dan percakapan. Sumber: Arsip UAPKM UB.....	95
Gambar 11 Buklet sejumlah 8 halaman yang disisipkan di majalah Ketawanggede edisi ke II pada tahun 1993. Sumber: Arsip UAPKM UB.....	96
Gambar 12 “Krisi Intelektual”, majalah Ketawanggede edisi ke III pada tahun 1994.....	97
Gambar 13 Rubrik Anekdote & Karikatur yang dipermasalahkan menurut Asep Wahyu pada Majalah Ketawanggede edisi ke III tahun 1994. Sumber: Arsip UAPKM UB.....	99
Gambar 14 Layout dalam rubrik percakapan dan cover halaman belakang yang dipermasalahkan menurut Asep Wahyu pada majalah Ketawanggede edisi ke III tahun 1994. Sumber: Arsip UAPKM UB .....	100
Gambar 15 Mimbar Mahasiswa yang berada diBagian tengah koran kampus mimbar tahun 2007. Sumber Arsip UAPKM.....	101

Gambar 16 Cover Jurnal Ospek tahun 2008 & Buletin Kronik Kampus edisi XX.  
Sumber: Arsip UAPKM UB ..... 108

Gambar 17 3 edisi Buletin Kavling 10 yang terbit pada tahun 2011. Sumber: Arsip UAPKM UB..... 112

Gambar 18 Manuskrip tembok Ketawanggede. Sumber: Arsip UAPKM UB ..... 112

Gambar 19 Majalah Kavling 10 dari edisi ke I sampai edisi ke III. Sumber: Arsip UAPKM UB..... 113

Gambar 20 Buletin Ketawanggede edisi V dan VII. Sumber: Arsip UAPKM UB ..... 114

Gambar 21 Edisi perdana buletin Swara Brawijaya. Sumber: Arsip UAPKM..... 115



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi pers mahasiswa di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi positif. Dalam setiap peralihan rezim, pers mahasiswa ikut terlibat bersama gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Contohnya seperti Gerakan 66' yang menyebabkan keruntuhan Rezim Orde Lama Soekarno<sup>1</sup> dan penumbangan rezim otoritarianisme Orde Baru pada peristiwa Mei 1998<sup>2</sup>. Bahkan Kusumaningrat & Kusumaningrat (2005, h. 11) mengatakan bahwa perintis pers di negara-negara berkembang, pada umumnya adalah mereka yang juga ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan. Di Indonesia, banyak tokoh kemerdekaan yang juga berasal dari dunia pers seperti Adam Malik, Rosihan Anwar dan Muchtar Lubis (Mondry, 2008, h. 46-53).

Sistem pers yang dianut suatu negara dipengaruhi oleh sistem sosial politik yang berlaku dalam suatu negara. Oleh karena itu setiap negara memiliki sistem pers yang berbeda-beda tergantung dari nilai, filsafat hidup dan ideologi negara. Sistem pers tersebut berkaitan dengan pola hubungan pemerintah, pers dan masyarakat karena sistem sosial politik yang berlaku

<sup>1</sup> Setelah peristiwa G30S/PKI gerakan mahasiswa semakin menguat dengan lahirnya KAMI pada tanggal 25 Oktober 1965 yang mengusung Tritura. Mahasiswa mendapatkan dukungan dari tentara (AD) dan KAMI menjadi motor utama dari kegiatan-kegiatan Angkatan 66'. Perjuangan KAMI yang di *back up* penuh oleh militer membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

<sup>2</sup> Pada tanggal 21 Mei 1998 telah terjadi perubahan sosial politik yang cukup mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia bersamaan dengan tuntutan perbaikan di berbagai bidang telah memaksa presiden Soeharto turun sebelum habis masa jabatannya.

dalam suatu negara akan termanifestasi dari bagaimana negara tersebut memperlakukan pers yang ada. Di Indonesia pada era Soekarno sistem pers yang dianut seakan-akan adalah sistem pers bebas bertanggungjawab, namun pada kenyataannya yang dijalankan adalah sistem pers otoriter karena pada saat itu diberlakukan SIT (Surat Izin Terbit)(Effendy, 2003, h. 108). Selain itu pembredelan dan pemberangusan diberlakukan kepada penerbitan-penerbitan yang tidak sejalan dengan politik pemerintah bahkan pemerintah mengontrol aktivitas kemahasiswaan seperti pers mahasiswa yang merupakan bagian dalam gerakan mahasiswa pada saat itu.

Keadaan pers mahasiswa saat ini jauh berbeda dengan pers mahasiswa pada periode 1966-1974 dimana pada saat itu pers mahasiswa merupakan alat perjuangan untuk meruntuhkan Orde Lama. Perubahan yang terjadi pada pers mahasiswa mulai terjadi pada tahun 1978 sejak NKK/BKK dikeluarkan oleh pemerintah. Dinamika pers mahasiswa di Indonesia dapat terlihat dari keberadaan IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) sebagai wadah bagi pers mahasiswa di Indonesia. IPMI sempat mengalami kemajuan<sup>3</sup> yang sangat pesat pada awal Orde Baru namun pada tahun 1971-1974 IPMI mengalami kemunduran. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kembali melakukan kontrol ketat terhadap aktivitas pers mahasiswa. Bahkan Atmakusumah (2009, h. 24) mengatakan bahwa pemerintah kembali melakukan

---

<sup>3</sup> Banyak pers mahasiswa yang menyatakan diri sebagai anggota IPMI pada saat memasuki awal Orde Baru. Selain itu, IPMI melibatkan diri dalam politik dengan menjadi Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Kemajuan juga terlihat dari adanya pengakuan terhadap IPMI yang diakui sejajar dengan organisasi pers lainnya oleh Departemen Penerangan

pembredelan<sup>4</sup> terhadap pers umum setelah peristiwa malapetaka 15 Januari 1974.

Pembredelan kembali terjadi pada tahun 1978 terhadap pers umum ternama seperti Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, Sinar Pagi, Pos Sore dan The Indonesia Times (Atmakusumah, 2009, h. 13). Arismunandar (2005, h. 89) menyatakan bahwa kekosongan pada pers umum tersebut dimanfaatkan oleh pers mahasiswa. Pada tahun 1978 tiras pers mahasiswa mencapai puncaknya. Pers mahasiswa justru bisa terbit dan masuk pasar umum dengan puluhan ribu eksemplar. Akibat keberaniannya dalam melakukan kritik lewat pemberitaan, pemerintah kembali membreidel penerbitan mahasiswa dan mengeluarkan kebijakan NKK/BKK<sup>5</sup> untuk menghindari aksi-aksi gerakan mahasiswa pada masa tersebut.

Konsekuensi logis dari penerapan NKK/BKK adalah semua kegiatan mahasiswa berada dalam pengawasan BKK. Jika pada masa sebelumnya, manajemen organisasi pers mahasiswa berada dalam garis dan struktur Dewan Mahasiswa maka pada masa paska NKK/BKK struktur pers mahasiswa diharuskan masuk pada struktur BKK. IPMI mengalami kesulitan dan pada saat itu Menteri Pemuda dan Olahraga Abdul Gafur mengajak IPMI untuk bergabung dengan KNPI. IPMI tidak menerima ajakan tersebut dan mendapat ancaman dari Abdul Gafur untuk membubarkan IPMI. IPMI tidak

---

<sup>4</sup> Tindakan pembredelan tersebut merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah untuk menghentikan demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran di Jakarta yang disebut sebagai Malari. Ini adalah pembredelan tanpa batas waktu yang terjadi hampir serentak pada 11 surat kabar harian dan mingguan. Ini merupakan pembredelan massal pertama kali pada masa Orde Baru.

<sup>5</sup> Pada tanggal 19 April 1978, sebagai bagian dari upaya depolitisasi kampus dan meredam aktivitas politik mahasiswa, konsep NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) dan BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan) diterapkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DR. Daoed Josoeff, melalui Surat Keputusan Menteri P dan K No. 01/V/1978.

mendapatkan izin untuk menyelenggarakan Kongres berikutnya. Akses IPMI di lembaga penerangan pemerintah ditutup. Nama IPMI-pun hilang setelah kepengurusan terakhir tahun 1982.

Setelah IPMI bubar tentu pers mahasiswa di Indonesia kehilangan induk organisasinya. Pada periode 1990-an kehidupan pers mahasiswa kurang begitu menonjol. Belum ada pers mahasiswa yang memiliki tiras mencapai puluhan ribu eksemplar seperti Salemba, Gelora Mahasiswa dan Kampus. Arismunandar<sup>6</sup> (2012) memaparkan bahwa cara pengelolaan yang kurang profesional dan diberlakukannya kalender akademis dengan SKS membuat penerbitan pers mahasiswa terbit seadanya dan jadwal penerbitan yang tidak teratur. Iklim politik Orde baru dengan sistem pendidikannya, yang sengaja membuat mahasiswa lebih memusatkan diri pada studi dan mengurangi aktivitas lain yang berbau politik ikut mempengaruhi perubahan tersebut.

Pada tanggal 14-18 Oktober 1992 dilaksanakan Lokakarya Penerbitan Mahasiswa Se-Indonesia di Universitas Brawijaya Malang. Pertemuan ini diikuti oleh 72 peserta dari 37 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia. Hasilnya terealisasi dalam sebuah pernyataan bergabungnya Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) yang ada di perguruan tinggi dalam satu organisasi baru. Pada tanggal 15 Oktober 1992 pukul 16.29 WIB diputuskan wadah baru yang bernama Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia (PPMI). Kota Malang memang memiliki catatan sejarah dalam menjaga stabilitas dan kondisi pers mahasiswa di Indonesia. Dengan terbentuknya PPMI, pers mahasiswa kembali memiliki

---

<sup>6</sup> Satrio Arismunandar adalah anggota-pendiri Aliansi Jurnalis Independen atau AJI (1994), Sekjen AJI (1995-1997), anggota-pendiri Yayasan Jurnalis Independen.

induk organisasi setelah IPMI bubar pada tahun 1982. Kongres I PPMI dilaksanakan pada tahun 1993. Pada kongres II tahun 1995 kata “penerbitan” diubah menjadi “pers” sehingga Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia berubah menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (Susantoro<sup>7</sup>, 2007).

Djanaid<sup>8</sup> mengatakan, Kota Malang juga pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan nasional pers mahasiswa pada tahun 1970an. Pertemuan tersebut diadakan di Universitas Brawijaya dan dihadiri oleh 45 pers mahasiswa dari perguruan tinggi seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut berhasil merumuskan pola penerbitan pers kampus secara nasional yang sampai sekarang diterapkan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia (Pitono, 2013, h. 30).

Terdapat 29 perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta di Kota Malang<sup>9</sup>, tetapi ternyata jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah pers mahasiswa yang ada. Ali<sup>10</sup> menyatakan bahwa, jumlah pers mahasiswa yang ada di kota Malang untuk saat ini sebanyak 26 LPM. Dari jumlah keseluruhan tersebut, hanya 19 LPM yang tergabung dalam Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Malang dan 11 LPM di dalamnya dari Universitas Brawijaya. Di bawah ini merupakan daftar Lembaga Pers Mahasiswa yang ada di kota Malang.

<sup>7</sup> Agus Gussan Susantoro merupakan Presidium Nasional PPMI 2000-2001 dari wilayah Jawa Timur.

<sup>8</sup> Djanalis Djanaid merupakan aktivis pers mahasiswa pada tahun 1970an. Beliau pernah mendirikan koran Mingguan Mahasiswa dan Mimbar Universitas Brawijaya, wakil ketua PWI Malang, Ketua Bidang Pendidikan PWI Jatim.

<sup>9</sup> Data tersebut diambil dari website resmi Pemerintah Kota Malang. Diakses dari [http://www.malangkota.go.id/mlg\\_detail.php?own=fasdidik&id=25](http://www.malangkota.go.id/mlg_detail.php?own=fasdidik&id=25)

<sup>10</sup> Ahmad Yani Ali adalah Alumni UAPKM UB. Pernah menjadi Pemimpin Umum UAPKM UB 2012-2013 & Sekjen PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) Malang 2013-2015

**Tabel 1 Daftar Pers Mahasiswa Di Kota Malang.** Sumber: wawancara dengan Ahmad Yani Ali (Sekjen PPMI Kota Malang 2013-2015)

No.	Nama Pers mahasiswa	Fakultas/Universitas	Status Anggota
1	UAPKM-UB	Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
2	LPM Perspektif	FISIP Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
3	LPM Indikator	FE Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
4	LPM Mimesis	FIB Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
5	LPM Dianss	FIA Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
6	LPM Solid	FT Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
7	LPM Manifest	FH Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
8	LPM Mafaterna	FAPET Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
9	LPM Techno	FTP Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
10	LPM Display	PTIHK Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
11	LPM Canopy	FP Universitas Brawijaya	Anggota PPMI kota Malang
12	LPM Basic	Fmipa Universitas Brawijaya	Bukan Anggota
13	LPM Diagnostik	FK Universitas Brawijaya	Bukan Anggota
14	LPM Candida	FKH Universitas Brawijaya	Bukan Anggota
15	LPM Aqua	FAPERIK Universitas Brawijaya	Bukan Anggota
16	LPM Mei	FE Unisma	Anggota PPMI kota Malang
17	LPM Fenomena	FKIP Unisma	Anggota PPMI kota Malang
18	UKPM Civitas	Universitas Merdeka	Anggota PPMI kota Malang
19	LPM Siar	Universitas Negeri Malang	Anggota PPMI kota Malang
20	LPM Inovasi	UIN Maliki	Anggota PPMI kota Malang
21	MCJC	Universitas Ma Chung	Anggota PPMI kota Malang
22	HMJF	Universitas kanjuruhan	Anggota PPMI kota Malang
23	LPM Didaktik	FKIP UMM	Anggota PPMI kota Malang
24	LPM API	STIE ASIA	Bukan Anggota
25	LPM Kompen	Politeknik Negeri Malang	Bukan Anggota
26	LPM Udata	Kampus Kepanjen	Bukan Anggota

Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, 26 pers mahasiswa yang ada di kota Malang, 15 didominasi oleh LPM dari Universitas Brawijaya dan 11 LPM sisanya berasal dari perguruan tinggi lainnya. Artinya, hampir setiap fakultas di Universitas Brawijaya memiliki Lembaga Pers Mahasiswa, sangat berbeda dengan Universitas lain yang hanya terdiri dari 1 LPM saja. Hal tersebut disebabkan oleh posisi Universitas Brawijaya yang merupakan Universitas paling diminati di kota Malang<sup>11</sup>, sehingga

<sup>11</sup>Dilihat dari jumlah program studi yang ditawarkan pada SNMPTN tahun 2014, Universitas Brawijaya berada di urutan ke dua dengan 70 program studi setelah universitas pendidikan indonesia. Lihat <https://web.snmptn.ac.id/ptn>. Selain itu, Universitas Brawijaya tercatat sebagai PTN dengan penerima calon mahasiswa terbanyak di Indonesia pada tahun 2013 dengan jumlah

dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang ada<sup>12</sup>, LPM di Universitas Brawijaya memiliki SDM yang cukup dibandingkan dengan LPM dari Universitas lain. Selain faktor SDM, Ali memaparkan beberapa permasalahan yang dialami oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Kota Malang seperti keterbatasan masa studi, kondisi finansial, serta kebijakan pemegang otoritas.

Keterbatasan masa studi menyebabkan mahasiswa lebih memilih untuk lulus tepat waktu sehingga aktivitas kemahasiswaan hanya dijadikan sebagai aktivitas sampingan. Loyalitas anggota serta kaderisasi LPM ikut dipengaruhi keterbatasan masa studi yang diterapkan. Keadaan yang terjadi saat ini sangat berbeda dengan pers mahasiswa pada tahun 1965-1974. Seperti contoh pada surat kabar kampus Salemba, sistem pendidikan yang diterapkan pada waktu itu memungkinkan lama kuliah sampai 10 tahun atau lebih, sehingga mahasiswa memiliki waktu yang lebih lama untuk terlibat dalam aktivitas kemahasiswaan (Arismunandar, 2012).

Kondisi finansial berpengaruh terhadap periode terbit suatu LPM. Tidak dapat dipungkiri, sumber dana utama dari pers mahasiswa berasal dari pihak rektorat, sehingga akan terjadi kemunduran jadwal terbit saat terkendala urusan administrasi keuangan. Sedangkan kebijakan pemegang otoritas berkaitan dengan kebijakan birokrasi dari pihak rektorat seperti kemahasiswaan dan kebijakan dari dekanat serta organisasi lainnya. Ali (personal interview, 2014) menjelaskan permasalahan yang pernah dialami LPM terkait kebijakan pemegang otoritas, seperti penjelasan di bawah ini

---

5.426 lewat jalur SBMPTN 2013. Lihat <http://penakita.com/universitas-brawijaya-penerima-cama-terbanyak-di-indonesia/>.

<sup>12</sup>Hingga maret 2014, jumlah mahasiswa di Universitas Brawijaya sebanyak 61.231 orang. Diambil dari <http://ub.ac.id/tentang/profil-universitas>.

“LPM Aqua sempat beberapa kali dihadang pemberitaannya oleh BEM maupun dekanat fakultasnya sendiri. Bahkan setelah kejadian, LPM Aqua mendapatkan intimidasi seperti pemboikotan sekretariat oleh oknum yang tidak diketahui. Hal tersebut menuai konflik yang tidak berujung hingga aliran dana yang seharusnya mereka dapatkan juga sempat terhenti”

Kebijakan pemegang otoritas yang dialami LPM saat ini hanya sebatas kebijakan dari pihak Universitas sebagai lingkup dari pers mahasiswa, berbeda dengan kebijakan pemerintah pada saat era Orde Baru. Pemerintah benar-benar bersikap represif terhadap pers mahasiswa yang dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap aktivitas kemahasiswaan.

Arismunandar (2012) memaparkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Permenpen RI No.1/Per/Menpen/1975 yang menggolongkan pers mahasiswa sebagai penerbitan khusus yang bersifat non-pers dan Surat Edaran Dikti No. 849/D/T/1989 tentang penerbitan kampus di perguruan tinggi. Seperti yang dialami oleh buletin *Bergerak!*<sup>13</sup> dalam menjalankan tugas keredaksiannya. Redaksi *Bergerak!* Pernah ditelpon aparat Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara) karena pemberitaannya yang terlalu berani, bahkan pers umum tidak berani memuat pemberitaan seperti itu. Pemberitaan yang tidak ditutup-tutupi dan sesuai fakta seperti mengutip ucapan orang yang berpidato ketika aksi bahwa “kita harus turunkan Soeharto” dimuat apa adanya (Arismunandar, 2005, h.137).

---

<sup>13</sup> Buletin dari para aktivis pers Universitas Indonesia (UI) di Jakarta. Menyebut diri mereka sebagai “Media Aksi Mahasiswa UI” memiliki peran yang berguna bagi penyebaran informasi berbagai aksi mahasiswa dan penggalangan opini di kalangan mahasiswa dan aktivis pergerakan menjelang berhentinya Soeharto.

Dari permasalahan yang dialami berbagai LPM di atas, dapat dikatakan telah terjadi perubahan fenomena pada kondisi pers mahasiswa saat ini dengan pers mahasiswa pada tahun 1966, 1978 dan 1998. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Syahrial (2009) mengenai peran politik pers mahasiswa pada tahun 1998-2008 di Kota Malang. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi fluktuasi pada peran politik pers mahasiswa di kota Malang. Pers mahasiswa di kota Malang tidak terlihat seperti idealnya pers perjuangan, karena pers mahasiswa saat ini hanya berperan menjalankan tugas jurnalistik yaitu mencari informasi berita dan memberitakannya. Padahal sebagai komunikator, pers mahasiswa memiliki berbagai peran seperti peran pemasok informasi, peran motivator, peran sosialisasi, peran integrasi, peran edukator, dan sebagai wahana debat dan diskusi (Arismunandar, 2005, h. 28).

Perbedaan fenomena tersebut yang menjadi motivasi penulis dalam melihat dinamika yang terjadi pada pers mahasiswa, khususnya di Universitas Brawijaya karena Universitas Brawijaya memiliki 15 LPM dari 26 LPM yang ada di kota Malang. Penulis tertarik untuk mengetahui pengelolaan sirkulasi yang berkaitan dengan dana dan periode terbit, kualitas dan jumlah SDM yang ada, loyalitas anggota, regenerasi serta kaderisasi dalam LPM tersebut. Dari berbagai hal tersebut dapat terlihat bagaimana dinamika yang terjadi pada sebuah pers mahasiswa dalam mempertahankan eksistensinya. Penulis memilih Unit Aktivitas Pers Kampus (UAPKM) UB untuk dijadikan subjek penelitian.

UAPKM UB merupakan pers mahasiswa tingkat universitas di Universitas Brawijaya Malang. UAPKM UB didirikan pada tahun 1983 dengan SKK no. 002/SK/BKK/1983 dengan nama Unit Aktivitas Pers Mahasiswa. Terjadi penambahan kata 'kampus' pada tahun 1985-1986, sehingga menjadi Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa (perpusmawa).

Pada periode 1988-1989 Wiyono dipercaya untuk menjabat sebagai ketua umum. Pada periode ini unitas Perpusmawa berganti lagi. Dengan adanya surat edaran Dikti No. 849/D/T/1989 tentang perubahan nama, kata "Pers" harus diganti dengan kata 'Penerbitan', sehingga menjadi Unit Aktivitas Penerbitan Kampus Mahasiswa (Penpusmawa).

Pada tahun 1992 majalah 'Ketawanggede' terbit disaat Asep Wahyu ditunjuk sebagai ketua umum. Majalah 'Ketawanggede' sempat terbit sebanyak 3 edisi namun pada tahun 1994 majalah ini di breidel karena alasan tertentu oleh pihak rektorat. Selain itu pada tahun 1992 juga diadakan Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia yang menghasilkan terbentuknya Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). Pada periode Kuntarto Adi (1997-1998), nama Unit Aktivitas Penerbitan Kampus Mahasiswa diganti kembali menjadi Unit Aktivitas Pers kampus Mahasiswa (UAPKM) yang tetap digunakan sampai sekarang.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengungkapkan dinamika yang terjadi dan bagaimana UAPKM UB mempertahankan eksistensinya sampai saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Historical Research*. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi mengenai perubahan sosial maupun pengaturan sosial di masyarakat dengan

cara membandingkan antar sistem sosial atau antar rentang waktu kejadian.

Dengan metode ini, data masa lalu akan digunakan oleh peneliti untuk melihat dinamika UAPKM UB dalam mempertahankan eksistensinya.

Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman atau masukan kepada pers mahasiswa lain dalam menjaga eksistensinya.

Penelitian ini perlu dilakukan karena semakin banyak pers mahasiswa yang tidak dapat bertahan sampai saat ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana dinamika UAPKM UB (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya) dalam mempertahankan eksistensinya sebagai pers mahasiswa di Universitas Brawijaya sampai saat ini?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dinamika yang terjadi pada UAPKM UB (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya) dalam mempertahankan eksistensinya sebagai pers mahasiswa di Universitas Brawijaya sampai saat ini.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya khasanah penelitian *historical research* dalam bidang ilmu komunikasi. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dalam bidang komunikasi massa khususnya pers mahasiswa.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta masukan terhadap Lembaga Pers Mahasiswa lain dalam upaya menjaga eksistensinya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam mengatasi hambatan yang dialami sehingga Lembaga Pers Mahasiswa lain dapat mengantisipasi dan meminimalisir kelemahan yang menjadi hambatan mereka.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pers dan Peran Mahasiswa

Pers dan mahasiswa merupakan dua bagian yang saling membutuhkan dan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu negara. Pers memiliki peran yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Djatmika (2004, h. 12) mengatakan pers merupakan pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Oleh karena itu pers disebut sebagai pilar ke empat (*the fourth estate*) dari demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mahasiswa juga banyak berperan dalam transformasi sosial politik dalam suatu negara. Contohnya pada saat zaman kemerdekaan, Berita Indonesia yang diterbitkan oleh Eddie Tahsin dan pelajar dari Jakarta *Ika Dai Gaku* (Sekolah Tinggi Kedokteran) ikut berperan dalam melawan pemberitaan propaganda dari Jepang lewat berita Gunseikanbu (Nurudin, 2009, h. 44). Apa yang dilakukan Jepang lewat pemberitaan propaganda menjadi bukti bahwa pers dapat menjadi media komunikasi yang dapat membentuk opini masyarakat sesuai dengan pendapat Djatmika tersebut.

Pers memiliki dua kedudukan yaitu sebagai media komunikasi dan lembaga atau organisasi yang menyebarkan berita sebagai karya jurnalistik kepada khalayak. Dalam kedudukannya sebagai media komunikasi, Kusumaningrat dan Kusumaningrat (2005, h. 17) membedakan pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit berupa barang cetakan seperti koran, majalah dan tabloid, sedangkan pers

dalam arti kata luas menyangkut kegiatan komunikasi dengan media cetak, media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Pengertian tersebut mengacu pada pers sebagai media komunikasi bukan sebagai suatu organisasi atau lembaga. Pers sebagai lembaga dapat dikatakan sebagai sebuah subsistem dari sistem pemerintahan dalam suatu negara (Effendy, 2003, h. 87). Oleh karena itu, sebagai lembaga sosial, pers tidak bisa hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lembaga lain dan bergantung pada falsafah dan sistem pemerintahan negara dimana ia berada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pers memiliki dua kedudukan yaitu sebagai media massa seperti surat kabar, radio, televisi dan pers sebagai suatu lembaga sosial atau organisasi yang berkaitan dengan penerbitan dan penyiaran. Sebagai lembaga sosial, pers dapat melaksanakan kegiatan jurnalistik. Artinya, pers dapat menjadi sebuah lembaga yang mencari informasi, mengolah dan menyampaikan informasi tersebut baik dalam bentuk tulisan, suara atau video yang disampaikan lewat media cetak, elektronik dan media lainnya.

Dalam kedudukannya sebagai media massa dan lembaga sosial, pers memiliki fungsi dan peran yang harus dijalankan. Pada umumnya pers memiliki empat fungsi yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pendapat lain dikemukakan oleh Kusumaningrat & Kusumaningrat (2005, h. 27-29) yang menyatakan fungsi pers tersebut, meliputi fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, fungsi menghibur, fungsi regeneratif, fungsi pengawasan hak-hak warga negara, fungsi ekonomi dan fungsi swadaya. Dengan fungsi-fungsi tersebut,

pers memiliki berbagai peranan yang harus dijalankan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 6, yaitu:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Dari berbagai fungsi yang telah diuraikan di atas, fungsi kontrol sosial merupakan yang terpenting karena media massa dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Dengan media massa, berbagai inovasi dan pembaharuan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Schramm menyebutkan, peran media massa dalam pembangunan nasional adalah sebagai agen pembaharu (*agent of social change*). Artinya, media massa dapat membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern, khususnya peralihan dari kebiasaan yang dapat menghambat pembangunan ke sikap baru yang tanggap pada pembaharuan, demi pembangunan (Depari & Andrews, 2006, h. 45). Bahkan Marshal McLuhan menyebut pers sebagai *the extension of man* yang artinya media adalah eksistensi manusia. Dengan kata lain, media adalah perpanjangan dan

perluasan dari kemampuan jasmani dan rohani manusia (Nurudin, 2010, h. 69).

Pers di Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang sangat erat hubungannya dengan pergerakan nasional. Pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan. Surat kabar dijadikan sebagai media dalam menyampaikan azas, tujuan dan program aksi organisasinya masing-masing. Kemunculan beberapa surat kabar tersebut tidak lepas dari lahirnya berbagai organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan *Indische Partij*. (Santosa & Supriatna, 2008). Kesadaran para pemimpin pergerakan seperti Dr. Wahidin Soedirohoesodo, O.S. Tjokroaminoto, dan Dr. Soetomo akan pentingnya media massa dapat dilihat dari terbitnya 36 surat kabar dari berbagai organisasi pergerakan diantaranya: Medan Priaji, Oetoesan Hindia, Medan Moeslimin, Soeloeh Rakyat Indonesia, Pewarta Soerabaya, dan lain-lain (Gani, 1978, h. 39-40). Pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari adanya gerakan pelajar dan mahasiswa. Contoh pada saat organisasi pelajar seperti *Indonesische Studie Club* dan *Algemene Studie* mendorong pergerakan pemuda dan melebur menjadi organisasi baru yaitu Indonesia Moeda. Indonesia Moeda berhasil mencetuskan sumpah pemuda pada tahun 1928 dan menerbitkan Soera Indonesia Moeda (Hari, 2011). Oleh karena itu, mahasiswa merupakan bagian yang penting dalam suatu negara.

Sebagian besar transformasi sosial politik yang terjadi di Indonesia dipelopori oleh mahasiswa, seperti gerakan 66' yang menyebabkan keruntuhan rezim Orde Lama Soekarno dan gerakan 98' yang menyebabkan

repository.ub.ac.id

urunnya Soeharto. Banyak alasan yang menyebabkan mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas politik seperti, pemikiran yang mengatakan mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan sosial-politik dan pemikiran yang menyebutkan mahasiswa sebagai komunitas sosial yang lebih cepat merespon ketimpangan sistem politik (Siahaan, 2008). Hal tersebut dikarenakan mahasiswa memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat biasa, selain itu gerakan mahasiswa terjadi saat terjadi ketimpangan sosial yang disebabkan oleh adanya penindasan secara struktural dari atas ke bawah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Fadjar & Effendy (1989, h. 66) menyebutkan bahwa dengan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mahasiswa lebih memiliki kesempatan untuk menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan idealismenya.

Dari gagasan ide yang disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Mahasiswa sering terlibat dan ikut berperan dalam melakukan suatu perubahan. Itulah sebabnya mengapa mahasiswa disebut sebagai agen perubahan (*agent of change*). Sebagai *agent of change*, mahasiswa membutuhkan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan ideologi mereka. Pers dapat menjadi alat perjuangan bagi kaum aktivis gerakan mahasiswa, sebuah wadah untuk menyampaikan aspirasi kritis, ideologi, informasi serta sebagai alat persuasi (mempengaruhi) khalayak. Pers yang dikelola oleh mahasiswa dikenal dengan pers mahasiswa.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## 2.2 Pengertian Pers Mahasiswa

Pers mahasiswa dan pers umum memiliki kesamaan meskipun pada dasarnya berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada derajat profesionalisme dan segmentasi pembaca. Jika dilihat dari derajat profesionalisme, pers mahasiswa jelas berbeda dengan pers umum. Perbedaan tersebut disebabkan karena aktivitas dalam pers mahasiswa masih dijadikan sebagai aktivitas sampingan, keterbatasan waktu karena sistem SKS yang diterapkan, dan kaderisasi yang terbatas, yang menyebabkan pers mahasiswa kalah jika dibandingkan dengan pers umum berdasarkan tingkat profesionalismenya (Arismunandar, 2012). Perbedaan yang paling mendasar dari pers mahasiswa dengan pers pada umumnya menurut Siregar (1983, h. 36) disebabkan oleh sikap keilmuan yang didapatkan mahasiswa dari pendidikan tinggi dan nilai kepemudaan sehingga menyebabkan pers mahasiswa memiliki keberanian dalam masyarakat, cenderung radikal, kritis dan emosional.

Sikap kritis yang dimiliki oleh pers mahasiswa dinamakan sebagai jurnalisme struktural oleh Didik Supriyanto dalam bukunya yang berjudul *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*. Supriyanto (1998, h. 126) menjelaskan bahwa semua aktivitas dalam pers mahasiswa, yang bertujuan untuk merealisasikan idealisme pers mahasiswa bisa dianggap sebagai aktivitas pers mahasiswa. Dengan demikian, aktivitas pers mahasiswa tidak hanya bergerak dalam bidang penerbitan seperti membuat majalah, koran, buletin tapi lebih dari itu sebagai organisasi pergerakan, aktivis pers mahasiswa harus melakukan aksi penyadaran lewat berbagai kesempatan seperti seminar, menciptakan forum diskusi, dan melakukan jejaring antar

pers mahasiswa. Hal tersebut yang menyebabkan pers mahasiswa berbeda dengan pers pada umumnya karena mahasiswa juga dituntut berani dalam bertindak kritis dan peduli dengan lingkungan sekitar, terutama jika terdapat ketidakadilan.

Dalam pandangan yang lebih spesifik, dari segi praktik pers mahasiswa juga menerapkan dan mengikuti apa yang dilakukan oleh pers umum yaitu mempraktekkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pers mahasiswa pada umumnya juga mengerjakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak yang tersedia. Dalam bidang kebijaksanaan redaksional dan struktur organisasinya, pers mahasiswa juga hampir sama dengan pers umum. Abrar (1992, h. 15-17) memaparkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menentukan kebijaksanaan redaksional dalam pers mahasiswa yaitu, teknik penyajian informasi yang meliputi kelayakan dan gaya informasi yang diterapkan, sasaran pembaca atau *target audience*, dan kewajiban etis yang berhubungan dengan kesadaran anggota dalam mematuhi etika profesi.

Pada era Orde Baru Departemen Penerangan menggunakan “penerbitan kampus mahasiswa” untuk pers mahasiswa. Pergantian kata ‘pers’ menjadi ‘penerbitan’ tersebut disebabkan Permenpen RI No.1/Per/Menpen/1975 dan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 849/D/T/1989<sup>1</sup> yang menggolongkan pers

---

<sup>1</sup> M. Enoch Markum selaku Dirjen Dikti Depdikbud mengatakan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menghilangkan kerancuan istilah dan mempertegas aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Indonesia hanya dikenal pers nasional serta tidak dikenal pers lain.

mahasiswa sebagai penerbitan khusus yang bersifat non-pers. Penerbitan kampus mahasiswa didefinisikan sebagai penerbitan berkala yang diselenggarakan oleh mahasiswa di dalam kampus dan untuk kepentingan kampus (Arismunandar, 2005, h. 19). Istilah penerbitan dianggap lebih lunak jika dibandingkan dengan kata pers, karena Orde baru memang tidak menginginkan pers mahasiswa hidup di dalam kampus. Setelah Kongres II PPMI di Jember disepakati bahwa, penggunaan istilah 'penerbitan' diubah kembali menjadi 'pers' dan diterapkan oleh seluruh pers mahasiswa di Indonesia (Fathoni, 2012, h. 92).

Sejalan dengan pendapat di atas, Abrar (1992, h. 35) mendefinisikan pers mahasiswa sebagai proses penyiaran pikiran, gagasan, peristiwa dan pengalaman dalam bahasa tulisan yang dilakukan oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Lebih spesifik Supriyanto (1998, h. 81) mengkategorisasikan pers mahasiswa ke dalam tiga jenis yaitu: pers kampus, pers kampus mahasiswa dan pers mahasiswa. Pers kampus dikelola oleh dosen dan karyawan kampus, pers kampus mahasiswa dikelola oleh dosen, karyawan serta mahasiswa, sedangkan pers mahasiswa dikelola oleh mahasiswa baik di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas

Dari definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan Abrar, pers mahasiswa hanya dilaksanakan untuk kepentingan kampus dan lingkungannya di dalam kampus padahal, pers mahasiswa dalam kedudukannya sebagai pers alternatif sempat bersaing dengan pers umum pada zaman Orde Baru. Tentu definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan juga tidak lepas dari kekuasaan pemerintah dalam mengatur aktivitas

kemahasiswaan pada saat itu. Seperti pada waktu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 028/U/1974 pada tanggal 3 Pebruari 1974, satu poin diantaranya berbunyi : “Pers mahasiswa dibina dan dikembangkan sebagai media tukar menukar informasi dan pengalaman antar civitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan dalam hubungan dengan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi” (Baihaki, 2012).

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pers mahasiswa merupakan sebuah penerbitan yang dikelola oleh mahasiswa dan bergerak dalam bidang jurnalistik untuk menyampaikan informasi, gagasan dan pengalaman yang dilandasi idealisme yang tinggi dalam suatu perguruan tinggi atau universitas. Pengertian atau definisi mengenai pers mahasiswa tersebut perlu dikaji ulang sebab dalam esiklopedia pers Indonesia, yang dimaksud pers adalah penerbit atau perusahaan yang berkaitan dengan media massa dan berbadan hukum. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Ada 3 bentuk badan hukum yang diatur dalam peraturan Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yaitu, perseroan terbatas, yayasan, atau koperasi.

Pers mahasiswa tidak tergolong sebagai pers nasional atau pers profesional sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pers. Dalam menjalankan aktivitasnya pers mahasiswa juga menjalankan dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, namun pada kenyataannya aktivis pers mahasiswa tidak termasuk dalam definisi wartawan sebagaimana yang tercantum dalam

Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 pasal 10 dijelaskan bahwa Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya, artinya wartawan merupakan profesi dan mendapatkan gaji. Oleh karena itu disaat pers mahasiswa mengalami tindakan intimidasi, diskriminasi, dan pembredelan, pers mahasiswa tidak dapat menggunakan Undang-Undang Pers dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Dewan Pers.

### **2.3 Sejarah Pers Mahasiswa di Indonesia**

Pers mahasiswa telah ada di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah pers mahasiswa menurut Amir Effendy Siregar (dalam Mondry, 2008, h. 35) dipengaruhi oleh gerakan kemahasiswaan dan gerakan kebangsaan. Nugroho NotoSusanto<sup>2</sup> mengungkapkan bahwa pers mahasiswa Indonesia sesungguhnya mulai timbul dari zaman kolonial Belanda. Namun, pers mahasiswa pada saat itu dipandang kurang begitu berperan dalam pergerakan mahasiswa. Baru sesudah era kemerdekaan, pers mahasiswa memulai kiprahnya ke arah profesional dan sangat berperan dalam berbagai gerakan mahasiswa (Susantoro, 2007).

#### **2.3.1 Pers Mahasiswa pada Masa Penjajahan Belanda**

Kelahiran pers mahasiswa pada zaman penjajahan Belanda berasal dari organisasi pelajar Indonesia yang menempuh studi di luar negeri

<sup>2</sup> Nugroho Notosusanto adalah Rektor Universitas Indonesia ke 8 dan Menteri Pendidikan pada kabinet pembangunan IV (1983-1985) setelah era Daed Joesoef.

dan organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Beberapa pers mahasiswa yang lahir pada saat itu adalah Majalah Indonesia Merdeka, Oesaha Pemoeda, Jong Java, dan Soera Indonesia Moeda. Pers mahasiswa pada saat itu memang belum begitu berperan dalam pergerakan mahasiswa, namun dipengaruhi oleh gerakan kebangsaan dan dijadikan alat atau media dalam menyebarkan ide-ide perubahan yang berhubungan dengan kemerdekaan (Susantoro, 2007). Contohnya pada saat Majalah Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda secara khusus dalam satu edisi memuat Manifesto 1925 dan menjelaskan secara detail pernyataan-pernyataan kemerdekaan dengan menyerukan semua wilayah bekas jajahan Hindia Belanda mendirikan bangsa baru yang merdeka atas nama Indonesia (Hari, 2011). Intervensi penjajah pada saat itu dapat dilihat dari adanya divisi khusus dalam kepolisian dengan nama *Politiek Inlichtingen Dienst* yang bertugas melakukan investigasi terkait kejahatan politik sehingga, Majalah Indonesia Merdeka ditulis tanpa mencantumkan nama-nama asli dan disebarakan secara sembunyi-sembunyi, baik di Belanda maupun hingga sampai ke Indonesia.

Selain di Belanda, majalah *Seruan Azhar* lahir di Kairo sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan kebebasan politik dan pembelaan tanah air dari penjajah. Majalah *Seruan Azhar* diterbitkan oleh mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Universitas Al Azhar.

Majalah *Seruan Azhar* diterbitkan setiap bulan dengan menggunakan tulisan jawi, terbit perdana pada bulan Oktober 1925 pada masa

kepemimpinan Djanan Taib dan berhasil terbit sebanyak 31 edisi hingga bulan Mei 1928. Majalah Seruan Azhar menjadi media utama dalam upaya menimbulkan kesadaran agar Tanah Melayu dan Indonesia dapat bebas serta memanfaatkan hasil bumi sendiri untuk kepentingan bangsa dan agama (Othman, Ishak, Nordin, Haris, 2013 h. 50)

Di Indonesia terdapat surat kabar seperti Jong Java, dan Soera Indonesia Moeda yang lahir dari organisasi pemuda dan pelajar di Indonesia. Hill (2011, h. 138) menyebut Jong Java sebagai cikal bakal munculnya pers mahasiswa yang lahir dari organisasi bermisi kebangsaan saat jaman penjajahan Belanda. Arismunandar (2012) juga menjelaskan bahwa Soera Indonesia Moeda merupakan surat kabar yang lahir dari organisasi bernama Indonesia Moeda (gabungan dari *Indonesische Studie Club* dan *Algemene Studie Club*) yang berhasil mencetuskan sumpah pemuda dalam Kongres Pemoeda II di Jakarta pada tahun 1928. Hari (2011) menyebutkan bahwa surat kabar tersebut dijadikan media dalam menyebarkan propaganda anti-kolonialisme pada saat itu sehingga rezim kolonial mengeluarkan tindakan represif berupa perintah agar kepala sekolah menengah menjatuhkan *Schoolverbood* atau mengeluarkan pemuda-pemuda yang terbukti bergabung dengan Indonesia Moeda.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pers mahasiswa pada zaman penjajahan Belanda berhubungan dengan gerakan kebangsaan dan semangat kemerdekaan. Oleh karena itu surat kabar yang diterbitkan oleh pelajar ataupun organisasi pemuda di

Indonesia dijadikan sebagai alat dalam memperjuangkan kemerdekaan ataupun propaganda anti-kolonialisme.

### 2.3.2 Pers Mahasiswa pada Masa Penjajahan Jepang

Pada saat masa penjajahan Jepang kondisi pers mahasiswa di Indonesia tidak banyak berperan, bahkan dapat dikatakan tidak berkembang dan mengalami penurunan dari masa sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kondisi yang ada pada saat itu, berupa sensor ketat yang dikeluarkan oleh Jepang (Mondry, 2008, h. 33). Pers di Indonesia yang pada waktu itu terdiri dari surat kabar Belanda, Cina, dan Indonesia seperti *Java Bode*, *Bataviaasch*, *Sin Po*, *Keng Po*, *Pemandangan*, dan *Kebangoenan* ikut mengalami dampak tersebut. Bahkan Gani (1978, h. 110) mengatakan bahwa sebenarnya surat kabar Belanda, Cina, dan Indonesia sudah berhenti terbit saat tentara Jepang menjelang masuk ke Indonesia, kecuali *Hong Po*.

Tindakan represif yang dikeluarkan oleh Jepang dapat terlihat dari dikeluarkannya *Osamu Seirei*<sup>3</sup> atau UU Pemerintah No. 16 Tahun 1942. tentang sarana komunikasi dan publikasi yang menerapkan sistem izin terbit dan sensor preventif (Nurudin, 2009, h. 40). Dengan peraturan tersebut, semua jenis barang cetakan harus memiliki izin publikasi atau izin terbit terlebih dahulu dan semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepang dilarang terbit. Tindakan Jepang terhadap sensor

<sup>3</sup> *Osamu seirei* dikeluarkan oleh Panglima tentara ke-16 yang berisi larangan peredaran surat kabar berbahasa Belanda dan Tionghoa. Pada 3 Februari 1944, Jepang mengganti *Osamu Seirei* no. 16 Tahun 1942 dengan *Osamu Seirei* no. 6 Tahun 1944 yang bersifat lebih represif, memberlakukan sensor ketat terhadap produk jurnalistik dan diikuti sanksi penjara bagi yang melanggar.

preventif didukung dengan tindakan lainnya seperti ditempatkannya *Shidooiin* (penasihat Jepang) pada redaksi setiap surat kabar dengan tujuan melakukan kontrol langsung terhadap kegiatan redaksi, bahkan tidak jarang *Shidooiin* tersebut menulis artikel sendiri dengan mencantumkan nama para anggota redaksi tersebut (Nurudin, 2009, h. 41). Beberapa surat kabar yang diperbolehkan terbit di Pulau Jawa antara lain Asia Raya, Jawa Shinbun, Kung Yung Pao, Tjahaja, Soeara Asia, Sinar Baroe, Sinar Matahari, dan Pemandangan (Gani, 1978, h. 117).

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap represif yang dikeluarkan oleh Jepang pada saat itu menyebabkan perubahan pada kondisi pers di Indonesia, termasuk keberadaan pers mahasiswa. Dengan perubahan tersebut, kondisi pers di Indonesia mengalami kemunduran sejak Jepang memasuki Indonesia.

### **2.3.3 Pers Mahasiswa pada Masa Kemerdekaan**

Peran pers mahasiswa kembali terdengar menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat surat kabar yang berperan dalam menyebarkan berita kemerdekaan dengan nama Berita Indonesia. Berita Indonesia merupakan surat kabar yang diterbitkan oleh Eddie Tahsin bersama teman-temannya yang berasal dari golongan pelajar seperti Erie Soedewo, Hasjim Mandan dan Abdoel Moerad dari Jakarta *Ika Dai Gaku* (Sekolah Tinggi Kedokteran) (Nurudin, 2009, h. 43).

Tujuan dari diterbitkannya Berita Indonesia pada saat itu untuk melawan pemberitaan propaganda dari Jepang yang disiarkan lewat

berita Gunseikanbu. Tindakan yang dilakukan oleh Eddie dan teman-temannya dapat dikatakan berani karena penerbitan Berita Indonesia dilakukan secara ilegal mengingat saat itu semua koran tidak boleh terbit kecuali berita Gunseikanbu. Oleh karena itu, Gani (1978, h. 131) mengatakan bahwa Berita Indonesia berperan sebagai surat kabar pelopor yang membentengi perjuangan pemerintah dan rakyat untuk membela Republik Indonesia yang baru lahir. Berita Indonesia yang pada awalnya dicetak secara ilegal kemudian dicetak secara resmi di *De Unie* yang juga mencetak Asia Raya dan menjadi harian nasional pertama setelah kemerdekaan (Nurudin, 2009, h. 45).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, peran pers mahasiswa pada masa kemerdekaan berbeda dengan masa sebelumnya saat penjajahan Belanda. Jika pada masa penjajahan Belanda pers mahasiswa digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan ataupun propaganda anti-kolonialisme dengan cara menyebarkan ide-ide perubahan yang berhubungan dengan kemerdekaan, di masa kemerdekaan pers mahasiswa berperan dalam menyebarkan informasi kemerdekaan atau membentengi perjuangan pemerintah dan rakyat.

#### **2.3.4 Pers Mahasiswa pada Era Demokrasi Liberal**

Pers mahasiswa banyak lahir pada era demokrasi liberal, dimulai pada tahun 1955 dan berkembang pesat di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Beberapa pers mahasiswa tersebut seperti Akademica, Mahasiswa, Forum, Vivat, Aesculapium, Bumi Siliwangi (IKIP),

Gunadharna, Intelegensia (FT ITB), Mesin, IDEA (PMB), Ganeca, Criterium (IAIN), Gajah Mada (UGM), GAMA (UGM), Media (HMI), Pulsus (PMKRI), Uchuwah (Islam) dan Universitas (Arismunandar, 2012). Pergerakan pers mahasiswa pada saat itu belum begitu terlihat karena pers mahasiswa belum mendapatkan tekanan dari pemerintah. Hal tersebut dikarenakan, kondisi Indonesia yang baru Merdeka sehingga pemerintah memiliki hubungan yang baik dengan pers mahasiswa.

Banyak pers mahasiswa yang lahir dan berkembang di Indonesia. Karena perkembangannya yang cukup pesat, diadakan konferensi I bagi pers mahasiswa Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 1955 yang melahirkan organisasi baru dengan nama Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI) (Arismunandar 2012). Kedua organisasi tersebut kemudian melebur menjadi IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) pada saat konferensi pers mahasiswa II pada tahun 1958. IPMI baru lahir tepatnya setahun sebelum dekrit presiden keluar, kehidupan pers mahasiswa ikut mengalami perubahan dikarenakan kontrol ketat yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap pers. Akibatnya, pers mahasiswa seperti Forum, Mahasiswa, dan GAMA berhenti terbit.

### **2.3.5 Pers Mahasiswa pada Era Demokrasi Terpimpin**

Memasuki era Demokrasi Terpimpin kehidupan pers mahasiswa belum mengalami perubahan yang berarti. Bahkan kehidupan pers di Indonesia pada saat itu semakin menunjukkan kemunduran jika ditinjau

dari kebebasan pers. Smith (1986, h. 122) berpendapat bahwa tahun 1953 bukanlah tahun yang baik bagi pers sebab, pers di Indonesia hidup dalam ketakutan terhadap undang-undang kolonial<sup>4</sup> peninggalan tahun 1848 yang memungkinkan pemerintahan melakukan pembredelan apabila berita yang dimuat dirasa mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Nurudin (2009, h. 46) mengatakan bahwa tanggal 1 Oktober 1958 dapat dikatakan sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemerintah menerapkan gerakan antipers, sehingga banyak pimpinan surat kabar ditangkap dan harus rela surat kabarnya mati di tangan pemerintah (Smith, 1986, h. 173)

Di tengah kondisi pers Indonesia yang mengalami kemunduran, lahir beberapa pers mahasiswa seperti Arena (1959 di Bandung), Pembina (1960-Sospol Unpad), Harian Berita-Berita ITB (1960-ITB), dan Gelora Teknologi (1964-ITB) (Mondry, 2008, h. 34). Pada saat itu, informasi yang ada di media massa tidak boleh bertentangan dengan pemerintah. Media massa yang memiliki oplah besar adalah media massa yang dikelola oleh partai politik, dalam artian partai politik yang mendukung pemerintah. Feith dalam Smith (1986, h.118-119) mengatakan bahwa perpecahan politik yang terjadi menjelang demokrasi terpimpin juga berpengaruh terhadap pers di Indonesia karena pada saat itu surat kabar pada umumnya menjadi organ partai,

---

<sup>4</sup> Pasal-pasal karet '*Hatzaai Artikelen*' dalam hukum pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pers dan *Persbreidel Ordonnantie* buatan Belanda masih tetap berlaku sebelum Undang-Undang No. 23 tahun 1954 dikeluarkan.

sehingga surat kabar yang keuangannya kuat dapat bertahan menjadi oposisi pemerintah.

Ketatnya kontrol pemerintah pada saat itu dapat terlihat dari diberlakukannya SIT (Surat Izin Terbit), dimana dalam formulir pendaftaran SIT tersebut terdapat 19 pasal yang berisi perjanjian untuk mendukung Manipol/Usdek pemerintah (Effendy, 2003, h. 108). Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Smith (1986, h. 231)

“Motivasi pemerintah dalam tindakan-tindakannya yang menekan pers tampaknya berubah selama periode yang tercakup dalam penelaahan ini. Pada masa awal sesudah pengalihan kedaulatan, pemerintah mencoba membantu pers. Sesudah kritik-kritik terhadap pemerintah semakin tajam dan tanpa *tedeng aling-aling*, pemerintah cenderung memukul balik untuk mempertahankan diri sebagai pembalasan. Ketika Sukarno tampil untuk menguasai percaturan, tindakan-tindakan antipers lebih mengandung maksud untuk mengontrol pers untuk mengeksploitasi falsafah politiknya; surat-surat kabar yang menolak tunduk kepada keinginan Sukarno disingkirkan”

Beberapa media massa yang dibubarkan pada saat itu adalah Abadi (Masyumi), Pedoman (PSI), Nusantara, Keng Po, dan Pos Indonesia karena media massa tersebut tidak bersedia menandatangani formulir pendaftaran SIT (Effendy, 2003, h. 109). Sebagai organisasi nasional yang tidak memihak golongan tertentu ataupun partai politik, IPMI tidak mencantumkan Manipol/Usdek dalam AD/ARTnya. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa sebagai pembawa suara mahasiswa, IPMI tidak berpihak kepada golongan tertentu, namun IPMI sempat dituduh sebagai anak buah Masyumi dan PSI pada akhir demokrasi terpimpin (Arismunandar, 2012).

### 2.3.6 Pers Mahasiswa pada Era Orde Baru

Banyak organisasi pers mahasiswa yang lahir dan menyatakan diri sebagai anggota IPMI pada saat awal Orde Baru. Beberapa organisasi tersebut adalah Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, Mimbar Demokrasi, Mahasiswa Indonesia (Edisi Jawa Barat), Mahasiswa Indonesia (Edisi Jawa Tengah), Muhibbah (UII), dan Gelora Mahasiswa Indonesia (Arismunandar, 2012). Munculnya berbagai pers mahasiswa disebabkan perubahan sistem sosial politik sehingga, pemerintah memberikan kebebasan pers pada awal Orde Baru. Seperti pendapat John C. Merrill dan Ralph L. Lowenstein (Nurudin, 2010, h. 21) bahwa media massa pada umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku, sementara sistem pers tunduk pada sistem politik yang ada. Kebebasan pers dapat terlihat pada saat IPMI diakui sejajar dengan organisasi pers lainnya oleh Departemen Penerangan. Bahkan IPMI sebagai organisasi pers mahasiswa melibatkan diri dalam politik dengan menjadi Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) (Arismunandar, 2005, h. 88).

Pergerakan pers mahasiswa terjadi pada tahun 1971 ditandai dengan dikeluarkannya peraturan *back to campus* oleh pemerintah. Akibatnya, harian KAMI, penerbitan IPMI yang berada di luar kampus memilih mundur dan menyatakan diri sebagai pers umum. Tindakan yang dilakukan pemerintah pada saat itu disebabkan oleh kekritisan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru. Contohnya pada saat koran Mahasiswa Indonesia, koran yang dikelola oleh mahasiswa ITB

memuat pemberitaan-pemberitaan tentang korupsi di kalangan jenderal yang dekat dengan Presiden Soeharto seperti Ibnu Sutowo (Direktur Pertamina), Jenderal Alamsyah (Aspri), Soedjono Hoemardani, dan Achmad Tirtosudiro (Direktur Bulog) (Budiyarso, 2000, h. 32).

Tahun 1971-1974 merupakan tahun kemunduran bagi pers mahasiswa. Gerakan-gerakan mahasiswa kembali terjadi dan berujung pada Peristiwa Malari<sup>5</sup> (Malapetaka Lima Belas Januari). Pemerintah melakukan pembredelan terhadap sejumlah pers mahasiswa yang dianggap menjadi penyebab gerakan protes mahasiswa pada saat itu seperti Harian Nusantara, Mingguan Mahasiswa Indonesia, dan Harian KAMI (Budiyarso, 2000, h. 50). Pers mahasiswa yang sesuai dengan struktur konsolidasi pemerintah dibiarkan berkembang dan diberi subsidi oleh pemerintah sebesar 50% dari universitas untuk biaya penerbitan seperti Salemba (UI), Gelora Mahasiswa (UGM), Atmajaya (Unika Atmajaya), Derap mahasiswa (IKIP Yogyakarta), Arena (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Arismunandar, 2012).

Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa terus terjadi sampai tahun 1978. Pers mahasiswa pada saat itu dijadikan sebagai alat untuk mendukung demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa menyangkut keberpihakan ABRI terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat terlihat saat tabloid Kampus (ITB) memberitakan tentang perjuangan Jendral Soedirman yang dibandingkan dengan petinggi

---

<sup>5</sup> Peristiwa Malari disebabkan oleh protes mahasiswa Indonesia terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang menyengsarakan rakyat, korupsi di kalangan birokrat merajalela, investasi asing, yang berpuncak pada demonstrasi menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka pada 15 Januari 1974.

ABRI yang tersangkut kasus korupsi (Budiyarso, 2000, h. 167).

Berkat pemberitaannya yang kritis dan berani<sup>6</sup>, pers mahasiswa seperti Salemba, Kampus, dan Gelora Mahasiswa menggantikan kekosongan pers umum dan dapat terbit pada pasar umum saat itu dengan teras mencapai puluhan ribu eksemplar (Arismunandar, 2012).

Pemerintah kembali melakukan tindakan represif terhadap aktivitas kemahasiswaan dengan membubarkan atau membredel pers mahasiswa seperti Salemba, Kampus, dan Gelora Mahasiswa Indonesia.

Budiyarso (2000, h. 234) mengatakan bahwa usaha untuk meredam aktivitas mahasiswa yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembredelan, pembubaran organisasi dewan mahasiswa dan memenjarakan pimpinan mahasiswa dinilai tidak cukup. Hal tersebut dapat terlihat dari dikeluarkannya kebijakan NKK/BKK. Secara umum kehidupan mahasiswa yang masih berjalan setelah NKK/BKK pada saat itu bersifat akademis<sup>7</sup> dan rekreatif. Fadhly (1999, h. 48) mengatakan bahwa pada awal 1980-an memang merupakan masa sulit bagi gerakan mahasiswa. Pers mahasiswa tentu mengalami dampaknya terlihat dari dibubarkannya IPMI oleh Abdul Gafur (Menteri Pemuda dan Olahraga) karena tidak mau bergabung dengan KNIP pada tahun 1982.

---

<sup>6</sup> Pada saat itu pers mahasiswa UI Salemba menulis berita dengan judul 'Mahasiswa Menginginkan Soeharto Tidak Jadi Presiden Lagi', sedangkan pers mahasiswa ITB (Kampus) menulis Aksi Mahasiswa Bandung Mengugat 27 Desember 1977, Gelombang Pertama Menolak Dukungan Terhadap Pencalonan Soeharto.

<sup>7</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Fuad Hasan (Guru Besar Fakultas Psikologi UI & Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) terhadap keadaan dunia kemahasiswaan di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, diketahui bahwa 99,5% Mahasiswa pada saat itu hanya *study oriented*. Jumlah tersebut hampir seluruhnya cuek, apatis, dan acuh tak acuh terhadap NKK/BKK.

Setelah IPMI dibubarkan, kehidupan pers mahasiswa tidak begitu berkembang, malah bisa dikatakan mengalami penurunan dari sebelumnya. Eksistensi pers mahasiswa pada saat itu lebih mengarah kepada penerbitan kampus<sup>8</sup> karena pihak rektorat ikut mengontrol isi pemberitaannya (Purnomo, 2008). Namun pada tahun 1985-1990 banyak pers mahasiswa lahir seperti Balairung (UGM), Surat Kabar Kampus Warta UI, Solidaritas (Universitas Nasional), Sketsa (Universitas Jenderal Soedirman), Pendapa (Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa), Akademika (Universitas Udayana) (Susantoro, 2007).

Aktivitas pers mahasiswa yang berkembang pada saat itu berupa pelatihan jurnalistik dan forum diskusi yang diadakan di berbagai perguruan tinggi dalam upaya membangun kembali sebuah wadah bagi pers mahasiswa. Aktivitas-aktivitas tersebut berujung pada lahirnya wadah baru bagi pers mahasiswa di Indonesia dengan nama Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang lahir pada Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia di Kota Malang (Susantoro, 2007). Terbentuknya PPMI memiliki catatan sejarah tersendiri bagi perkembangan pers mahasiswa di Indonesia pada era 90an karena PPMI sebagai wadah bagi pers mahasiswa setelah IPMI bubar pada tahun 1982.

---

<sup>8</sup> Penerbitan kampus merupakan pers mahasiswa yang dikelola bersama oleh dosen, karyawan dan mahasiswa. Beberapa pers kampus saat itu adalah Universitas USU, Warta UI, Manunggal Undip, Gema Almamater Unpad, Mimbar Unibraw, Identitas Universitas Ujung Pandang (sebelum menjadi Unhas) dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi.

Rezim Orde Baru memang bersikap represif terhadap pers mahasiswa. Setelah dikeluarkannya NKK/BKK pada tahun 1978 pemerintah kembali mengontrol aktivitas pers mahasiswa dengan mengeluarkan Permenpen RI No.1/Per/Menpen/1975 yang menggolongkan pers mahasiswa sebagai penerbitan khusus yang bersifat non-pers dan Surat Edaran Dikti No. 849/D/T/1989 tentang penerbitan kampus di perguruan tinggi (Arismunandar, 2012). Berbagai tekanan<sup>9</sup> dan pembredelan tetap terjadi pada pers mahasiswa di tahun 1990an seperti Vokal IKIP PGRI Semarang, Dialogue FISIP UNAIR, Arena IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Focus Equilibrium FE Udayana Bali (Litbang Nasional PPMI, 2010, h. 61). Vokal ditarik dari peredaran dan dilarang terbit oleh Rektor dan Yayasan IKIP PGRI karena pemberitaannya dianggap berbau politik dengan membahas Golput<sup>10</sup> (Magriby, 2011).

Tabloid Dialogue terbitan Senat Mahasiswa FISIP Unair Surabaya dibredel<sup>11</sup>. Emil Syarif Lahdji sebagai penanggung jawab sempat diproses di Polwiltabes Surabaya. Menurut Polwiltabes Surabaya Dialogue termasuk dalam ‘selebaran gelap’, terbit perdana di pagi hari berujung pada penangkapan Emil saat malam hari. Ketua Senat FISIP

<sup>9</sup> Amir Husin Daulay (Pemimpi Umum LPM Solidaritas FISIP Unas Jakarta) dipanggil oleh Laksuda Jaya dan dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk tidak menerbitkan koran Solidaritas lagi. Pada kepengurusan Ade Fachrul 1988, FISIP Unas menerbitkan majalah Mimbar Mahasiswa dengan visi yang tidak jauh berbeda dengan Solidaritas namun Amin kembali dipanggil oleh Laksuda Jaya dan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan dihentikan termasuk melakukan penyegelan di kantor LPM Unas.

<sup>10</sup> Yayasan IKIP PGRI mendapat teror akibat pemberitaan Vokal yang mengangkat Golput. Ketua Yayasan IKIP PGRI saat itu juga menjabat sebagai DPRD I Jawa Tengah dan pada Pemilu 1992 sebagai Calon Legislatif DPR RI mengancam mengudurkan diri

<sup>11</sup> Pembredelan dikarenakan pihak dekanat mempersoalkan izin terbitnya tabloid dari Senat tanpa diketahui pihak rektorat. Meskipun pada kenyataannya pihak dekanat telah mengetahui sebelumnya karena Senat telah mengajukan permohonan.

Unair diskorsing melalui SK. Rektor No. 649/PT.03.H./I/1993 (Litbang Nasional PPMI, 2010, h. 88). Selain dari Senat dan BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) FISIP Unair, berbagai aksi solidaritas untuk Dialogue berdatangan seperti PPMY (Yogyakarta) mengirim surat protes pada Mendikbud Fuad Hasan, PMII, Kelompok Studi Cakrawala Timur, Kelompok Studi Gerbang, Kelompok Mahasiswa Studi Pembangunan, Komite Pembelaan Mahasiswa Surabaya, dan Forum Mahasiswa Surabaya yang mengancam akan menggelar aksi solidaritas lebih besar.

Arena IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dibredel karena mengangkat berita utama '*Bisnis Kekuasaan*' sebagai laporan utamanya. Rektor mengeluarkan SK<sup>12</sup> pembredelan dengan alasan Arena tidak memiliki STT pada saat itu, padahal Arena sudah memiliki SIT sejak 1966. Alasan kedua karena Arena tidak mencerminkan penerbitan khusus namun lebih cenderung pada pers umum (Magriby, 2011)

### 2.3.7 Pers Mahasiswa menjelang Reformasi

Bhakti (2000, h. 61) menjelaskan berbagai faktor mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 seperti terjadinya krisis politik dan ekonomi yang semakin parah<sup>13</sup>, desakan-desakan dari bawah yang tampak dengan semakin besarnya gelombang demonstrasi mahasiswa,

<sup>12</sup> SK Rektor No. IN/I/R/PP.003/93 tertanggal 18 Mei 1993. Padahal sebelumnya pada tanggal 27 April 1993 telah dilayangkan surat No. IN/I/HM. 00/1341/93 yang intinya berisi untuk merevisi berita laporan "*Bisnis Keluarga Presiden*," tulisan Ali Sadikin, dan wawancara dengan Adnan Buyung Nasution.

<sup>13</sup> Sejarah perekonomian Indonesia setidaknya mencatat 3 krisis ekonomi sebelum 1997-1998. Krisis ekonomi pertama terjadi pada tahun 1966, krisis Pertamina tahun 1975, dan krisis jatuhnya harga minyak di paruh 1980-an. Tetapi dari semua krisis yang terjadi, krisis yang terparah penanganannya adalah krisis tahun 1997-1998

adanya pembelototan sebagian elite politik anggota rezim, dan semakin memudarnya legitimasi politik rezim Orde baru. Dengan keadaan seperti itu, kehidupan pers turut mengalami perubahan karena dengan melemahnya posisi politik pemerintah, probabilitas tekanan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan menjadi relatif lebih besar sehingga pers mendapatkan keuntungan untuk menyampaikan informasi secara lebih terbuka, meskipun masih dalam kerangka sensor pemerintah. Basri dan Iswara (2000, h. 42) mengatakan bahwa pemberitaan saat itu tetap mengacu kepada pernyataan resmi pemerintah seperti pada saat Menpen Hartono yang dikenal dekat dan sangat loyal dengan keluarga Cendana membuat media harus pandai-pandai mengangkat topik yang bersinggungan langsung dengan keluarga Soeharto.

Rachman (2000, h. 102) mengatakan bahwa diturunkannya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan Prof. Dr. B.J. Habibie pada tanggal 20 Oktober 1999 tidak lepas dari perjuangan gerakan mahasiswa sebagai pelopor gerakan pro-demokrasi dan pro-reformasi. Dalam mengkomunikasikan gagasan dan organisasinya, gerakan mahasiswa memanfaatkan kelompok diskusi dan pers mahasiswa dalam melakukan gerilya politik. Pers mahasiswa dijadikan sebagai alat dalam menyebarkan agenda gerakan mahasiswa kepada masyarakat. Pada periode 1998 hingga kejatuhan Soeharto pers mahasiswa yang paling terkenal saat itu seperti majalah *Bergerak!* (Universitas Indonesia), Ganesha dan Boulevard (ITB), Didaktika (IKIP Jakarta), Balirung (UGM), dan Isola (IKIP Bandung) (Rachman, 2000, h. 122).

Arismunandar (2012) mengatakan bahwa peran yang dilakukan oleh *Bergerak!* berupa penyebaran informasi tentang aksi mahasiswa, baik yang sudah dilakukan ataupun akan dilakukan. Selain itu *Bergerak!*

menggalang opini-opini di kalangan mahasiswa dan aktivis pergerakan dan menuliskannya dalam bentuk berita. Ketika sedang memuncaknya aksi-aksi mahasiswa, hampir setiap edisi *Bergerak!* selalu dicari dan dibeli oleh mahasiswa. Bahkan, ada pengakuan dari berbagai pers lokal maupun internasional tentang peran buletin *Bergerak!*. Bentuk nyatanya adalah menjadikan artikel dan berita *Bergerak!* sebagai kutipan atau rujukan. Selain itu majalah TIME (media internasional) mengakui eksistensi *Bergerak!* dengan gaya pemberitaan yang berani, kritis dalam menyampaikan kritik sosial dibandingkan pers umum pada masa tersebut.

#### 2.4 Pers Mahasiswa sebagai Pers Alternatif

Keberadaan pers mahasiswa sering disebut sebagai pers alternatif.

Sebagai pers alternatif, pers mahasiswa memiliki ciri-ciri yang khas dengan pemberitaannya yang kritis dan berani. Hal tersebut disebabkan karena secara realitas mahasiswa merupakan pemuda yang telah terbiasa berfikir bebas untuk menyatakan pikirannya dan kritis karena terdidik dalam dunia perguruan tinggi (Siregar, 1983, h. 106). Lebih lanjut, Thoriq (dalam Utomo, 2013, h. 10) mengatakan bahwa pers mahasiswa memiliki tugas untuk membangkitkan kesadaran kritis dan memunculkan keberanian untuk bersikap kritis karena aktivis-aktivis pers mahasiswa memiliki andil yang tinggi dalam meningkatkan eskalasi kritisisme mahasiswa. Spirit Mahasiswa<sup>14</sup> (2014) juga memaparkan bahwa sebagai pers alternatif, pers

<sup>14</sup> Merupakan situs atau website dari Lembaga Pers Mahasiswa Spirit Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.

mahasiswa harus memperhatikan pemilihan angle berita yang berbeda dengan pers umum walaupun tema yang diangkat sama, hal tersebut yang membedakannya dengan pers umum.

Pers mahasiswa sebagai pers alternatif dapat terlihat saat zaman Orde Baru. Pada saat itu pemberitaan yang ada pada pers mahasiswa lebih kritis dari pada pers umum. Ciri-ciri tersebut sesuai dengan *adversary journalism* (jurnalisme penantang). Dhakidae (1977) menjelaskan bahwa *adversary journalism* merupakan penerapan sebuah ideologi yang dimiliki pers mahasiswa dan ditonjolkan lewat pemberitaannya sehingga tulisan yang diterbitkan cenderung mengkritisi segala hal yang salah. Berkat pemberitaannya yang kritis, pers mahasiswa mampu bersaing dengan pers umum dan memiliki tiras puluhan ribu eksemplar seperti Salemba, Kampus, dan Gelora Mahasiswa (Arismunandar, 2012).

Menjelang reformasi, konsep pers alternatif dapat dilihat dari majalah *Bergerak!*. Pemberitaan yang ada pada saat itu berani, lugas, tidak ditutup-tutupi, dan sesuai fakta seperti mengutip ucapan orang yang berpidato ketika aksi bahwa “kita harus turunkan Soeharto” dimuat apa adanya. Redaksi *Bergerak!* Pernah ditelpon aparat Bakin (Badan Koordinasi Intelejen Negara) karena pemberitaannya yang terlalu berani, bahkan pers umum tidak berani memuat pemberitaan seperti itu. (Arismunandar, 2005, h.137).

Saat itu, keterbukaan informasi publik belum memiliki ruang yang cukup di tengah masyarakat, akses informasi dipersempit dan beberapa perusahaan pers menghentikan penerbitannya karena mengalami pembredelan. Hal inilah yang membuat masyarakat tak dapat mengakses informasi dengan leluasa saat

pemerintahan Soeharto. Disinilah pers mahasiswa kemudian mengambil posisi sebagai pers alternatif dengan memberikan informasi tak hanya kepada mahasiswa yang ada di kampus, namun masyarakat pun turut mengkonsumsikan terbitan pers mahasiswa ini.

Peran pers mahasiswa sebagai pers alternatif dapat terlihat dari aturan dan perundang-undangan<sup>15</sup> yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan aktivitas kemahasiswaan seperti saat Departemen Penerangan mengeluarkan surat edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 05/SE/Ditjen PPG/1991 yang mengatur semua penerbitan khusus dengan STT (Abrar, 1992, h.80).

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, tujuan, isi, pengelola, peredaran, bahkan pemuatan iklan diatur secara jelas. Hal tersebut dilakukan karena pers mahasiswa ditakuti oleh pemerintah. Contoh lain adalah pada saat majalah Paradigma didatangi sebuah tim beranggotakan 12 pejabat pemerintahan yang terdiri dari perwakilan Korem, Kejaksaan, Direktorat Sosial dan Politik, Kementrian dalam Negeri dan Kementrian Penerangan pada 25 September 1997 (Hari, 2011). Kedatangan mereka untuk meminta arsip dari tiga terbitan terakhir majalah Paradigma untuk memeriksa apakah ada yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pada saat itu.

- 
- <sup>15</sup> a) PP Menpen RI No.1 /Per/Menpen/1975 tentang ketentuan mengenai penerbitan khusus  
 b) SK Menpen No. 146/Kep/Menpen/1975 tentang ketentuan, persyaratan & prosedur penerbitan khusus  
 c) SK Mendikbud No. 1256/U/1978 tentang ditetapkannya NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus)  
 d) SK Mendikbud No. 037/U/1978 tentang bentuk susunan Lembaga Organisasi Mahasiswa di lingkungan kampus, yang selanjutnya disebut sebagai BKK (Badan Koordinasi Kemahasiswaan)  
 e) SK Mendikbud No. 0156/U/1978 tertanggal 19 April 1978 tentang konsep NKK. SK ini membebani mahasiswa dengan SKS sehingga penerapan jadwal kuliah semakin padat dan minat untuk mengikuti organisasi berkurang.  
 f) SK Dirjen Dikti No. 849/D/T/1989 tentang penerbitan khusus

Setelah reformasi, kondisi sosial politik ikut berpengaruh terhadap kehidupan pers mahasiswa di Indonesia. Kehidupan pers di Indonesia berubah setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membubarkan<sup>16</sup> Departemen Penerangan dalam jajaran Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpinnya pada tahun 1999. (Arismunandar, 2000, h. 205). Setelah Departemen Penerangan dibubarkan, kehidupan pers di Indonesia khususnya media cetak terbebas dari ancaman pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP) yang biasa mereka terima pada rezim Orde Baru Soeharto. Pers mahasiswa juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi saat itu. Jika dalam sistem otoritarian yang ditandai dengan pembungkaman pers umum, pers mahasiswa menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat, namun dalam sistem demokrasi, pers mahasiswa sulit untuk bersaing dengan pers umum. Hal tersebut disebabkan karena pers umum mendapatkan jaminan kebebasan pers sehingga lebih berani dalam hal pemberitaannya.

## 2.5 Teori Pers

Setiap negara memiliki sistem pers yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan dalam tujuan, fungsi, dan latar belakang sosial politik yang menyertainya, oleh karena itu pers dipengaruhi oleh falsafah dan sistem pemerintahan dimana ia berada. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Siebert, Peterson, dan Schramm (dalam Ardianto, Komala, dan Karlinah, 2009, h. 159) yang mengatakan bahwa pers yang ada dalam suatu negara mencerminkan keadaan sistem sosial yang terdiri dari hubungan antarindividu

<sup>16</sup> Langkah tersebut merupakan suatu keputusan yang berani dan bisa menjadi pemicu masalah politik baru bagi pemerintahan Gus Dur saat itu karena Departemen Penerangan memiliki lebih dari 50.000 karyawan.

dengan lembaga-lembaga yang ada. Dari gagasan tersebut lahir teori pers pada tahun 1956 dan dikenal dengan *Four Theories of the Press* meliputi *authoritarian theory* (sistem pers otoriter), *libertarian theory* (sistem pers liberal), *soviet communist theory* (sistem pers komunis soviet), dan *social responsibility theory* (sistem pers tanggung jawab sosial) (Effendy, 2003, h. 266).

1. *Authoritarian theory* (sistem pers otoriter).

Teori atau sistem pers otoriter berasumsi bahwa media massa harus menjalankan tugasnya dengan tujuan mendukung dan mengembangkan kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pers harus tunduk kepada pemerintah yang berkuasa dan mengabdikan kepada negara. Pemerintah menguasai sekaligus sebagai pengawas media, oleh karena itu segala sesuatu yang akan diberitakan dikontrol oleh pemerintah karena kekuasaan. Mondry (2008, h. 60) mengatakan bahwa dalam negara yang bersifat otoriter, kewenangan untuk menyampaikan sesuatu hanya berpola *top down*, artinya hanya negara yang berhak bersuara dan pers hanya menjadi sarana informasi dari penguasa kepada rakyat. Prinsip dari sistem pers otoriter adalah negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada individu dalam skala nilai kehidupan sosial. Bagi individu hanya menempatkan diri di bawah kekuasaan negara dan pers harus mendukungnya.

Meskipun pada masa pemerintahan Soekarno Indonesia menerapkan sistem pers tanggungjawab sosial, namun pada kenyataannya yang dijalankan adalah sistem pers otoriter terselubung.

Hal tersebut dapat dilihat sejak Era Demokrasi Liberal, dimana pada saat itu diterapkan Surat Izin Terbit (SIT) yang sangat berpengaruh terhadap kebebasan pers. Tidak hanya SIT, pembredelan dan pemberangusan juga terjadi dan dilakukan terhadap penerbitan yang tidak mendukung pemerintah, termasuk pers mahasiswa. Oleh karena itu berita tidak lagi bersifat menarik saja, namun harus memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah.

## 2. *Libertaian theory* (sistem pers liberal)

Sistem pers liberal berasumsi bahwa manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia bisa mengembangkan pikirannya secara bijak jika diberi kebebasan. Kebebasan dipandang sebagai hal yang utama dalam teori ini, sedangkan kontrol pemerintah dipandang sebagai penghambat kebebasan berpikir. Effendy (2003, h. 269) menjelaskan bahwa teori liberal menitikberatkan superioritasnya pada kebebasan perorangan, penilaian dan aksioma bahwa kebenaran, jika diberi kebebasan, akan muncul sebagai pemenang dalam suatu perjuangan.

Berbeda dengan sistem pers otoriter, dalam sistem pers liberal perslah yang mengawasi pemerintah dan pers yang berusaha mencari kebenaran tersebut. Dengan sistem pers liberal, Peterson berpendapat bahwa pers harus melayani sistem politik dengan cara menyediakan informasi bagi masyarakat, memberikan pengarahan kepada masyarakat agar bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, mengawasi pemerintah dengan cara menjaga hak-hak perorangan,

melayani sistem ekonomi dengan dengan media periklanan, menyediakan hiburan, dan mencari pendanaan secara mandiri agar terbebas dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu (Mondry, 2008, h. 62-63). Dengan teori ini, semua orang berhak memiliki media massa, asalkan memiliki kemampuan, sehingga kepemilikan media bisa perorangan atau kelompok.

### 3. *Soviet communist theory* (sistem pers komunis soviet)

Dalam sistem pers komunis soviet, media massa digunakan untuk kepentingan pemerintah atau partai yang merupakan bagian intergal dalam negara. Dengan demikian segala sesuatu ditentukan oleh negara (partai). Bagi Lenin (penguasa Uni Soviet pada saat itu), pers harus melayani kepentingan kelas dominan dalam masyarakat, yaitu proletar. Pers harus menjadi *collective propagandist, collective agitator, collective organizer*. Fungsi pers adalah indoktrinasi massa, pendidikan atau bimbingan massa yang dilancarkan partai (Nurudin, 2010, h. 74).

Perbedaan sistem pers ini dengan sistem pers lain, jika dalam teori pers penguasa orientasinya semata-mata untuk mempertahankan “status-quo”, dalam sistem pers komunis soviet orientasinya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat (untuk mencapai tahap kehidupan yang komunis). Isi surat kabar Soviet juga berbeda dengan media di negara lain karena pada media massa tersebut tidak memuat iklan. Sebagian besar atau mungkin satu-satunya, bahan berita media massa di Uni Soviet adalah proses yang dinamakan pembangunan

sosialis, berupa usaha umum untuk membangun masyarakat Soviet, bahkan sebagian besar isi surat kabar tersebut bukan berita, melainkan materi pelayanan terhadap partai (Mondry, 2008, h. 67).

4. *Social responsibility theory* (sistem pers tanggung jawab sosial).

Sistem pers tanggung jawab sosial muncul karena adanya protes terhadap kebebasan mutlak dari sistem pers libertarian. Menurut Peterson, “kebebasan pers harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern selama ini” (Nurudin, 2010, h. 74).

Sistem pers tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat dan menjaga hak perorangan, namun teori ini menyatakan selama ini pers tidak menjalankan fungsi tersebut secara sempurna. Teori ini juga menerima peran pers dalam menyajikan hiburan, namun dengan syarat harus bermanfaat (Mondry, 2008, h. 64). Indonesia menerapkan sistem pers tanggung jawab sosial setelah reformasi. Namun fenomena yang terjadi untuk saat ini pers tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Media massa (terutama televisi) berlomba-lomba menyajikan program acara yang hanya bersifat menghibur tanpa memikirkan manfaat dan pendidikan yang semestinya dijalankan oleh pers.

## 2.6 Faktor yang mempengaruhi isi media

Sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam bidang jurnalistik, UAPKM memiliki beberapa media seperti buletin, majalah, manuskrip tembok, jurnal ospek hingga website. Teori *the influence of mass media content* berasumsi bahwa isi suatu berita dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi kebijakan redaksi dalam media massa. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Resse (1996, h. 64) mengemukakan 5 faktor yang dapat mempengaruhi isi media yaitu:

### 1. Individual Level (Faktor individual pekerja media)

Dalam sebuah organisasi tentu setiap individu atau pekerja media massa memiliki pengalaman dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai latar belakang masing-masing individu. Perbedaan tersebut tentu memiliki pengaruh terhadap berita yang diproduksi oleh masing-masing individu. Faktor yang mempengaruhi pekerja meliputi karakteristik personal, latar belakang sosial dan tingkat profesionalisme setiap pekerja. Berbagai faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap pekerja yang ada dalam organisasi tersebut dalam melakukan tugas jurnalistik.

### 2. Media Routines Level (Rutinitas media)

Perbedaan kepentingan antarmedia massa berpengaruh kepada rutinitas media massa. Dengan kata lain, rutinitas media massa dapat dibentuk oleh prosedur dan kepentingan yang dimiliki setiap media massa. Rutinitas media massa berhubungan dengan tuntutan teknis seperti jadwal terbit atau jadwal tayang, (keterbatasan tempat atau

space) dan halaman terbatas, tuntutan faktualitas informasi yang disajikan menyangkut kebutuhan konsumen atau segmen pasar, dan tuntutan kepentingan organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

Ketiga aspek ini berkaitan dengan prosedur operasional, yaitu apa informasi yang akan disampaikan kepada khalayak, bagaimana proses pengolahannya, dan siapa yang menyediakan informasi.

### 3. Organization Level (Level organisasi)

Media massa sebagai lembaga sosial tentu memiliki bagian-bagian dalam organisasi tersebut yang saling berkaitan satu sama lain.

*Organization level* berhubungan dengan struktur organisasi, dimana setiap bagian dalam organisasi tersebut seperti keredaksian, pemasaran, administrasi dan keuangan memiliki kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi isi berita. Semua bagian ini juga terikat dengan kebijakan dan tujuan organisasi yang biasanya ditetapkan oleh pemilik modal.

### 4. Extra Media Level (Faktor ekstramedia)

Berhubungan dengan lingkungan di luar organisasi media, yakni sumber informasi media seperti kelompok kepentingan yang ingin menginformasikan isu-isu tertentu, *Public Relation*, kantor berita, pemasang iklan, audien dan institusi sosial seperti pemerintah, perusahaan dan pemilik modal.

### 5. Ideological Level (Level ideologi)

Ideologi yang digunakan dalam suatu media massa berasal dari kelompok dominan yang memiliki kepentingan dan kekuasaan untuk

diterapkan ke dalam media massa tersebut. Ideologi yang diterapkan dalam suatu media massa akan berpengaruh terhadap para pekerja dalam suatu media massa sehingga, pekerja tersebut juga memiliki konsep berpikir yang sama seperti ideologi media massa. Dengan kesamaan ideologi tersebut dapat berpengaruh terhadap produksi berita.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi yang dapat membantu proses penelitian ini. Penelitian terdahulu yang penulis pilih dipilih berdasarkan kesamaan Objek Penelitian dan Metode sehingga diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti dapat menggunakannya sebagai referensi. Penelitian pertama berasal dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Syahrial, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2009 dengan judul “Peran Politik Pers Mahasiswa Tahun 1998-2008 (Studi Pada Lembaga Pers Mahasiswa di Kota Malang)”. Penelitian kedua dilakukan oleh Mohamad Fahmi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Malang yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul “Aktivitas Pers Mahasiswa Kota Malang tahun 1992-2002”.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu Tentang Pers Mahasiswa di Kota Malang

	<b>Penelitian I</b>	<b>Penelitian II</b>
<b>Nama</b>	Fahmi Syahrial	Mohamad Fahmi
<b>Tahun</b>	2009	2011
<b>Judul</b>	Peran Politik Pers Mahasiswa Tahun 1998-2008 (Studi Pada Lembaga Pers Mahasiswa Di Kota Malang)	Aktivitas Pers Mahasiswa Kota Malang tahun 1992-2002
<b>Rumusan Masalah</b>	Bagaimana peran Pers Mahasiswa yang ada di kota Malang Sepanjang Tahun 1998-2008 Dalam Aspek Politiknya?	1. Bagaimana latar belakang proses berkembangnya pers mahasiswa di Kota Malang pada tahun 1992-2002? 2. Bagaimana aktivitas pers mahasiswa di Kota Malang pada tahun 1992-2002?
<b>Jenis Penelitian</b>	Kualitatif	Kualitatif
<b>Subjek Penelitian</b>	Lembaga Pers Mahasiswa di Kota Malang (LPM Civitas, LPM Inovasi, LPM Indikator, dan UKMP SIAR)	Kavling 10, Indikator, Dianns, Solid, Manifest, Siar, Inovasi, Mei dan Civitas
<b>Metode Penelitian</b>		Historical Research
<b>Analisis Data</b>	Analisis Kualitatif (Pemeriksaan Data, Mengolah Data, Analisa dan Interpretasi Data)	Analisis sejarah

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrial bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pers mahasiswa dalam bidang politik serta menganalisa arah pergerakan politik pers mahasiswa sepanjang tahun 1998-2008 di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan karena perubahan kondisi sosial politik pada era Orde Baru dan Reformasi, dimana pada era Orde Baru pers mahasiswa berperan sebagai pers alternatif dan pernah menggantikan pers umum saat kebebasan pers mendapat tekanan dari pemerintah. Oleh karena itu, Syahrial memberikan batasan dalam penelitiannya, yaitu dari

tahun 1998-2008. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dan ketidakstabilan pada pers mahasiswa di Kota Malang dalam mengangkat isu di bidang politik setelah reformasi. Kondisi obyektif politik yang berlaku di Indonesia setelah reformasi berpengaruh terhadap hidup matinya pers mahasiswa.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai penggunaan empat teori pers sebagai bahan kajian penelitian. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam menyusun dan menggambarkan kondisi pers mahasiswa di Kota Malang. Posisi penelitian ini sama-sama berada pada ranah komunikasi massa dengan kesamaan dalam subyek penelitian yaitu pers mahasiswa. Namun penelitian yang akan dilakukan ini memiliki fokus penelitian yang berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh Syahril berfokus pada peran politik pada pers mahasiswa pasca reformasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fahmi dilakukan karena kesadaran peneliti akan kurangnya literatur dan informasi tentang aktivitas Pers Mahasiswa sehingga banyak penggiat pers mahasiswa saat ini yang tidak tahu tentang peristiwa bersejarah di masa lampau. Menurutnya aktivitas pers mahasiswa di Kota Malang memiliki keunikan tersendiri, terutama pada tahun 1992-2000 yang dinilai terdapat beberapa peristiwa bersejarah. Hal tersebut yang seharusnya disampaikan oleh penggiat pers mahasiswa senior ke juniornya. Dengan latar belakang tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi bertujuan untuk mendeskripsikan proses

berkembangnya pers mahasiswa dan mendeskripsikan aktivitas pers mahasiswa di kota Malang sejak tahun 1992-2002.

Perkembangan pers mahasiswa di Kota Malang pada awal tahun 1990an menurut Fahmi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari keberadaan pers mahasiswa di beberapa<sup>17</sup> PTN (perguruan tinggi negeri) dan PTS (perguruan tinggi swasta). Aktivitas pers mahasiswa yang terjadi di Kota Malang pada tahun 1990an dikatakan sebagai fase pembangkitan karena dibentuknya wadah pers mahasiswa dalam lingkup kota seperti FKPM (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Malang) dan dideklarasikannya PPMI (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia). Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fahmi dengan penelitian yang akan dilakukan. Meskipun memiliki tema yang sama, Fahmi memilih 9 pers mahasiswa yang dianggap dapat mewakili Kota Malang sebagai subyek penelitian. 9 pers mahasiswa tersebut adalah Kavling 10, Indikator, Dianns, Solid, Manifest, Siar, UAPKM Inovasi, Mei dan Civitas. Penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya (UAPKM UB) sebagai subyek penelitian, data tentang pers mahasiswa lain hanya digunakan sebagai gambaran umum untuk menjelaskan kondisi pers mahasiswa di masa lampau. Persamaan dengan penelitian terletak pada metode yang digunakan yaitu Historical Research.

<sup>17</sup> Beberapa pers mahasiswa yang disebutkan oleh Mohamad Fahmi adalah Siar HMP (IKIP Malang), UAPKM UB (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya), Indikator (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya) Dianns (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya), Solid (Fakultas Teknik Universitas Brawijaya), Manifest (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Unit Aktivitas Pers Mahasiswa (UAPM) Inovasi di STAIN Malang, MEI (Universitas Islam Malang), Civitas (Universitas Merdeka).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Dalam paradigma interpretif, realitas sosial dilihat sebagai suatu pencapaian yang diciptakan oleh manusia secara sengaja dengan cara berinteraksi. Penelitian sosial dilakukan untuk mengembangkan pemahaman mengenai kehidupan sosial dan menemukan cara orang membentuk makna dalam latar alamiah (Neuman, 2013, h. 116). Sesuai dengan paradigma yang digunakan, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif eksploratif.

Menurut Moleong (2012, h. 6) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara *holistik* (menyeluruh) dalam konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah. Jenis penelitian ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian dimana peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh dan mendalam meliputi penerbitan media, sirkulasi dana dan hubungan dengan penyuplai dana, regenerasi anggota, relasi dengan pihak eksternal, dan kendala organisasi sehingga dari berbagai hal tersebut dapat terlihat dinamika yang dialami Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya (UAPKM UB) dalam mempertahankan eksistensinya.

Perbedaan yang mendasar dalam penelitian kualitatif jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif adalah pada data yang diperoleh. Penelitian kuantitatif mementingkan keluasan data karena hasil riset dianggap sebagai

representasi dari seluruh populasi sedangkan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kriyantono (2006, h. 56) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam pada suatu fenomena, artinya penelitian ini tidak mengutamakan banyaknya (kuantitas) data melainkan mementingkan kedalaman (kualitas) data. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Qualitative Research*, Denzin & Lincoln (1994, h.2) mengatakan bahwa penelitian kualitatif termasuk *multimethod* yang melibatkan pendekatan interpretatif dan pendekatan naturalistik dalam kajiannya mencakup penggunaan subyek yang dikumpulkan dari berbagai data empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual. Artinya, berbagai hal yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti dalam situasi yang alami, lebih mengutamakan perspektif emik. Peneliti mencoba untuk menciptakan keadaan alami yang menyertakan perasaan, menafsirkan fenomena tertentu dalam pemaknaan sudut pandang informan yang diberikan kepada peneliti. Data yang dikumpulkan juga mengutamakan data langsung dalam kondisi asli, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen penelitian.

Jika ditinjau dari tipenya, penelitian ini termasuk penelitian eksploratif.

Penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki

fenomena tertentu secara lebih mendalam, dimana ide (gagasan) yang didapatkan nantinya digunakan untuk menyempurnakan hipotesis dan digunakan dalam penelitian lanjutan (Ardial, 2014, h. 129). Selanjutnya Bungin (2007, h. 72) menyebutkan bahwa penelitian eksploratif bertolak belakang dengan penelitian lainnya karena diawali oleh pengambilan data terlebih dahulu, desain penelitian disusun secara bersamaan atau setelah data diperoleh.

### 3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Historical Research*. *Historical Research* merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk membantu rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan data di masa lampau dan memverifikasikan serta mensintesisasikan bukti-bukti tersebut agar mendapatkan fakta dan kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 2004, h. 73). Metode ini peneliti pilih karena untuk mendapatkan gambaran secara holistik mengenai UAPKM UB juga memerlukan data pada masa lampau. Artinya, untuk mengetahui bagaimana UAPKM UB bisa bertahan sampai saat ini, peneliti harus melihat kejadian – kejadian pada masa lalu sejak UAPKM UB berdiri dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menggambarkan dinamika yang terjadi dan bagaimana eksistensi UAPKM UB selama ini.

Nawawi (2003, h. 78) juga memaparkan bahwa selain untuk menggambarkan kejadian di masa lalu yang terlepas dari keadaan saat ini, *historical research* juga dapat digunakan untuk memahami kejadian atau keadaan pada masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian pada masa

lampau, dengan kata lain data pada masa lalu digunakan sebagai informasi untuk memperjelas kondisi saat ini sebagai rangkaian sebab akibat yang tidak terputus dan saling berhubungan. Selanjutnya Rakhmat (2007, h. 23-24) menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan penelitian historis sebagai berikut:

- 1) Perumusan masalah. Sebelum merumuskan masalah, peneliti harus melewati tahap *immersion* (pendalaman) dan *guided entry* (pengkhususan) yang dapat dilakukan dengan studi kepustakaan yang intensif
- 2) Penelitian Data. Dalam penelitian historis sumber data primer dibagi menjadi dua jenis yaitu *record* dan *relics*. *Record* merupakan data berupa kesaksian yang sengaja dapat berupa dokumen, rekaman lisan maupun visual sedangkan *relics* merupakan rekaman peristiwa yang tidak dimaksudkan untuk merekam peristiwa sejarah seperti catatan neraca keuangan, tradisi masyarakat, artifak. . Selanjutnya melakukan verifikasi untuk mengetahui keaslian dan kredibilitas data dengan melakukan kritik ekstren (mengetahui tingkat keaslian sumber) dan kritik intern (memberikan penilaian keakuratan terhadap sumber data yang digunakan).
- 3) Memilih strategi analitis. Cara menganalisis data sejarah tidak dapat dipisahkan dari perumusan masalah. Bagaimana masalah itu dijawab menentukan strategi analisis.

### 3.3 Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik *snowball sampling* dengan model *Exponential Discriminative Snowball Modle*. Model ini adalah model selektif yang memungkinkan peneliti untuk memilih atau menyeleksi informan selanjutnya, artinya tidak semua informan yang dirujuk oleh informan sebelumnya dipilih oleh peneliti (Bungin, 2007, h. 110). *Key informant* yang penelitian ini ada dua orang. Untuk *key informant* pertama adalah Heyder Affan (Alumni Dianns & UAPKM UB), sedangkan *key informant* selanjutnya adalah Fadrin Fadhlán B. Alasan peneliti menggunakan dua *key informant* karena keterbatasan pada jejaring alumni sehingga masing-masing *key informant* dinilai menguasai dan dapat memberikan informasi mengenai para alumni baik di atas dan di bawah generasi mereka.

Heyder Affan merupakan salah satu penggiat pers mahasiswa di kota Malang pada tahun 1990an yang terlibat langsung dalam pembentukan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) pada tahun 1992. Diawali dengan posisinya sebagai Steering Comitee (SC) Jawa Timur dalam upaya pembentukan PPMI hingga mendirikan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Malang (FKPMM), menjadi alasan peneliti memilih Heyder sebagai *key informant* dan diharapkan dapat memberikan *link* informan mengenai alumni UAPKM pada tahun 1990an.

Fadrin Fadhlán B merupakan Pemimpin Umum UAPKM UB pada tahun 2013-2014. Dalam era kepengurusan Fadrin, UAPKM UB berhasil menerbitkan kembali media cetak seperti Buletin Kavling 10, Majalah Kavling 10, dan Manuskrip tembok Ketawanggede setelah kerjasama antara

UAPKM UB dengan Mimbar terhenti. Peneliti memilih Fadrin karena setelah turun dari kepengurusan, Fadrin merupakan salah DPO (Dewan Penasehat Organisasi) yang paling aktif. Fadrin cukup mengetahui bagaimana kondisi UAPKM UB pada kurun waktu 2008-2014 dan dapat memberikan *link* kepada pengurus UAPKM UB di masa sekarang.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam sebuah penelitian karena, masalah dalam penelitian dapat terjawab jika penumpulan data dirancang dengan baik. Kriyantono (2006, h. 95) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data ditentukan oleh pemilihan metodologi yang dipakai dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan metodologi yang peneliti gunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

#### a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan baik secara langsung atau tidak langsung dengan sumber data (Pujileksono, 2015, h. 123). Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semistruktur karena informan dalam penelitian ini berjumlah banyak, dimana jenis wawancara mendalam tidak memungkinkan untuk peneliti gunakan. Kriyantono (2006, h. 101) juga menyebut wawancara jenis ini dengan istilah wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dapat

mengembangkan pertanyaan secara bebas sesuai pokok permasalahan yang sedang ditanyakan.

b) Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara mencari dokumen-dokumen seperti majalah, buletin atau berbagai terbitan yang pernah diterbitkan Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya (UAPKM UB). Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh dari wawancara dan sebagai pelengkap dari informasi yang diberikan informan terkait kejadian masa lampau. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bungin (2007, h. 124) yang mengatakan bahwa metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis dimana bahan dokumentasi memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian sejarah.

### 3.5 Sumber Data

Lofland dan Lofland (Moleong, 2012, h. 157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan data pendukung lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil wawancara diperoleh dari informan penelitian yang merupakan alumni Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya (UAPKM UB). Sumber data lain diperoleh dari hasil dokumentasi seperti media terbitan Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya (UAPKM UB), Arsip, foto hingga video yang

menyangkut kegiatan anggota UAPKM UB termasuk peristiwa yang terjadi di masa lampau.

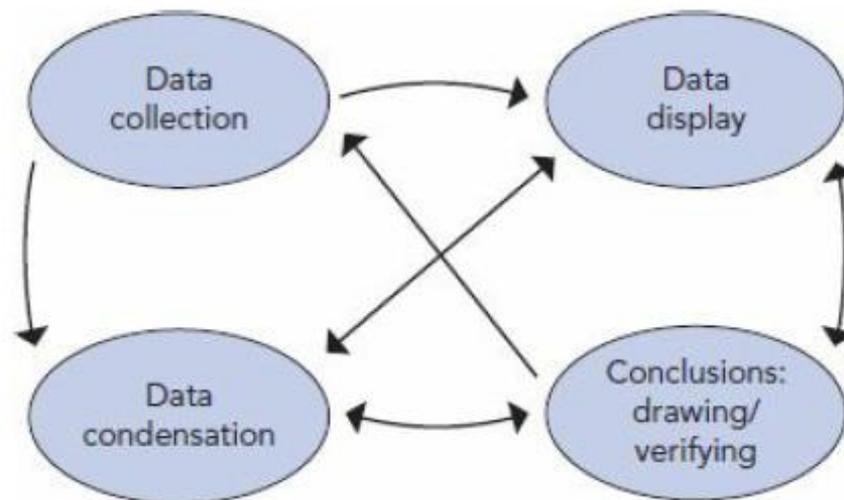
### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian data dengan cara mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012, h. 280). Kriyantono (2006, h. 165) mengatakan bahwa analisis data pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif dikarenakan perbedaan pada jenis datanya. Uji statistik digunakan pada penelitian kuantitatif karena data pada penelitian kuantitatif berupa angka-angka, sedangkan data pada penelitian kualitatif tidak menggunakan uji statistik karena datanya berupa kata-kata atau kalimat, dan gambar.

Bodan dan Biklen (Moleong, 2012, h. 248) mengartikan analisis data kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, artinya analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan atau pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sampai datanya menemukan titik jenuh.

Aktivitas tersebut meliputi *data condensation*, *data display*, and *conclusion drawing/verification* (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014, h. 31).



Gambar 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif

#### 1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merupakan proses untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi dan atau mengubah data yang ada pada sebuah penelitian yang diperoleh dari field notes, transkrip wawancara, dokumen, dan berbagai data empiris. Dengan mengkondensasi, kita membuat data semakin kuat. Kondensasi data terjadi secara terus menerus pada tahapan penelitian kualitatif. Bahkan sebelum data dikumpulkan, kondensasi data sudah terjadi saat peneliti menyusun kerangka konseptual, rumusan masalah, dan metode pengumpulan data yang digunakan. Setelah mendapatkan data dari lapangan, tahapan selanjutnya dari kondensasi data adalah menulis ringkasan, melakukan coding, mengembangkan tema, membuat kategori, dan membuat catatan analisis. Kondensasi data/

proses transformasi ini terjadi terus menerus setelah pengumpulan data dilakukan sampai penulisan laporan selesai.

## 2. *Display Data* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah kondensasi data adalah dengan melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk teks atau uraian yang bersifat naratif, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain-lain.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi)

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, artinya bila temuan atau data yang dikumpulkan tidak mendukung, maka kesimpulan tersebut masih bisa berubah. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Pers Mahasiswa di Kota Malang

Kejayaan pers mahasiswa saat awal Orde Baru dapat dilihat saat IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) melibatkan diri dalam politik dengan menjadi Biro Penerangan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan diakui sejajar dengan organisasi pers lainnya oleh Departemen Penerangan (Siregar, 1983, h. 48). Banyak pers mahasiswa muncul dan menjadi anggota IPMI saat itu salah satunya *Mimbar*, koran kampus Universitas Brawijaya Malang. Setahun sebelum membentuk *Mimbar*, Djanalis Djanaid<sup>1</sup> sempat membentuk koran *Mingguan Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyalur Tenaga Kerja. *Mingguan Mahasiswa* murni dikelola oleh mahasiswa dan bukan atas nama universitas serta pendanaannya tidak bergantung pada universitas.

Djanaid menjelaskan bahwa sumber dana yang digunakan saat itu berasal dari iklan dan hasil pemutaran film di bioskop yang sengaja mereka kontrak;

“*Mingguan mahasiswa* adalah koran mahasiswa yang diterbitkan oleh Yayasan Penyalur Tenaga Kerja. Kita punya yayasan namanya Penyalur Tenaga Kerja. Acaranya bermacam-macam seperti mengadakan pameran, dan salah satunya membuat koran mingguan mahasiswa. Sumber dananya diambilkan dari kita mengontrak bioskop, bioskop kita kontrak, dan diadakan pemutaran film spesial pada waktu itu dan iklan.” (Wawancara Djanalis Djanaid, Senin, 3 Maret 2014).

<sup>1</sup> Djanalis Djanaid merupakan aktivis pers mahasiswa pada tahun 1970an. Beliau pernah mendirikan koran *Mingguan Mahasiswa* dan *Mimbar Universitas Brawijaya Malang*. Selain sebagai pendiri *Mimbar Universitas Brawijaya*, Djanalis Djanaid dipercaya sebagai Pemimpin Umum *Mimbar* selama 34 tahun mulai tahun 1971-2005. Pernah menjadi Wakil Ketua PWI Malang dan Ketua Bidang Pendidikan PWI Jatim.

Konsep *Mingguan Mahasiswa* yang ada pada saat itu sesuai dengan pengertian yang dikeluarkan oleh Soekarno, Dirjen PPG (Pembinaan Pers dan Grafika) yaitu pers mahasiswa adalah semua bentuk penerbitan yang dikelola mahasiswa di luar kaitan kampus (Supriyanto, 1988, h. 81). *Mingguan Mahasiswa* dinilai cukup sukses dalam merebut perhatian pembaca dan pasar, sehingga untuk mengembangkannya, pusat produksi *Mingguan Mahasiswa* dipindah ke Surabaya. Saat berada dalam kepemimpinan H Agil Haji Ali<sup>2</sup> *Mingguan Mahasiswa* berubah nama menjadi *Memorandum*.

*Mimbar* didirikan pada tahun 1971 oleh Djanalis Djanaid untuk menampung aspirasi dosen, karyawan, dan mahasiswa. Sebagai anggota IPMI, *Mimbar* pernah mengadakan Lokakarya Pola Pendidikan dan Pengembangan Pers Mahasiswa pada tahun 1970an;

“Waktu itu kita adakan Lokakarya Nasional di Malang sekitar tahun 1972 untuk menentukan pola pers kampus. Jadi MIMBAR brawijaya yang mengundang 45 universitas di seluruh Indonesia. Kita rumuskan pers kampus itu apa? Bagaimana kriterianya? Ada pers mahasiswa, ada pers kampus.” (Wawancara Djanalis Djanaid, Senin, 3 Maret 2014).

Pers mahasiswa adalah pers yang dikelola oleh mahasiswa untuk mengembangkan idealisme kemahasiswaan sedangkan pers kampus adalah pers yang diterbitkan oleh universitas atau perguruan tinggi dan dikelola oleh civitas akademika.

*Mimbar* Universitas Brawijaya termasuk pers kampus karena dikelola oleh dosen, karyawan dan mahasiswa. Meskipun pada kenyataannya pers kampus dibuat untuk kepentingan kampus dan mahasiswa ikut memiliki peran

<sup>2</sup> H Agil Haji Ali merupakan aktivis pers mahasiswa pada tahun 1960an. Di Awal orde baru beliau pernah membuat buletin mahasiswa yang bernama Gelora Mahasiswa Indonesia. Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Cabang Jawa timur selama 2 periode mulai 1982-1992, Wakil Ketua SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) Pusat, Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN.

dalam pengelolaannya, *Mimbar* kurang pas jika disebut sebagai pers mahasiswa karena ideologi dan visinya yang tidak mencerminkan idealisme mahasiswa. Utomo (2013, h. 5) mengatakan bahwa salah satu ciri khas yang melekat dalam pers mahasiswa adalah idealisme kemahasiswaan yang dimiliki para aktivisnya. Meskipun *Mimbar* termasuk pers kampus namun kehadirannya dianggap sebagai pelopor munculnya pers mahasiswa di Universitas Brawijaya seperti yang dikatakan oleh Mondry<sup>3</sup> sebagai salah satu pendiri UAPKM UB;

“memang kavling 10 dibangun untuk mendukung mimbar. Jadi ada dua penyebab kavling 10 dibangun. Pertama menampung aspirasi dari Fordi mapelar yang banyak itu, yang kedua untuk mengembangkan koran kampus kita.” (Wawancara Mondry, Senin, 24 Februari 2014)

Dibentuknya UAPKM UB pada tahun 1983 disebabkan karena tidak tersedianya wadah untuk menampung hasil diskusi-diskusi yang dilakukan oleh di Fordi mapelar (Forum Diskusi Mahasiswa Pengembang Penalaran). Susantoro (2007) mengatakan bahwa semenjak IPMI dibubarkan pada tahun 1982, aktivitas penerbitan mahasiswa mengalami pergeseran makna dan membentuk format baru berupa pelatihan dan pendidikan jurnalistik, forum diskusi studi, dan temu aktivis. Hal ini mengacu pada istilah jurnalisme struktural yang dicetuskan oleh Supriyanto (1998, h. 125) yang memandang pers mahasiswa tidak hanya menulis namun sebagai organisasi pergerakan, pers mahasiswa mampu melakukan aksi penyadaran dengan berbagai cara seperti pelatihan, seminar, forum diskusi sebagai bentuk perjuangan untuk meralisasikan idealisme pers mahasiswa tersebut.

<sup>3</sup> Mondry merupakan salah satu pendiri UAPKM UB (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya) pada tahun 1983, pernah aktif di koran kampus *Mimbar* sebagai wartawan hingga redaktur pada tahun 1980an

Pers mahasiswa tingkat fakultas mulai marak bermunculan di Universitas Brawijaya pada tahun 1980an seperti *Dianns* (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya) pada tahun 1981, *Aqua* (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya) pada tahun 1983, *Canopy* (Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya) pada tahun 1984, *Manifest* (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) pada tahun 1985, *Indikator* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya) pada tahun 1986, *Solid* (Fakultas Teknik Universitas Brawijaya) pada tahun 1986, dan *Mafaterna* (Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya) pada tahun 1986.

Tidak semua pers mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya didirikan dengan kesadaran mengusung konsep pers mahasiswa pada awal pembentukannya. UAPKM UB pada awalnya didirikan untuk menampung hasil diskusi dari Fordi Mapelar, terbitan *Dianns* berbentuk jurnal ilmiah pada fase awal pembentukannya, *Aqua* yang merupakan media dari Senat Mahasiswa, dan *Perspektif* yang berawal dari klub penulisan dan sastra. Konsep pers mahasiswa didasari oleh perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan kesadaran mahasiswa akan pentingnya wadah untuk menampung aspirasi dan pemikiran kritis dari mahasiswa dalam fakultasnya masing-masing.

Pers mahasiswa di Universitas Brawijaya bisa disebut sebagai pemicu timbulnya pers mahasiswa di universitas lain seperti *DIMEK* (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang), *Radiks* (Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang), *Civitas* (Universitas Merdeka) seperti yang dikatakan Mondry;

“Peminatnya ada tetapi, trendcentrenya kita. Bukannya gak ada ya. Ketika kita muncul menggebu, mereka baru ngikuti menggebu juga. Jujur saja ada, tapi tidak seperti sekarang, bahkan sekarang alhamdulillah saya melihat di UB saja masing-masing fakultas sudah memiliki pers mahasiswa. Jujur saja, mungkin gak semua benang merah antara kavling 10 dengan munculnya majalah-majalah fakultas adalah gak tau mereka jujur atau gak untuk mengakui bahwa cikal-bakal munculnya majalah fakultas lain itu dari kavling 10.” (Wawancara Mondry, Senin, 24 Februari 2014)

Siregar (1983, h. 54) mengatakan bahwa setelah peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974, pers mahasiswa yang pada dasarnya bergerak di luar kampus dipaksa untuk masuk dalam sistem pendidikan tinggi dan diberi angin untuk hidup<sup>4</sup>. Apa yang dikatakan Siregar mengacu pada Surat Keputusan No. 146/Kep/Menpen/1975 tentang ketentuan, persyaratan & prosedur penerbitan khusus. Dengan surat keputusan tersebut, Hill (2011, h. 141) mengatakan bahwa pers mahasiswa tidak diperkenankan sebagai sarana dalam bentuk apapun untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis. Pers mahasiswa yang berada di kampus dan memenuhi syarat tersebut lolos dari pembredelan.

Dhakidae (1977) juga menambahkan bahwa pemerintah kembali mengeluarkan surat keputusan lewat menteri pendidikan dan kebudayaan yang dikenal dengan SK 028/1978 Tentang Wewenang dan Batas Permainan Civitas Akademika Kampus. Dalam surat tersebut berisi tentang larangan kegiatan mahasiswa di luar kampus. Semua kegiatan di luar kampus harus sepengetahuan dan seijin Rektor Universitas atau perguruan tinggi masing-masing. Dengan begitu, secara perlahan pemerintah menjauhkan aktivitas kemahasiswaan dari kegiatan politik dan mengubahnya dalam bentuk

<sup>4</sup> Pers mahasiswa yang sesuai dengan struktur konsolidasi pemerintah dibiarkan berkembang dan diberi subsidi oleh pemerintah sebesar 50% dari universitas untuk biaya penerbitan

penerbitan khusus<sup>5</sup> sesuai bidang keilmuannya masing-masing, artinya terjadi pengkotak-kotakan dalam pers mahasiswa sehingga diharapkan pers mahasiswa tidak lagi membahas isu-isu politik di luar kampus.

Memasuki awal dekade 90an kondisi pers mahasiswa di Kota Malang ditandai dengan pembentukan FKPM (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Malang) dan PPMI (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia). Dalam penelitiannya, Fahmi (2011) mengatakan bahwa pada awal 1990an sebagai fase pembangkitan bagi pers mahasiswa di kota Malang. Hal tersebut disebabkan terbentuknya FKPM dan PPMI yang dinilai sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan pers mahasiswa di Indonesia. Pembentukan FKPM di kota Malang merupakan salah satu dari upaya untuk menghidupkan kembali wadah pers mahasiswa di tingkat nasional yaitu PPMI. Budianto<sup>6</sup> menyebut FKPM sebagai bagian dari upaya pembentukan organisasi pers mahasiswa nasional. Sejalan dengan pendapat tersebut, Nurtanio<sup>7</sup> mengatakan bahwa;

“Dengan inisiatif aktivis pers mahasiswa Universitas Brawijaya, di Malang terbentuklah FKPM (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Malang) yang menjadi pilar pembentukan PPMI.”(Wawancara Dedi Nurtanio, Rabu, 8 Juni 2016).

<sup>5</sup> David T. Hill menjelaskan isi dari penerbitan khusus seperti lembaran kampus, pamflet organisasi non pemerintah atau terbitan internal perusahaan. Penerbitan khusus juga tidak menyajikan berita umum atau terlibat dalam politik praktis.

<sup>6</sup> Rohman Budianto pernah menjadi Pemimpin Redaksi Manifest (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Pemimpin Umum UAPKM UB (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya) sekaligus Pemimpin Redaksi Majalah Ketawanggede edisi pertama pada tahun 1992.

<sup>7</sup> Dedi Nurtanio merupakan aktivis pers mahasiswa tahun 1990an. Pernah aktif di Indikator (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), UAPKM UB (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya), dan Koran Kampus Mimbar Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan anggota tim khusus penyusun Kurikulum Diklat PPMI pada tahun 1993.

Yunan Saifullah sebagai Koordinator FKPM (1991-1994) mengatakan bahwa konsolidasi dan sosialisasi dilakukan dengan tujuan memperkuat dan memperkenalkan rencana pembentukan PPMI di masing-masing wilayah;

“Tahun 1991 kalau total perguruan tinggi di Malang waktu itu sekitar 47, tapi kan nggak semuanya punya media. Dari 42 itu saya bisa komunikasi sama mereka, bisa merangkul mereka hampir 80%. Berangkat dari itu, beberapa kampus dari 42 tadi mulai mengenal apa itu pers mahasiswa. Tahun 1991 kata pers mahasiswa masih sensitif. Artinya kita siasati dengan nama penerbitan kampus. Outputnya dari berbagai sosialisasi itu adalah 1992 ada Lokakarya Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa sebagai gagasan awal untuk mendirikan PPMI” (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015)

Setelah PPMI (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia) dideklarasikan pada Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia dan Diklat X se-Jawa Timur pada 15 Oktober 1992, kondisi pers mahasiswa di kota Malang cukup dinamis, para aktivis pers mahasiswa terus membentuk jaringan antar pers mahasiswa, bahkan pers mahasiswa di Universitas Brawijaya bisa disebut sebagai pionir pers mahasiswa di Malang, bahkan se-Jatim pada saat itu. Affan<sup>8</sup> menjelaskan bahwa tradisi Diklat se Jawa Timur digagas oleh UAPKM UB;

“Aku masih inget, ketika di majalah Dianns dulu sebagai Pimred maupun sebelumnya, itu ada teman-teman Unisma datang, temen-temen Jember datang “*Gimana caranya menerbitkan majalah gini*” bahkan ada yang mau langganan hehe “*Kita mau langganan majalah Dianns ini gimana?*”, mereka belajar dari situ. Sampai mereka nyetak di percetakan yang sama dengan majalah Dianns, misal dari FISIP UNEJ kalo gak salah, aku lupa, Prima namanya kalo gak salah hehe. Kemudian aku tulis di dapur redaksinya gitu. Memang ia kalau mau dibilang *Trendcentre*, menurutku loh ya, dan lewat figur Budi Harminto karena dia kebetulan, sebelum di Dianns, dia di UAPKM, dia mengkonsep Unit itu termasuk mendirikan tradisi Diklat tiap tahun, mengundang teman-teman dari kota lain se Jawa Timur.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

<sup>8</sup> Heyder Affan merupakan aktivis pers mahasiswa Dianns (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya) dan UAPKM UB (Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya). Beliau merupakan Steering Comitee Jawa timur dalam Pra Kongres pembentukan PPMI

Permasalahan mengenai PPMM (Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Malang) dan PPMI kota Malang mulai terjadi pada dekade 2000an. PPMM dan PPMI adalah dua organisasi yang berbeda, namun pengisi organisasi ini adalah orang yang sama, karena pada awalnya PPMM didirikan untuk mendukung PPMI. PPMM didirikan untuk berfokus pada pers mahasiswa di kota Malang, dan berada di bawah naungan PPMI yang lingkupnya nasional;

“Hasil Kongres PPMI I pada tahun 1993 mulailah mediator kota untuk mempersiapkan itu. Mediator daerah ya bukan kota. Muncullah nama Asep Wahyu dari UAPKM UB sebagai mediator PPMI untuk Jawa Timur. Tugas saya sebagai koordinator FKPMI tetap mengawal PPMI di tempat yang lebih kecil berupa daerah yaitu kota Malang”. (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015).

Seiring perkembangan zaman, terjadi perbedaan persepsi antar generasi dalam memahami PPMM sebagai organisasi yang berbeda dengan PPMI, bahkan ada yang menyebut PPMM sebagai organ tandingan PPMI kota Malang;

“Ada yang melatarelakangi historis, dulu sempat ada permasalahan antara PPMI kota Malang dengan PPMM. PPMM sempat ada konflik sehingga LPM yang bergabung dengan PPMM tidak mau bergabung dengan PPMI kota Malang. PPMM menilai PPMI kota Malang sebagai organ yang sangat politis sehingga LPM yang bergabung dengan PPMM tidak masuk ke PPMI kota Malang dan sebaliknya. Tapi untuk detail pastinya saya kurang begitu paham.” (Wawancara Ahmad Yani Ali, Selasa, 15 April 2014).

“Jaman 1990 hingga 1996, setiap ada Diklat penulisan mahasiswa se Malang, siapapun yang pernah aktif di FKPMI, siapapun yang pernah aktif di pers mahasiswa, itu selalu dilibatkan baik sebagai pembicara, bisa datang saja, bisa menyemarakkan. Setelah tahun 2004-2006 sama sekali tidak ada kabar, bahkan telpon pun tidak ada. Dulu rutin loh, kurikulum Diklat sangat bagus di Malang”. (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015).

Menurut pemahaman peneliti, PPMM saat itu sama dengan PPMI Kota Malang untuk saat ini, karena saat itu memang belum dibentuk PPMI untuk

tingkat kota maupun wilayah. Jika ditinjau dari sisi historis, sebenarnya PPM merupakan kelanjutan dari FKPM. Saifullah mengatakan bahwa setelah menjadi koordinator FKPM 1991-1994, PPM dibentuk dari rekomendasi Kongres PPM I di Kaliurang pada tahun 1993. Rekomendasi Kongres I PPM menetapkan agar presidium yang terpilih untuk menghimbau kepada seluruh anggota PPM melakukan konsolidasi, memfokuskan diri pada sosialisasi dan pembentukan forum-forum<sup>9</sup> di daerah untuk membangun basis (Fathoni, 2010, h. 76). Sama halnya dengan PPM yang ada di Malang, saat Rommy Fibri dan Asep Wahyu menghadiri undangan Diklat dan Temu Aktivistis Pers Mahasiswa se-Ujung Pandang pada september 1993, aktivis pers mahasiswa se-Ujung Pandang yang tergabung dalam PPMU (Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Ujung Pandang) mendukung dan menyatakan diri berada di bawah naungan PPM (Fathoni, 2010, h. 77).

Beberapa pers mahasiswa di kota Malang muncul pada dekade 2000an seperti *Mimesis* (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya), *Perspektif* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya), *Display* (PTIK UB), *Api* (Kampus Asia), *Candida* (Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya), *Kompen* (Politeknik Negeri Malang). Pers mahasiswa di Malang semakin berkembang jika dilihat dari kuantitasnya, namun penyebaran pers mahasiswa di Malang tidak merata. Ali sebagai Sekjen PPM kota Malang tahun 2013-2015 memaparkan bahwa terdapat 26 LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) secara keseluruhan di Kota Malang. Dari jumlah keseluruhan, LPM paling banyak berasal dari Universitas Brawijaya Malang

<sup>9</sup> PPM (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Malang), PPMY (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Yogyakarta), PPMU (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Ujung Pandang), FPMB (Forum Pers Mahasiswa Bandung), PPM (Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Surakarta)

sebanyak 15 pers mahasiswa. LPM di tingkat fakultas memang terus berkembang di Universitas Brawijaya;

“Iya, di UB hampir semua fakultas ada, kecuali yang baru. Bahkan PPMI malang sendiri agendanya pasti ngikutin agenda UB, liburnya kapan, karena anggotanya paling banyak juga dari UB. UAPKM juga kan dari UB, UB juga PTN paling diminati di Malang, yang lain walaupun PTN tapi tradisi pers mahasiswanya gak sekuat UB.” (Wawancara Fadrin Fadhlan B, Selasa, 15 April 2014).

Dari jumlah pers mahasiswa secara keseluruhan, memang tidak semuanya bergabung dengan PPMI. Ali memaparkan beberapa faktor seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga LPM tersebut kurang siap dan tidak bisa mengirimkan delegasi untuk PPMI kota Malang, masa studi yang padat sehingga ruang gerak mahasiswa tidak leluasa dalam mengikuti organisasi;

“Jadi LPM tersebut mau untuk bergabung namun dengan alasan SDM yang nantinya didelegasikan ke PPMI sebagai pengurus kota itu gak ada. Jadi ada yang bilang begitu “belum siap mas, nanti kalo kita sudah siap saya hubungi sampean.”

“Di poltek ada KOMPEN yang sempet mau bergabung dengan PPMI, namun karena masa studi yang terbatas. Kalo di poltek kan masa studi 3 tahun untuk D3, sedangkan prasyarat untuk jadi delegasi di PPMI minimal harus 2 tahun di LPM. Sementara di poltek tahun ke 3 sudah sibuk dengan tugas akhir, jadi mereka tidak siap untuk masuk ke PPMI.” (Wawancara Ahmad Yani Ali, Selasa, 15 April 2014).

Bila melihat kondisi pers mahasiswa di Kota Malang, secara keseluruhan permasalahan yang dialami sama seperti pers mahasiswa pada umumnya, namun setiap pers mahasiswa memiliki kendala yang berbeda seperti kondisi yang dihadapi *Canopy* (Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya) mengalami masa-masa sulit karena keterbatasan dana dan Sumber Daya Manusia (SDM), *Aqua* (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya) mendapat intimidasi-intimidasi seperti pemboikotan sekretariat oleh oknum

yang tidak diketahui, *Perspektif* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya), terkendala pada bagaimana proses pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kaderisasi. Kemungkinan hal tersebut hampir dialami oleh semua Pers Mahasiswa, termasuk UAPKM UB yang mengalami penarikan majalah Ketawanggede edisi ke 3 pada tahun 1994, keterbatasan SDM pada tahun tahun 2011-2012, serta ancaman pembekuan dari PR III pada tahun 2016.

Orientasi media pers mahasiswa di Kota Malang saat ini masih berfokus pada media cetak, meskipun kemajuan teknologi ikut mempengaruhi bentuk media pers mahasiswa. Banyak yang memanfaatkan hal tersebut dengan membuat website, social media seperti twitter, facebook, memanfaatkan untuk menjangkau pembaca dengan segmentasi yang berbeda;

“Seperti yang di Dians LPM FIA UB, dia sudah mulai konsen ke media sosial meskipun cetak masih ada. Trus orientasinya juga POP culture, jadi kontennya ada jurnalisme musik. Secara ideologi LPM tetap mengusung ideologi masing-masing, saya kurang begitu paham kalo untuk LPM masing-masing yang jelas ada keberpihakan melihat kondisi realnya.” (Wawancara Ahmad Yani Ali, Selasa, 15 April 2014).

Dengan perkembangan teknologi dan hadirnya internet sebagai media baru, pers mahasiswa harus beradaptasi dituntut lebih peka dalam menyajikan berita kepada pembaca karena segmentasi pembaca juga semakin luas jika pers mahasiswa menggunakan website sebagai media baru.

## 4.2 UAPKM sebagai Wadah Ekspresi Aktivistis Pers Mahasiswa (1990-2000an)

Kesuksesan pers mahasiswa sebagai media komunikasi sering diukur lewat produk terbitan dan periodisasi terbitnya. Apabila pers mahasiswa dapat menerbitkan medianya secara teratur dan jumlah pembacanya meningkat dari edisi sebelumnya, maka sukseslah pers mahasiswa tersebut dari segi alat (Abrar, 1992, h. 110). Abrar menekankan pada kata “alat” artinya produk terbitan seperti majalah, buletin, koran, merupakan salah satu aspek yang ada di dalam pers mahasiswa. Di satu sisi idealisme dan fungsi pers mahasiswa yang melekat tidak bisa begitu saja dilupakan, karena hal tersebut yang menjadi roh pers mahasiswa.

Sejak berdiri pada tahun 1983 sampai 1992, UAPKM tidak memiliki produk terbitan. Anggota UAPKM menyalurkan kreatifitas jurnalistiknya dengan mengisi koran kampus *Mimbar* yang dikelola oleh Humas Universitas Brawijaya. Jika dibandingkan dengan pers mahasiswa tingkat fakultas seperti *Dianns*<sup>10</sup> (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya) dan *Indikator*<sup>11</sup> (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), tentu UAPKM kalah dengan pers mahasiswa tingkat fakultas tersebut;

“Penyebabnya mungkin terkait dengan penataan aktivitas kemahasiswaan di era NKK/BKK saat itu yang berimbas pada pendanaan kegiatan kemahasiswaan, termasuk pers kampus. Ruang “bermain” yang tersedia di tingkat Universitas saat itu adalah sisipan mimbar mahasiswa di tabloid kampus *Mimbar*.” (Wawancara Dedi Nurtanio, Rabu, 8 Juni 2016).

<sup>10</sup> Majalah *Dianns* mulai terbit pada saat Budi harminto pada tahun 1988-1989. Majalah *Dianns* terbit tiap tahun, dan pemberitaannya sempat mendapatkan teguran karena memuat tulisan tentang ICMI pada era Orde Baru.

<sup>11</sup> *Indikator* memiliki 5 produk media cetak seperti Majalah *Indikator*, Tabloid *Indimaknews*, Buletin *Indimolor*, koran dinding *Independent*, dan mading *Indihoi*. Majalah *Indikator* terbit secara konsisten setiap tahun, meskipun pada masa sebelum reformasi, indikator pernah menerbitkan majalah empat kali dalam setahun

Dalam bukunya yang berjudul *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*, Didik Supriyanto menggunakan istilah jurnalisme struktural sebagai konsep pers mahasiswa. Jurnalisme struktural diartikan sebagai semua aktivitas yang bertujuan untuk merealisasikan idealisme pers mahasiswa bisa dianggap sebagai aktivitas pers mahasiswa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki sikap berani dalam bertindak kritis dan peduli dengan lingkungan sekitar, dengan demikian, aktivitas pers mahasiswa tidak hanya bergerak dalam bidang penerbitan seperti membuat majalah, koran, buletin tapi lebih dari itu sebagai organisasi pergerakan, aktivis pers mahasiswa harus melakukan aksi penyadaran lewat berbagai kesempatan seperti seminar, menciptakan forum diskusi, dan melakukan jejaring antar pers mahasiswa

Aktivitas yang dilakukan oleh anggota UAPKM tidak hanya berfokus pada penerbitan, lebih dari itu posisi UAPKM sebagai pers mahasiswa di tingkat universitas dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para aktivis persma dari masing-masing fakultas, bahkan lintas Universitas di kota Malang;

“UAPKM adalah wadah bagi aktivis pers mahasiswa di Universitas Brawijaya yang serius menekuni dunia jurnalistik dan *concern* pada persoalan masyarakat dan demokratisasi. UAPKM memang tidak dari awal menekuni penerbitan pers dalam format majalah, sebelum lahirnya Ketawanggede, mereka mengasah diri dengan media tabloid *Mimbar Mahasiswa*.” (Wawancara Dedi Nurtanio, Rabu, 8 Juni 2016).

“UAPKM lebih banyak sebagai tempat kumpul-kumpul aktivis pers lintas fakultas dan membuat jejaring antarkampus. Kalau terbitan fakultas memang sudah eksis lebih dulu. Yang paling rutin dan terjaga kualitasnya waktu itu *Dianns* dan *Indikator*.” (Wawancara Rohman Budiando, Rabu, 14 Desember 2016).

“...jadi UAPKM atau Kavling 10 sebagai tempat nongkrongnya para aktivis. Ya memang di UB sendiri tidak hanya di UAPKM kan, orang-orang nya juga dari Dianns dan Indikator, namun lambat laun kan bergeser, dari Dianns dan Indikator juga jadi anggota UAPKM, disitulah pergerakan perjuangan dimulai, untuk lingkup UB dan Malang. Karena di UAPKM itu bisa menerima lintas batas generasi aktivis, apapun model aktivis, antara gerakan mahasiswa dan pers mahasiswa.” (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015).

Kondisi yang terjalin antar aktivis pers mahasiswa saat itu dapat dikatakan sangat solid. Hubungan antar pers mahasiswa di fakultas dengan UAPKM juga bersifat longgar karena memang UAPKM sering mengadakan diskusi. Pada kepemimpinan Buchori 1990-1991, wadah komunikasi antar media fakultas di bawah satu bidang di UAPKM dibentuk. Sifatnya paguyuban atau bisa disebut sebagai forum komunikasi antar pers mahasiswa fakultas, sementara mereka memiliki otonomi masing-masing. Hal tersebut bertujuan agar pers mahasiswa di Universitas Brawijaya memiliki kedekatan satu-sama lain, tidak ada persaingan antar pers mahasiswa fakultas. Implementasi dari kegiatan tersebut adalah dengan menarik Pimpinan Redaksi dari masing-masing LPM Fakultas untuk menjadi anggota UAPKM UB;

“Jadi anak-anak jaman Buchori waktu itu lumayan bagus, karena dia bisa menyatukan antara majalah fakultas dengan Unitas, jadi Pimrednya majalah fakultas ditarik ke Unitas, jadi kita kuat dan relatif kompak. Dulu kan biasa lah setiap fakultas bersaing, dengan menarik mereka ke Unitas jadi persaingannya relatif bisa *fair* gitu.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

Rohman Budiyanto mengatakan meskipun UAPKM belum memiliki produk terbitan sendiri, tapi kondisi pers mahasiswa di Universitas Brawijaya

tetap penuh semangat perlawanan, sedangkan Yudi Arianto<sup>12</sup> menilai UAPKM sebagai organisasi yang paling kritis jika dibandingkan organisasi lainnya;

“Di tingkat universitas, UAPKM adalah organ mahasiswa paling kritis dan cerdas dengan jaringan yang tidak bisa disaingi oleh organ mahasiswa sejenis. Dia juga merupakan organ mahasiswa “*paling berwarna*”, yang mampu mencerna-membicarakan isu sara dengan terbuka, santai, dan tanpa beban.” (Wawancara dengan Yudi Arianto, Sabtu, 8 Juli 2017)

Aktivis-aktivis pers mahasiswa di UAPKM yang berasal dari LPM Fakultas masing-masing menjalin komunikasi dengan aktivis pers mahasiswa di kota lain untuk membentuk jejaring antar pers mahasiswa. Sebagian besar aktivis tersebut sudah memiliki pengalaman dalam memimpin LPM di fakultasnya masing-masing, namun melalui UAPKM UB aktivis-aktivis tersebut terhubung dan bergaul dengan aktivis pers mahasiswa dari universitas lain di Indonesia, sampai puncaknya menjadi tuan rumah dalam Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia dan Diklat X se-Jawa Timur pada 15 Oktober 1992.

#### 4.2.1 Lewat Temu Aktivis hingga PPMI dideklarasikan

Kondisi pers mahasiswa di Indonesia pada akhir tahun 1980an mengalami perubahan dimana aktivitas yang berkembang saat itu berupa pelatihan jurnalistik dan forum diskusi. Secara perlahan aktivis pers mahasiswa menyadari akan pentingnya membentuk wadah baru

<sup>12</sup> Yudi Arianto mengawali karir jurnalistiknya dengan masuk LPM Solid (Fakultas Teknik Universitas Brawijaya) pada tahun 1990. Setahun kemudian masuk UAPKM UB dan menjadi Pemimpin Umum pada tahun 1993-1994.

sebagai pengganti IPMI. Gagasan tersebut tercetus saat acara<sup>13</sup> Pendidikan Pers Mahasiswa Tingkat Nasional di Cibubur pada 21-28 Oktober 1985 (Fathoni, 2010, h. 28). Susantoro (2007) menambahkan bahwa aktivitas-aktivitas penerbitan dan beberapa forum pendidikan dan pelatihan jurnalistik di tahun 1986-1989 mulai marak diadakan oleh beberapa perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk menghidupkan kembali dinamika intelektual kampus.



**Gambar 1** Perwakilan UAPKM UB dalam acara Diklat dan Temu Aktivis di Yogyakarta pada Tahun 1991. Sumber: Facebook Heyder Affan

Keterlibatan UAPKM UB dengan lahirnya PPMI berawal dari Pendidikan Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Pembina dan Temu Aktivis Penerbitan Mahasiswa yang diadakan oleh *Balairung* (Universitas Gajah Mada) pada tanggal 3-9 Februari 1991 di Yogyakarta. Pada saat itu UAPKM mengirimkan 3 delegasi yaitu Heyder Affan, Wignyo Adiyoso, dan Rohman Budiyanto.

<sup>13</sup> Acara tersebut diselenggarakan oleh Forum Komunikasi dan Kajian Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta (Majalah Politika), diikuti oleh 125 mahasiswa dari 29 perguruan tinggi yang tersebar di 17 kota seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa.

“...jaman Buchori itu tahun 1991 ada temu aktivis di Jogja, penyelenggaranya UGM, februari 1991. Temu Aktivis sekaligus Diklat Persma Tingkat Nasional. Yang ditunjuk untuk berangkat kesana adalah aku, Rohman sama Wignyo. Ya 3 orang itu, 1991 Februari, itulah cikal bakal UB atau pers kampus UB bermain di tingkat Nasional, membuka peran lebih besar gitu, bukan sekedar berkulat di dalam kampus, bahkan kita ke tingkat Nasional. Momennya itu dalam temu aktivis februari 1991, penyelenggaranya Balairung UGM.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

Pertemuan tersebut sebenarnya temu alumni dan gagasan yang ada pada saat itu adalah untuk melanjutkan Kongres IPMI yang pernah gagal. Akibatnya banyak peserta yang bereaksi, terjadi perdebatan saat itu dengan tidak menyetujui gagasan tersebut. Opsi yang ada saat itu melanjutkan Kongres IPMI atau Kongres dengan wadah baru. Kesepakatan akhir yang terbentuk saat itu adalah dengan membentuk wadah baru;

“Dalam pertemuan itu kita lebih tegas untuk meninggalkan IPMI karena IPMI dianggap gagal, gak bisa menyelenggarakan Kongres, gak bisa menindaklanjuti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pada titik kesimpulan kita harus bikin baru di pertemuan aktivis Balairung 1991 itu.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

Wahyudi (dalam Fathoni, 2010, h. 51) menyampaikan bahwa terdapat 3 keputusan penting yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Pertama adalah orientasi pers mahasiswa ke arah profesionalisme dan fungsionalisme<sup>14</sup>. Kedua peserta sepakat tentang diperlukannya wadah bagi pers mahasiswa se-Indonesia, dan yang terakhir pembentukan panitia *Ad hoc* (*Streering Commitee*) Nasional. Heyder Affan dari

<sup>14</sup> Profesionalisme dalam artian bukan profit oriented, namun dalam pemahaman pengelolaan organisasi diartikan mampu meningkatkan efisiensi kerja dan mendorong kemandirian. Fungsionalisme dimaksudkan dalam upaya perwujudan keterpaduan antara fungsi mahasiswa sebagai intelektual muda dan fungsi pers sebagai media

UAPKM UB terpilih sebagai *streering commitee* Jawa Timur dalam acara tersebut. Sebagai *streering commitee*, Affan memiliki tugas untuk mensosialisasikan pembentukan wadah baru yang direncanakan bernama PPMI sesuai daerah yang dia dapatkan yaitu Jawa Timur, termasuk untuk menyiapkan AD/ARTnya dan sebagainya.



**Gambar 2 Heyder Affan (UAPKM UB) sebagai SC Jawa Timur dalam acara Sarasehan Penerbitan Mahasiswa se-Malang di Universitas Brawijaya pada tahun 1991.**

Sumber: Sumber: Facebook Heyder Affan

Setelah kembali ke Kota Malang, UAPKM UB mengadakan Sarasehan Penerbitan Mahasiswa se-Malang pada tanggal 29 Mei 1991.

Dalam acara tersebut Affan mengundang beberapa aktivis pers mahasiswa<sup>15</sup> dari universitas lain dengan tujuan mensosialisasikan hasil Temu Aktivis Penerbitan Mahasiswa di Wanagama, Yogyakarta serta melakukan konsolidasi pada pers mahasiswa di Kota Malang. Acara tersebut juga dihadiri oleh 3 penggiat pers mahasiswa yang aktif pada

<sup>15</sup> Beberapa aktivis pers mahasiswa tersebut adalah Koko Sujatmiko (UMM Malang), Hanief Djohan (Uniga Malang), Fakhrudin (Unisma), Surya Adi Permono (Universitas Widya Gama) IKIP Malang, Universitas Merdeka.

masa IPMI dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang vakumnya IPMI saat itu, pentingnya organisasi pers mahasiswa serta peta kondisi pers mahasiswa di Indonesia.

Pertemuan tersebut berhasil membentuk FKPM (Forum Komunikasi Penerbitan Mahasiswa Malang). Saifullah<sup>16</sup> mengatakan bahwa;

“Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Malang itu adalah rekomendasi dari pertemuan di Wanagama, agar persma di masing-masing kota segera merancang dan menyusun penguatan kelembagaan. Pada jaman itu penguatan kelembagaan masih sebatas memperkuat silaturahmi dan komunikasi antar kampus.” (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015).

Dengan forum komunikasi pers mahasiswa di kota tersebut, diharapkan agar proses sosialisasi dan konsolidasi berjalan dengan lancar. Ma'mun<sup>17</sup> (dalam Fathoni, 2010, h. 52) mengatakan bahwa dibentuknya perhimpunan-perhimpunan di tingkat wilayah bertujuan untuk memudahkan *steering committee* nasional dalam mengupayakan pertemuan-pertemuan lanjutan sehingga, masing-masing delegasi diharapkan melakukan konsolidasi dari tingkat wilayah terlebih dahulu;

“UMM sendiri waktu itu hanya di fakultas kami (Dimek), lambat laun muncul dari fakultas teknik, dari peternakan, dari FKIP dst, hingga UMM bisa gandeng 10 majalah, UB waktu itu kalau gak salah ada 15 majalah. Kemudian kita bisa menjangkau UM, Widyagama, gajayana, Unmer terutama, bagi saya yang sangat ada sensasi sejarahnya ya Unmer itu karena militernya. Kita bisa bebas keluar masuk di Unmer dengan nyaman, diskusi apapun, ya lewat sosok Alm. mbak Ida.” (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015).

<sup>16</sup> Yunan Saifullah merupakan penggiat pers mahasiswa tahun 1980an. Pemimpin Umum DIMEK (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang) 1988-1991, Koordinator FKPM (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Malang) 1991-1994)

<sup>17</sup> Rachman Ma'mun merupakan Pemimpin Umum majalah Balaiurung UGM 1991-1993 yang juga terlibat dalam pembentukan PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia)

Sama halnya dengan Malang, Yogyakarta saat itu juga membentuk PPMY (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Yogyakarta). Terjalin hubungan yang baik antara aktivis pers mahasiswa di Malang dengan aktivis pers mahasiswa di Yogyakarta, sampai ada istilah “*poros malang-yogya*”, dan “*poros yogya-bandung*” saat itu. Sementara untuk kota lain di Jawa Timur seperti Surabaya, dan Jember tidak terdengar kabarnya;

“Nah di waktu yang sama, kita intens komunikasi dengan yang di UGM, kebetulan kan SC sampek ada istilah “poros malang – jogja” terus “poros bandung”. Sementara temen-temen Surabaya gak ada gaungnya, kebetulan yang waktu itu pertemuan aktivis itu anak ITS yang berangkat, anak UNAIR gak ada yang berangkat, gak tau juga kenapa itu. Akhirnya kita tinggal UNAIR, karena kita anggap sebenarnya masing-masing kota harus konsolidasi tiap kota gitu kan, Jember sendiri, Malang sendiri, Surabaya sendiri, tapi Jember dan Surabaya gak jalan.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

“Kita itu kalau datang ke Jogja, datang ke Semarang, datang ke Bandung seperti rumah sendiri. Saya bisa 20 hari tinggal di Bandung tanpa ada kesusahan. Saya bisa ke Jogja bisa nggak terkontrol harinya. Ya kalau ada pertarungan ideologi dan kepentingan itu ya wajar dalam organisasi, tapi poros-poros itulah yang memperkuat kekuatan PPMI secara horizontal.” (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015).

Setelah berhasil merumuskan AD/ART lewat beberapa pertemuan di FKPMI, Affan sebagai *steering committee* kembali menghadiri Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia di IKIP Bandung pada tanggal 8-10 Juli 1991 dengan tujuan untuk mematangkan pembentukan PPMI. Namun pada kenyataannya pemerintah kembali mengatur aktivitas kemahasiswaan saat itu lewat surat edaran Dirjen Pembinaan

Pers dan Grafika No. 05/SE/Ditjen PPG/1991<sup>18</sup> tertanggal 1 April 1991.

Duabulan kemudian tepatnya pada tanggal 1 Juli 1991, Direktur

Kemahasiswaan Depdikbud mengeluarkan Surat No.

547/D5.5/U/1991<sup>19</sup> yang menyebabkan Sarasehan Penerbitan

Mahasiswa Indonesia tersebut gagal dilaksanakan (Fathoni, 2010, h.

53);

“Terus IKIP Bandung kan yang ditunjuk sebagai tuan rumah untuk deklarasi pembentukan PPMI tapi ternyata gagal karena rektornya tidak memberi ijin, padahal kita semua udah berangkat. Akhirnya ada pro dan kontra apakah kita lebih disibukkan untuk membikin organisasi yang baru ini atau kita counter sikap Rektor yang kita anggap tidak demokratis lah karena tidak memberi ijin, termasuk Dikti juga kita anggap tidak memberi ijin mangkannya kita sempet protes ke Kebun Binatang bandung lalu sebagian temen berangkat ke DPR, protes terhadap sikap Dikti yang tidak mengijinkan acara itu.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

<sup>18</sup> Surat tersebut berisi tentang pengaturan penggunaan pengurus pers mahasiswa, Pemimpin Umum diganti dengan ketua pengarah, dan pemimpin redaksi diganti dengan ketua penyunting. Selain itu juga memuat aturan isi pemberitaan yang harus mencerminkan ciri-ciri akademis dan tidak menyajikan berita politik praktis

<sup>19</sup> Dalam surat tersebut berisi tentang tidak diberikannya rekomendasi penyelenggaraan “Sarasehan Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia“. Dengan pertimbangan:

- 1) Berdasarkan pengalaman selama ini tentang berbagai kegiatan penerbitan kampus mahasiswa ternyata: a) Kegiatan tersebut tidak menunjukkan kejelasan sasaran yang ingin dicapai, b) Panitia tidak pernah memberikan laporan penyelenggaraan kepada Direktorat Kemahasiswaan.
- 2) Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Kemahasiswaan terhadap “Temu Aktivistis Penerbitan Kampus Se-Indonesia“ yang diselenggarakan di Wonosari Yogyakarta (6-9 Februari 1991) ternyata kegiatan tersebut tidak menunjukkan citra forum akademik sebagaimana layaknya perguruan tinggi.
- 3) Direktorat Kemahasiswaan telah memprogramkan Latihan Ketrampilan Penerbitan Kampus Tingkat Pembina 1991/1992 yang akan diselenggarakan pada bulan Januari 1992 di Universitas Lampung yang merupakan keputusan Rakernas Pembantu Rektor III-1991



**Gambar 3 Sidang komisi yang dipimpin oleh Ariansyah (Unila Lampung), Tugas Supriyanto (Isola Pos IKIP Bandung), dan Heyder Affan (UAPKM UB) dalam acara Sarasehan Pers Mahasiswa se-Indonesia di IKIP Bandung pada tahun 1991. Sumber: Facebook Heyder Affan**

Susantoro (2007) menjelaskan hasil keputusan dari pertemuan yang sempat berlangsung dalam sidang komisi tersebut. Komisi I menghasilkan rancangan AD/ART PPMI. Komisi II membahas tentang program kerja. Komisi III memutuskan tanggapan terhadap Surat Dirmawa nomor: 574/D5.5/U/1991. Sidang komisi tersebut juga membahas rekomendasi apa yang harus dilakukan peserta terkait pembatalan Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia. Dari sidang tersebut muncul ide untuk melakukan aksi protes ke kebun binatang Bandung dan DPR. Sekitar 35 peserta dari 122 peserta meneruskan pembahasan di kebun binatang Bandung. Pertemuan lanjutan itu kemudian disebut *Bandung Informal Meeting*. Dari sini nama dan AD/ART PPMI (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia) serta

program kerja disepakati meskipun belum disahkan karena belum memenuhi kuorum (Fathoni, 2010, h. 54)



**Gambar 4** Pemberitaan mengenai “Bandung Informal Meeting” dan protes aktivis mahasiswa terhadap DPR dimuat di *Harian Suara Pembaruan* dan *Koran Jayakarta* pada bulan Juli 1991. Sumber: Facebook Heyder Affan

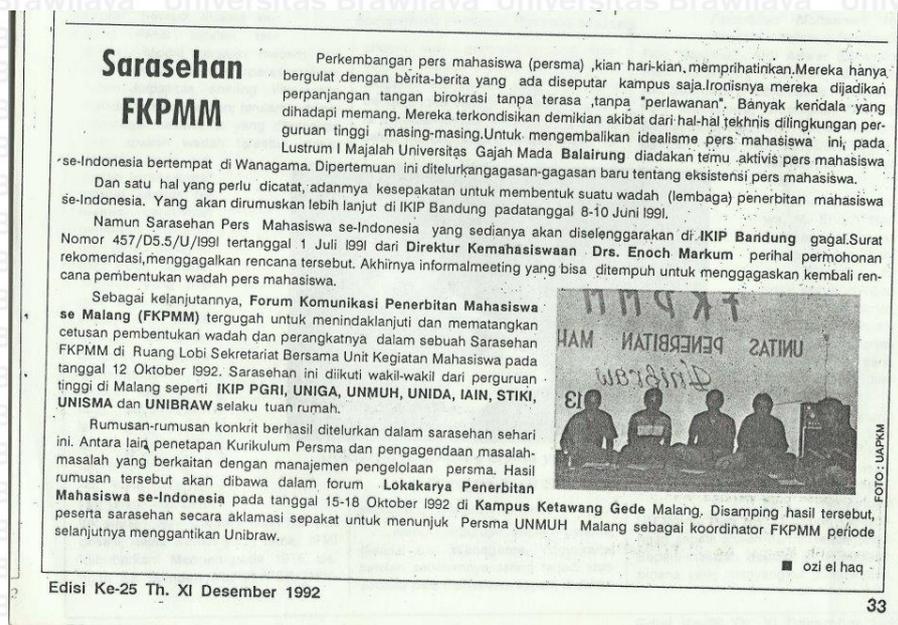
Abrar (1992, h. 58) menambahkan bahwa dampak lain yang terjadi saat itu sebanyak 30 pengelola pers mahasiswa mendatangi Direktorat Kemahasiswaan Depdikbud dengan tujuan ingin meminta penjelasan yang lebih spesifik mengenai pembatalan acara tersebut kepada Enoch Markum selaku direktur kemahasiswaan saat itu.

Setelah Bandung dan Denpasar gagal menjadi tuan rumah penyelenggara Pra-Kongres, Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia diselenggarakan di Universitas Gajayana Malang pada tanggal 20 Desember 1991. Dalam pertemuan tersebut dibentuk rancangan program kerja PPMI. Keinginan turut menyuarakan aspirasi mahasiswa dan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran kritis menjadi faktor penyemangat dalam pembentukan lembaga ini. Seperti tercantum dalam poin ketiga rumusan umum yaitu, menciptakan

penerbitan mahasiswa sebagai sarana pembentuk pendapat umum di kalangan mahasiswa ke arah kreatifitas kritis dan dinamis (Fathoni, 2010, h. 56).

Konsolidasi terus dilakukan Affan setelah acara Sarasehan Penerbitan Mahasiswa Indonesia. Komunikasi secara intens dengan *steering committee* lain juga dilakukan. Melalui kontak-kontak person, negosiasi dan sebagainya penjajakan terus berlangsung hingga mendapatkan izin mengadakan Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia dan Diklatsar Jurnalistik X se-Jawa Timur pada 14-18 Oktober 1992. Seminggu sebelum PPMI dideklarasikan, Affan kembali mengadakan pertemuan aktivis pers mahasiswa dengan nama Sarasehan FKPM. Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 1992 di Universitas Brawijaya.

Sarasehan FKPM diadakan untuk mempersiapkan beberapa hal terkait pendirian PPMI serta pemilihan koordinator FKPM yang dipercayakan kepada Yunan Saifulla dari Dimek (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang). Acara tersebut diikuti oleh aktivis pers mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang seperti IKIP PGRI, Universitas Gajayana, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Widya Gama, STIKI, IAIN, dan Universitas Islam Malang.



**Gambar 5 Sarasehan FKPM yang dimuat dalam Majalah Dianns pada Edisi 25 Desember 1992.** Sumber: Facebook Heyder Affan

Asep Wahyu<sup>20</sup> menjelaskan bahwa UAPKM memiliki hubungan baik dengan PR III yang menghasilkan hal positif seperti ijin untuk mengadakan lokakarya penerbitan dan diterbitkannya majalah Ketawanggede pada bulan Juli 1992;

“Waktu itu saya, mas Rohman, sangat dekat dengan PR III. Dalam setiap kesempatan (Sore jam 2-4) kami dan beberapa teman sering menemui beliau untuk “berdiskusi” mengenai berbagai hal. Beberapa hasil “lobby” itu menghasilkan kegiatan jurnal pimnas, semiloka penanganan ospek, proyek Majalah Kampus yang kemudian bernama Ketawanggede, serta lokakarya nasional pers mahasiswa se Indonesia (lahirnya PPMI).” (Wawancara Asep Wahyu, Jum’at, 11 November 2016).

“Ya, karena hubungan baik dengan PR III yang agak progresif. Juga ada dukungan dana dari kampus. Selebihnya, ya karena kerja keras teman-teman Kavling 10 untuk meyakinkan delegasi kota-

<sup>20</sup> Asep Wahyu merupakan Ketua UAPKM pada tahun 1992-1993. Selain itu dia pernah menjadi PU/Pimred Mafaterna (Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya) pada tahun 1991-1992. Majalah Ketawanggede UAPKM lahir pada masa kepemimpinannya. Asep Wahyu menjadi Pemimpin Umum Ketawanggede pada edisi ke 3, dan menjadi Presidium Jawatimur pada PPMI periode 1993-1995

kota lain, bahwa UB layak jadi tuan umah.” (Wawancara dengan Rohman Budiyanto, Rabu, 14 Desember 2016).

Selain karena kedekatan dengan PR III, Wignyo Adiyoso<sup>21</sup> menjelaskan strategi yang digunakan UAPKM agar mendapatkan ijin dalam mengadakan lokakarya tersebut. Dengan kondisi pemerintah di era Orde Baru yang mengontrol aktivitas kemahasiswaan lewat rektorat, UAPKM UB melakukan perubahan mendasar yang cukup signifikan dalam mempersiapkan acara tersebut seperti tidak menggunakan kata “pers” melainkan kata “penerbitan”. Arismunandar (2005, h. 19) menyampaikan bentuk “*campur tangan*” pemerintah melalui Permenpen RI No.1/Per/Menpen/1975 dan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 849/D/T/1989 yang menggolongkan aktivitas pers mahasiswa sebagai penerbitan khusus non-pres. Dengan peraturan tersebut pergantian kata “pers” menjadi “penerbitan” mulai ditetapkan.

Pers mahasiswa di kota Malang termasuk Moderat menurut Affan. Meskipun beberapa aktivis menyatakan keberatan dengan perubahan nama tersebut, namun untuk kebaikan bersama dan sebagai upaya kompromi dengan rektorat, para aktivis UAPKM tidak begitu mempermasalahkan penggunaan istilah tersebut demi mendapatkan izin dalam mengadakan acara serta mendapatkan bantuan dana;

“...jadi anak persma Malang itu termasuk Moderat, kalau pakek spektrum Radikal, Moderat, kita termasuk yang Moderat. Kita sampai pada suatu titik “*sudahlah jangan sampai mempermasalahkan istilah*”, meskipun kita pakek istilah esensinya kita tetap jadi pers, jangan berkutut pada itu lah kita

<sup>21</sup> Wignyo Adiyoso merupakan aktivis pers mahasiswa era 1990an. Mengawali karirnya di dunia jurnalistik dengan bergabung ke Dianns pada tahun 1991, di tahun yang sama saat kepemimpinan Buchori di UAPKM wigyo memutuskan untuk bergabung. Pernah menjadi delegasi Jatim dalam steering committee Kongres I PPMI pada tahun 1993 di Kaliurang.

jalan saja. Seingatku itu salah satu penyebab kenapa kita gak terlalu mempermasalahkan istilah pers mahasiswa atau penerbitan, meskipun ada diskusi juga tapi tetap aja kita berbenturan pada birokrasi kampus. Kita pakai penerbitan supaya bisa kompromi dengan pihak rektorat, bisa gak dapet dana juga kan, gak boleh ngadain acara, karena mau gak mau Unitas kan dibawah rektorat. Yaudah kita terima penerbitan.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

Dengan cara tersebut Rohman Budianto menilai kata penerbitan mahasiswa sebagai penerbitan yang amatir, seperti publikasi humas dan tidak mengandung daya kritis layaknya pers mahasiswa. Aktivis pers mahasiswa UAPKM UB menjadikan kegagalan penyelenggaraan Pra-Kongres PPMI yang diselenggarakan oleh Isola Pos IKIP Bandung pada tahun 1991 sebagai pelajaran agar kejadian tersebut tidak dialami oleh UAPKM UB selaku tuan rumah Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia. Heyder Affan menambahkan strategi terselubung yang digunakan UAPKM UB bahwa, Kongres Pembentukan PPMI (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia) dikemas secara terselubung dalam acara Diklatsar Jurnalistik X se-Jawa Timur dan Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia pada bulan Oktober 1982.



**Gambar 6** Luapan kebahagiaan dari para aktivis pers mahasiswa setelah dideklarasikannya PPMI di Universitas Brawijaya pada tahun 1992. Sumber: Facebook Heyder Affan

Dengan berkompromi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, UAPKM UB berhasil mengadakan Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia dan Diklatsar Jurnalistik Mahasiswa X se-Jatim pada 12-18 Oktober 1992. Acara tersebut diikuti oleh 72 peserta dari 37 PTN dan PTS se-Indonesia. Hasilnya terealisasi dalam sebuah pernyataan bergabungnya lembaga penerbitan mahasiswa (LPM) yang ada di perguruan tinggi dalam organisasi baru yang bernama PPMI (Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia) pada 15 Oktober 1992 pukul 16.29 WIB. PPMI sebagai akumulasi obsesi sejarah pers mahasiswa hadir pada saat yang tepat. Setelah beberapa waktu melalui jalan yang panjang, dengan demikian pernyataan bersama ini menandai berakhirnya kerinduan pers mahasiswa membentuk wadah baru.

#### 4.2.2 Ketawangede, Langkah Baru yang Bersejarah (1992-1994)

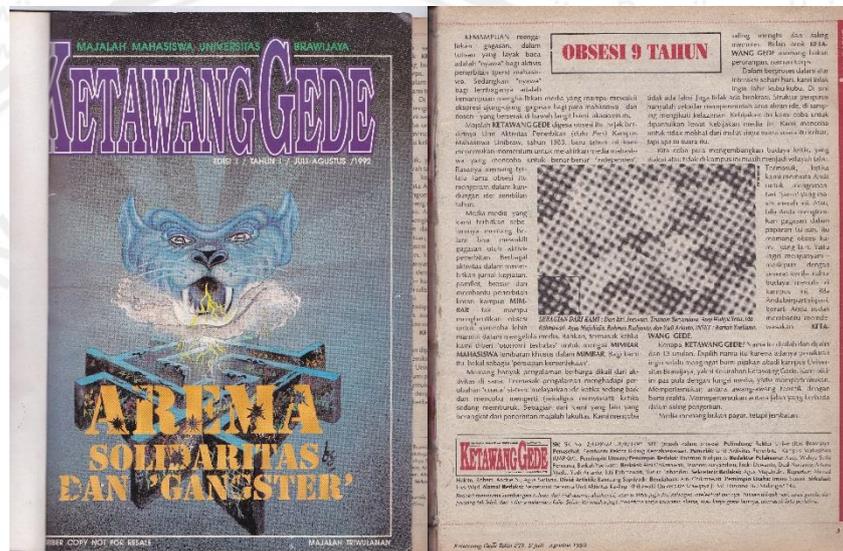
Pers mahasiswa sebagai organisasi media memiliki wewenang dalam menentukan format produk media yang ingin digunakan. Buletin, surat kabar, tabloid, majalah dan sebagainya merupakan bentuk media massa yang bisa diterapkan pers mahasiswa dalam menulis ide, menyampaikan informasi dan menyalurkannya kepada pembaca (Abrar, 1992, h. 50). Hal tersebut yang tidak bisa dirasakan oleh anggota UAPKM pada dekade 1980an karena UAPKM tidak memiliki produk terbitan saat itu.

Aktivitas anggota UAPKM dalam hal jurnalistik lebih mengarah pada sarana berlatih jurnalistik dengan menjadi reporter untuk koran kampus *Mimbar* atau menerbitkan jurnal kegiatan seperti *jurnal ospek*, *jurnal pimnas*, yang sifatnya masih bergantung pada suatu kegiatan;

“Saya bersama teman-teman Kavling 10 juga pernah membuat jurnal turnamen sepak bola mahasiswa antarperguruan tinggi, yang tuan rumahnya UB. Selama sekitar 10 hari, terbit setiap hari, 4 halaman, dengan dilayout komputer, *software* awal (WS) dan dicetak dengan mesin sheet (stensil). Siang pertandingan, malam dilayout, dini hari dicetak. Diedarkan gratis di stadion.” (Wawancara Rohman Budianto, Rabu, 14 Desember 2016).

Sejak berdiri hingga tahun 1992, UAPKM mengasah kreatifitas jurnalistiknya pada *Mimbar*, koran kampus yang dikelola oleh Humas Universitas Brawijaya. Meskipun titik kompromi terjalin dengan hadirnya *Mimbar Mahasiswa* pada halaman tengah *Mimbar*, namun idealisme yang menjadi dasar dari pers mahasiswa menuntut UAPKM memperjuangkan independensinya dengan memiliki media secara mandiri. Abrar (1992, h. 26) menyebut idealisme dalam pers mahasiswa sebagai suatu pegangan. Dengan idealisme pers mahasiswa menjadi

yakin terhadap keberadaan tujuan sosialnya. Merill dan Lowenstein (dalam Nurudin, 2010, h. 21) berpendapat bahwa media massa pada umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku, sementara sistem pers tunduk pada sistem politik yang ada. Dalam lingkup universitas, kedudukan pers mahasiswa memiliki kesamaan dengan pers umum, tidak bisa berdiri sendiri dan sama-sama bergantung pada sistem sosial yang berlaku di lingkungan yang lebih makro yaitu universitas.



Gambar 7 Cover majalah Ketawanggede dan halaman keredaksian pada edisi I bulan Agustus 1992

Sumber: Arsip UAPKM UB

Majalah *Ketawanggede* terbit perdana pada bulan Juli 1992.

Majalah tersebut lahir karena kedekatan hubungan antara UAPKM UB dengan PR III pada saat itu. Kondisi yang tercipta memang memungkinkan majalah *Ketawanggede* hadir dengan membentuk sejarah baru bagi UAPKM UB. Terbitnya majalah *Ketawanggede* saat itu seakan-akan sebagai awalan dalam masa kejayaan UAPKM UB pada dekade 1990an, disusul dideklarasikannya PPMI pada Lokakarya

Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia pada 15 Oktober 1992. Bahkan pengantar dari UAPKM pada halaman pertama tertulis “Obsesi 9 Tahun” yang menandakan pencapaian anggota UAPKM dalam memperjuangkan media mahasiswa yang benar-benar independen.

“Teman-teman di fakultas-pun sejak awal memang sudah bermain dengan format majalah yang pendanaannya rutin diperoleh dari fakultasnya masing-masing. Pointnya, bukan suatu ukuran keterbelakangan kalau UAPKM terlambat menerbitkan format majalah. Justru ketika teman-teman aktivis UAPKM berinisiatif menerbitkan majalah *Ketawanggede* secara mandiri / tidak bergantung dana birokrasi Universitas, itu adalah sebuah terobosan kreatif mahasiswa yang berusaha menjaga independensi pers mahasiswa kala itu”. (Wawancara Dedi Nurtanio, Rabu, 8 Juni 2016).

Untuk menjaga independensinya, UAPKM menggunakan dana secara mandiri dalam menerbitkan majalah *Ketawanggede*. Secara resmi memang tidak ada dana dari rektorat dalam pengalokasian majalah *Ketawanggede*, namun anggota UAPKM menyalurkan dana tersebut dari anggaran lain, sponsor dan sumbangan anggota atau kas UAPKM;

“Memang mandiri, tidak pakai proposal karena tidak ada pos dana untuk *Ketawanggede*. Pos dana biasanya untuk pelatihan, kegiatan rutin organisasi, sementara untuk penerbitan sudah difasilitasi via *Mimbar Mahasiswa* sebagai suplemen dari koran kampus *Mimbar*.” (Wawancara dengan Yudi Ariyanto, Jum’at, 7 Juli 2017).

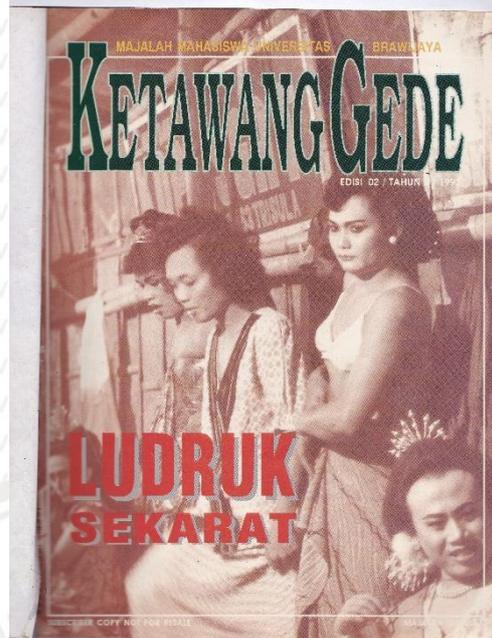
Nama *Ketawanggede* merupakan kesepakatan bersama yang terpilih dari 13 usulan. Nama tersebut dipilih karena adanya pemikiran ingin selalu mengingat bumi pijakan abadi kampus Universitas Brawijaya, yaitu Kelurahan Ketawanggede. Bentuk aktivitas penerbitan sebelumnya seperti menerbitkan jurnal kegiatan, pamflet, brosur, bahkan saat diberikan “otonomi terbatas” dalam bentuk *Mimbar*

*Mahasiswa* masih dianggap belum mewakili gagasan utuh aktivitas penerbitan. Berbagai sambutan positif aktivis pers mahasiswa<sup>22</sup> yang tersebar di Indonesia terdengar dan dimuat pada rubrik *Perhatian*, menggambarkan keaktifan anggota UAPKM dalam membangun jejaring antar aktivis pers mahasiswa;

“Oh iya edisi pertama tentang Arema kalau nggak salah. Ini adalah edisi fenomenal. Semua penelitian tentang Arema di Malang salah satu referensinya ya ini, saya masih punya ini. Coba dilihat ini, majalah-majalah jaman itu seperti majalah Tempo, dalam lingkup mahasiswa loh ya. Saya masih punya beberapa majalah mahasiswa di Malang pada umunya jaman dulu. Ya memang masing-masing kampus berbeda cara penulisannya. Makin kuat aktivis secara intelektual, secara ideologi, secara perjuangannya cara nulisnya beda dengan mereka yang sekedar iseng jadi aktivis.” (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015)

UAPKM UB mengawali majalah *Ketawanggede* dengan tema “Arema, Solidaritas dan Gangster”. Secara sadar atau tidak, penentuan tema, penulisan berita, serta berbagai hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan redaksional dipengaruhi oleh realitas sosial dimana pers mahasiswa tersebut berada, artinya secara umum pers mahasiswa sebagai organisasi media diasumsikan tidak benar-benar berdiri sendiri. Kehadiran majalah *Ketawanggede* edisi pertama terbukti laris dan banyak mendapatkan pujian. Hal tersebut menjadi penyemangat sekaligus beban moral bagi anggota UAPKM untuk menghadirkan majalah *Ketawanggede* yang lebih baik pada edisi selanjutnya.

<sup>22</sup> Muzakir Tombolotutu (Tabloid FORMAT) Universitas Tadulako-Palu, MD Arif (ERYTRO) LPM Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret-Surakarta, Riduan (MEDIA) Universitas Mataram-NTB, Susila Dharma (Tabloid SAS) Fakultas Sastra Universitas Jember, Abdul Rahman Ma'mun (BALAIRUNG) UGM-Yogyakarta, Tugas Supriyanto (ISOLA POS) Koran Kampus IKIP Bandung, Wasis Sasmito (PRIMA) Fisipol Universitas Jember, Tri Suparyanto (PENDAPA) Universitas Sarjana Wiyata-Yogyakarta, dan Rijal Islami (WARTA ANDALAS) Universitas Andalas-Padang.



Gambar 8 Cover majalah *Ketawanggede* edisi ke II, *Ludruk Sekarat* pada tahun 1993.

Sumber: Arsip UAPKM UB

Setahun kemudian majalah *Ketawanggede* hadir dengan konsep yang berbeda. Terjadi perubahan tema pada proses majalah *Ketawanggede* kali ini. Investigasi yang sudah ditetapkan pada rapat redaksi tentang *Lustrum*, diganti dengan tema sosial budaya yang begitu lekat dengan masyarakat Jawa Timur yaitu *Ludruk*. Rubrik<sup>23</sup> pada edisi kedua lebih banyak, berbagai tokoh nasional dari politikus, pengamat sosial, budayawan, maupun tokoh agama seperti Ali Sadikin, Princen, Dawam Raharjo, Gus Dur, Rahman Tolleng dihadirkan dalam bentuk tulisan pada majalah *Ketawanggede* edisi ke dua.

<sup>23</sup> Asap Dapur, Perhatian, Riak Kampus, Praksis, Manuskrip, Tafsir, Alumni, Esai, Tokoh, Fenomena, Resensi, Sensasi, Rehal, Dimensi, Budaya, Riset.



Gambar 9 Pricnen dan Ali Sadikin dalam rubrik tafsir dan percakapan. Sumber: Arsip UAPKM UB

Majalah *Ketawanggede* edisi ke dua tertunda selama 6 bulan dari jadwal yang semestinya. Hal tersebut disebabkan karena Lokakarya Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia, sehingga pengelola majalah *Ketawanggede* kurang fokus dan lebih memprioritaskan tenaga dan pikirannya dalam mempersiapkan acara yang melahirkan PPMI tersebut. Masalah lain yang dialami UAPKM lebih kepada teknis;

“Seingat saya lebih banyak masalah saja waktu itu. Utamanya adalah peliputan yang memerlukan narasumber dari berbagai macam latar belakang dan lokasinya juga tidak semua di Malang. Semua itu karena penanggung jawabnya (Muhammad Zen), orang nya perfeksionis. Jadi prosesnya memang agak lama.” (Wawancara Wignyo Adiyoso, Rabu, 12 April 2017)

UAPKM memanfaatkan majalah *Ketawanggede* edisi ke dua dengan menghadirkan Buklet tentang pembentukan PPMI dengan tujuan mensosialisasikan adanya pembentukan wadah baru bagi pers mahasiswa di tingkat nasional.



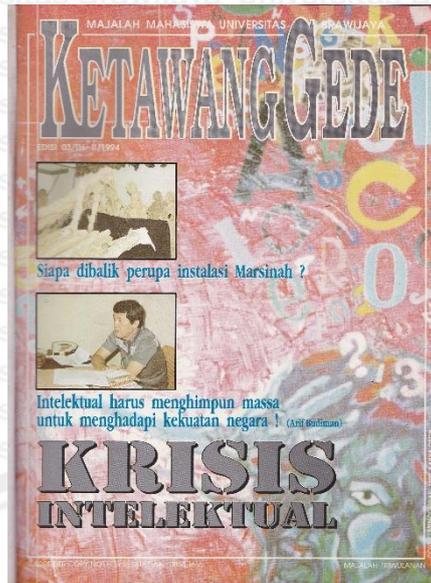


Gambar 10 Buklet sejumlah 8 halaman yang disisipkan di majalah Ketawanggede edisi ke II pada tahun 1993. Sumber: Arsip UAPKM UB

Pada kepemimpinan Yudi Arianto (1993-1994), majalah *Ketawanggede* edisi ke tiga kembali beredar. Saat itu yang menjadi Pemimpin umum adalah Asep Wahyu. Hadir dengan tema ‘Krisis Intelektual’, majalah ini menjadi edisi terakhir *Ketawanggede* karena peredarannya ditarik oleh rektorat. Rumor yang beredar sampai saat ini belum jelas, sebagian ada yang berpendapat karena pemberitaannya yang dinilai terlalu kritis pada saat itu;

“Memang kalau aku melihat itu, ada semacam “radikalisasi” masa-masa itu, mulai masuk 1991 sangat radikal kita. Karena di Unitas waktu itu, teman-teman gerakan istilah kita dulu, jadi dulu kan terpisah antara demonstran dengan pers kampus, seolah-olah kita punya wewenang dan tugas yang berbeda, tapi setelah jaman Buchori kita jadi satu, jadi semacam ada titik temu. Kita nyebutnya teman-teman gerakan atau forkom malang. Dulu kan sangat sedikit yang unjuk rasa, temen-temen BEM gak ada yang berani demo, mereka udah berani.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).





Gambar 11 “Krisis Intelektual”, majalah Ketawanggede edisi ke III pada tahun 1994.

Sumber: Arsip UAPKM UB

Dalam hal kebijaksanaan redaksional, konten suatu berita dapat dipengaruhi berbagai faktor salah satunya *ekstra media level* yang berhubungan dengan lingkungan luar organisasi media seperti, sumber informasi media atau kelompok kepentingan yang ingin menginformasikan isu-isu tertentu, *Public Relation*, kantor berita, pemasang iklan, audien dan institusi sosial seperti pemerintah, perusahaan dan pemilik modal, dalam lingkup pers mahasiswa seperti pihak rektorat, Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) (Shoemaker dan Resse, 1996, h. 64).

Supriyanto (1998, h. 70) melihat pers mahasiswa pada tahun 1960an berubah menjadi kegiatan politik yang penuh provokasi, agitasi, dan pengutamaan nilai-nilai kelompok. UAPKM UB yang hidup pada masa NKK/BKK cenderung bergerak dalam tataran internal saja, tidak terlibat dalam politik praktis (partai) seperti pers mahasiswa pada

masa awal Orde Baru, namun kondisi yang berkembang pada saat majalah *Ketawanggede* berdiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara pers mahasiswa dan gerakan mahasiswa;

“Kekuatan di Malang 1980an hingga 1990an adalah ketika terjadi perkawinan kata istilah teman-teman saat itu, ketika terjadi perkawinan antara gerakan mahasiswa dan pers mahasiswa. Gerakan mahasiswa kan lingkupnya 2, ada yang tipologi mereka yang aktivis lembaga kajian, yang nanti dedikasinya aktivis-aktivis LSM, sama kelompok cipayung (GMNI, PMII, HMI, GMKI dll).” (Wawancara Yunan Saifullah, Rabu, 25 Maret 2015).

“Pada suatu titik kita ketemu ide itu, temen-temen gerakan aktif juga di pers kampus, di UB. Jadi melalui diskusi kita sepakat bahwa *“sebenarnya kita itu sama, gak ada yang beda, gak bisa kita murni Cuma memberitakan”*. Dari situ ada titik pertemuan yang menyebabkan temen-temen semakin radikal gitu temen-temen UPKM saat itu dan mungkin ujungnya pada saat majalah *Ketawanggede* gak bisa terbit lagi.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

Rohman Budiarto membenarkan bahwa anggota UAPKM memang heterogen dan memiliki latar belakang OMEK, namun terdapat istilah ‘lepas jaket’ ketika berada di UAPKM, artinya anggota yang berafiliasi dengan OMEK tidak boleh membahas dan mencampurkan kepentingan golongannya saat melakukan aktivitas di pers mahasiswa agar independensi dari UAPKM tetap terjaga. Yudi Ariyanto juga menambahkan bahwa ideologi sebagai pers mahasiswa lebih kuat dibandingkan dengan OMEK;

“Latar belakang aktivis UAPKM tidak pernah menjadi masalah, apapun latar belakangnya. Karena ideologi sebagai pers mahasiswa lebih kuat dibandingkan dengan OMEK tersebut. Ideologi pers mahasiswa yang justru ‘mewarnai’ OMEK dibandingkan dengan sebaliknya.” (Wawancara dengan Yudi Ariyanto, Jum’at, 7 Juli 2017).



Gambar 12 Rubrik *Anekdot* & Karikatur yang dipermasalahkan menurut Asep Wahyu pada Majalah *Ketawanggede* edisi ke III tahun 1994. Sumber: Arsip

UAPKM UB

Asep Wahyu memaparkan kronologis penarikan majalah *Ketawanggede* edisi ke tiga tersebut. Pada saat acara Diklatsar Jurnalistik XII se Indonesia yang diadakan UAPKM UB, salah satu peserta dari Sulawesi Selatan menganggap konten di rubrik *anekdot* sebagai pelecehan agama. Dari acara tersebut, isu semakin bergulir dan sampai pada Bakorstanasda<sup>24</sup> (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah). Akhirnya Asep Wahyu dipanggil PR III dan diminta untuk menarik seluruh majalah yang telah beredar serta tidak mengedarkannya lagi.

<sup>24</sup> Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dihapus dan digantikan dengan suatu badan lain yang dinamakan Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (Bakorstranas). Bakorstranas merupakan wadah koordinasi yang bersifat non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di tingkat daerah disebut Bakorstanasda (Daerah) dan dipimpin Panglima Komando Daerah (Pangdam) setempat.



**Gambar 13** Layout dalam rubrik *percakapan* dan cover halaman belakang yang dipermasalahkan menurut Asep Wahyu pada majalah *Ketawanggede* edisi ke III tahun 1994. Sumber: Arsip UAPKM UB

Ada beberapa konten yang ‘agak rawan’, baik secara religi maupun secara ideologi. Berawal dari rubrik *anekdot* yang dinilai melecehkan agama, berlanjut ke hal lain seperti Karikatur, laporan layout pada tulisan yang berjudul ‘Saya tak Berani Mimpi seperti PKI’ di rubrik *percakapan*, serta halaman akhir berupa grafiti yang dinilai banyak mengandung unsur pemberontakan;

“Saat itu saya sebagai PU (Pemimpin Umum) yang bertugas menyortir/ menentukan konten majalah. Karena saat itu saya sebagai presidium PPMI untuk Jawa Timur, jadi hanya sempat mengecek ke percetakan (Surya) dari layoutnya saja. Mengenai isi detailnya saya hanya membaca sekilas. Untuk konten saya percayakan pada Pemred, saat itu Iswandi Jr.

Kekurangan redaksi adalah tidak mencantumkan sumber dan peristiwa dalam anekdot tersebut sehingga, dipahami sebagai produk langsung dari redaksi. Sebenarnya anekdot itu disampaikan oleh tokoh-tokoh penting seperti Gus Dur misalnya.” (Wawancara Asep Wahyu, Jum’at, 11 November 2016).

Secara resmi majalah *Ketawanggede* tidak dibredel, karena tidak ada surat mengenai pembredelan tersebut, tapi peredarannya tidak difasilitasi lagi oleh rektorat. Penarikan majalah secara publik di toko buku dan tempat penjualan resmi dilakukan agar isunya tidak meluas, namun di kalangan aktivis majalah tersebut tetap beredar secara diam-diam. Dari beberapa rumor, ada 8 anggota UAPKM UB yang masuk daftar pengawasan Bakorstanasda. Berkat hubungan baik yang terjalin pada saat itu, PR III memberikan perlindungan kepada Asep Wahyu dengan berbohong kepada Bakorstanasda dan mengatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah dikeluarkan dari kampus.

#### 4.3 Mimbar Mahasiswa sebagai Media Alternatif



Gambar 14 Mimbar Mahasiswa yang berada di bagian tengah koran kampus mimbar tahun 2007. Sumber Arsip UAPKM

*Mimbar* merupakan koran kampus Universitas Brawijaya yang dikelola oleh Humas sejak tahun 1971. Menurut Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Brawijaya (2008, h. 83) *Mimbar* merupakan satu-satunya koran yang terbit di Kota Malang saat itu dan koran kampus di Indonesia yang tidak pernah berhenti terbit selama 4 dasawarsa hingga mencapai edisi ke 353 pada tahun 2008. Selain berisi berita tentang kegiatan

di Universitas Brawijaya, *Mimbar* juga menghadirkan reportase, *feature*, dan artikel-artikel ilmiah populer serta editorial yang berisi opini redaktur tentang isu-isu hangat, dan pojok yang berisi komentar atau sindiran halus mengenai berbagai hal. Meskipun dikelola oleh Humas, *Mimbar* sebagai pers kampus juga melibatkan mahasiswa, khususnya yang tergabung dalam UAPKM UB dan seluruh civitas akademika dalam penerbitannya. UAPKM UB (Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Universitas Brawijaya) didirikan pada tahun 1983 dengan SKK no. 002/SK/BKK/1983. Selain untuk mendukung koran kampus *Mimbar*, dibentuknya UAPKM UB dilatarbelakangi oleh tidak tersedianya wadah untuk menampung hasil diskusi-diskusi di Fordi mapelar (Forum Diskusi Mahasiswa Pengembang Penalaran). Itu sebabnya, para pendiri UAPKM tersebut mayoritas mahasiswa yang juga tergabung dalam Fordi mapelar;

“...memang kavling 10 dibangun untuk mendukung *Mimbar*. Jadi ada dua penyebab kavling 10 dibangun. Pertama menampung aspirasi dari Fordimapelar yang banyak itu, yang kedua untuk mengembangkan koran kampus kita. Jadi berawal dari diskusi-diskusi fordin dan menjadi wadah dari hasil diskusi, sekaligus berkembang dan merekrut anggota-anggota dari luar fordin, melatih teman-teman untuk bisa nulis. Lama-lama kita bikin organisasi, supaya bisa menghimpun teman-teman yang bisa menulis itu. Tapi perlu adik tahu, sebelum Kavling 10, Fordimapelar sudah berdiri 1 tahun sebelumnya. Jadi biasanya dulu sih, anggota fordin merangkap sekaligus anggota Kavling 10”. (Wawancara Mondry, Senin, 24 Februari 2014).

Terjalin kerjasama antara UAPKM UB dengan *Mimbar*. Djanalis Djanaid menjabarkan bentuk kerjasama tersebut sebagai simbiosis mutualisme, *Mimbar* membutuhkan bantuan UAPKM karena banyak anggota UAPKM yang membantu *Mimbar* dalam mengumpulkan berita dengan bertindak sebagai reporter, sedangkan UAPKM membutuhkan *Mimbar* sebagai wadah berlatih

dalam hal jurnalistik. *Mimbar* merupakan anggota IPMI dan sempat menjadi tuan rumah dalam acara Lokakarya Pola Pendidikan dan Pengembangan Pers Kampus/Mahasiswa se-Indonesia yang merupakan bentuk kerjasama dengan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi pada bulan februari 1997. Pada saat itu konsep antara pers kampus dan pers mahasiswa masih belum begitu jelas sehingga, hasil yang tercetus dalam pertemuan tersebut berupa pembatasan mengenai pers mahasiswa dan pers kampus. *Mimbar* kurang pas disebut sebagai pers mahasiswa karena ideologi dan visinya tidak mencerminkan idealisme mahasiswa. Posisi *Mimbar* sebagai pers kampus Universitas Brawijaya hanya sebagai penyedia wadah bagi anggota UAPKM dalam menyalurkan minat dalam bidang jurnalistik, oleh karena itu pada saat pembentukan PPMI bahkan saat FKPM didirikan *Mimbar* tidak berkontribusi karena UAPKM UB yang lebih tepat berperan saat itu sebagai pers mahasiswa di tingkat universitas.

Hubungan antara UAPKM UB, *Mimbar* dan LPM Fakultas saat itu memang bagus. Mahasiswa bebas memilih untuk aktif di LPM fakultas, UAPKM, maupun koran kampus *Mimbar*. Mayoritas penggiat pers mahasiswa di Universitas Brawijaya pada tahun 1980an pernah aktif dan masuk di *Mimbar*. Affan memaparkan saat dia terlibat di *Mimbar* sebagai karikaturis;

“Jadi aku dulu pertama kali bikin karikatur untuk menggantikan karikatur yang lama, yang isinya kurang greget gitu. Itu sekitar 1989. Setelah itu Headlinenya, sebelum ada *Mimbar* Mahasiswa, kita lobby “*pak kita harus dipercaya bikin Headline, bikin laporan utama, kalau bisa jangan pidato Rektor aja*”. Rohman, Wiyono itu yang termasuk meloby sebelum ada *Mimbar* Mahasiswa.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

“...saya dan kawan-kawan Kavling 10 juga mengisi Mimbar, koran kampus. Lumayan satu berita dihonori Rp 6.000. Bisa termuat dua atau tiga berita, alhamdulillah. Waktu itu kiriman dari orang tua saya Rp 50.000 per bulan (SPP masih Rp 120.000 per semester). Saya kadang juga menulis di koran umum, seperti Jawa Pos dan Surabaya Post. Honorinya lumayan, Rp 60.000 per tulisan opini. Bisa untuk beli buku.” (Wawancara Rohman Budianto, Rabu, 14 Desember 2016).

UAPKM memiliki fleksibilitas dalam menuliskan berita yang akan diangkat, tidak terpengaruh pada pemfokusan bidang keilmuan, seperti yang dialami pada pers mahasiswa fakultas. Namun pada kenyataannya sejak berdiri pada tahun 1983-1992 UAPKM menggunakan *Mimbar* sebagai media utama dalam menuangkan kreatifitas jurnalistiknya sehingga anggota UAPKM harus mematuhi ketentuan yang dibuat oleh *Mimbar* sebagai koran kampus yang dikelola oleh Humas. Di satu sisi UAPKM berperan sebagai pers mahasiswa namun tidak memiliki media dan kondisi yang ada sebelum majalah *Ketawanggede* lahir lebih ke arah sarana berlatih jurnalistik, mengasah kemampuan jurnalistik dengan menjadi wartawan koran kampus *Mimbar*. Meskipun demikian, anggota UAPKM sudah memiliki pengalaman dalam mengelola penerbitan di fakultasnya masing-masing karena sebagai pers mahasiswa tingkat universitas, UAPKM menjadi tempat berkumpul para aktivis pers mahasiswa dari berbagai LPM fakultas di Universitas Brawijaya.

Posisi UAPKM UB sebagai pers mahasiswa di Universitas Brawijaya secara otomatis harus tunduk dan patuh akan kebijakan yang dikeluarkan oleh rektorat. Jika diibaratkan sebagai negara, universitas juga memiliki elemen-elemen pembentuk seperti pemerintah yang diperankan oleh rektorat atau dekanat untuk lingkup fakultas, mahasiswa sebagai masyarakat dan pers mahasiswa sebagai media masa. Abrar (1992, h. 8) mengatakan dalam

kedudukan seperti itu, pers mahasiswa memiliki posisi yang sama dengan pers umum, tidak memiliki kehidupan mandiri, dipengaruhi oleh sistem sosial yang berlaku di lingkungan universitas;

“Khusus di UB, hubungan kita dengan rektorat meskipun tidak dapat dikatakan mulus, termasuk yang baik-baik. Kita teman-teman setidaknya hampir semua satu suara dan kompak terkait ideologis, garis dan pendekatan perjuangan. Tidak kompromis namun juga tidak frontal. Kita lebih banyak menggunakan taktik “tarik ulur”, terutama dengan PR III. Waktu itu yang sangat jelas menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan rektorat untuk melakukan represi kepada aktivitas kampus. Kadang-kadang kita dekat, pada saat yang lain kita juga menjaga jarak bahkan menentang.” (Wawancara Wignyo Adiyoso, Rabu, 12 April 2017)

Pada masa kepemimpinan Suyoto (1989-1990) terdapat perkembangan progresif yang dialami UAPKM UB. Upaya dari beberapa anggota dalam memperjuangkan independensi medianya. Sejak saat itu, terdapat halaman khusus bagi anggota UAPKM di bagian tengah *Mimbar* bernama *Mimbar Mahasiswa*. Nurtanio mengatakan dalam hal keredaksian di *Mimbar Mahasiswa* relatif lebih bebas dalam hal tema dan penulisannya jika dibandingkan dengan *Mimbar*;

“Pak, kita harus swasembada dong, kita kan pers mahasiswa, kita harus diberikan wewenang yang lebih besar gitu”. Tapi pak Djanalis di bagian Humas itu menolak, akhirnya titik komprominya ya *Mimbar Mahasiswa* lif. Dikasih Suplemenlah, ya karena mereka gak mau melepas MIMBAR, gak bisa ini bagian dari struktur Humas. Akhirnya, oke kita beri suplemen, namanya *Mimbar Mahasiswa*, di bagian Tengah majalah MIMBAR.” (Wawancara Heyder Affan, Selasa, 11 November 2014).

Lebih lanjut Affan menjelaskan setelah adanya *Mimbar Mahasiswa*, pemberitaan yang dituliskan oleh UAPKM UB bersifat lebih radikal dan cenderung lebih kritis jika dibandingkan dengan *Mimbar* karena keredaksian yang berbeda, bahkan penentuan headline dan layout sepenuhnya diserahkan kepada UAPKM sebagai pengelola *Mimbar Mahasiswa*. *Mimbar* sebagai koran kampus dikelola oleh Humas Universitas Brawijaya dengan pendanaan

dari Universitas dan Iklan. Anggota UAPKM yang aktif mengisi di *Mimbar* mendapatkan honor dari *Mimbar*, bahkan sampai *Mimbar Mahasiswa* ada, sistem honor masih diberikan kepada redaksi *Mimbar Mahasiswa* saat itu. Dengan kondisi seperti itu bukan berarti UAPKM tidak menjaga independensinya sebagai pers mahasiswa di tingkat universitas karena dalam mengisi *Mimbar Mahasiswa*, UAPKM memiliki keredaksian yang berbeda dengan *Mimbar*. Dengan adanya *Mimbar Mahasiswa*, anggota UAPKM semakin termotivasi untuk berfokus pada penerbitan terbukti dengan diterbitkannya majalah *Ketawanggede* pada tahun 1992.

Pada tahun 1992 UAPKM menerbitkan majalah *Ketawangge*. Majalah tersebut terbit tiap tahun, namun dalam edisi ke tiga (1994) peredaran majalah *Ketawanggede* dihentikan. UAPKM kehilangan orientasi media, dan kembali menggunakan *Mimbar Mahasiswa* sebagai media alternatif;

“Jadi gini, kalau untuk media sendiri, semenjak dibredel ya pada tahun 1994 sampai 2009 itu media kavling cuma ikut *Mimbar* aja. Jadi ada *Mimbar* kampus dan *Mimbar* mahasiswa. *Mimbar* kan yang diterbitkan Humasnya rektorat, kalau *mimbar* mahasiswa itu dikelola sama anak Kavling, tapi terbitnya bareng ada di bagian tengah *Mimbar*. Itu ada kok kita arsipnya, itu jalan terus sampai 2009.” (Wawancara Fadrin Fadhlhan B, Selasa, 15 April 2014).

Pada perkembangannya, kerjasama antara UAPKM dengan Humas lewat *Mimbar Mahasiswa* berjalan cukup lama sampai tahun 2010. *Mimbar* mengalami kekurangan SDM dan penerbitannya mulai tidak teratur sejak tahun 2005. Edisi terakhir *Mimbar* diterbitkan sekitar tahun 2009, namun UAPKM secara resmi masih menjalin kerjasama dengan *Mimbar* hingga tahun 2010 saat Faiz Nasrillah dari UAPKM menjabat sebagai Pemimpin Redaksi *Mimbar Mahasiswa*;

“Soalnya sampai 2010 pas aku jabat itu, kita bahkan masih koordinasi sama Humas soal konten, artinya saat itu kerja redaksi belum berhenti. Kita sebenarnya gak ada kewajiban untuk membantu Mimbar rektorat karena kita juga garap bagian kita sendiri. Nah pas Mimbar ga terbit, kita sempet nawarin tenaga bantuan tapi seingatku gak ada jawaban dari Humas. Selama aku jadi Pemred Mimbar Mahasiswa, ada dua edisi yang kita garap, tapi dua-duanya nganggur gak kepacek, padahal udah layout siap cetak, seingatku gitu.” (Wawancara dengan Faiz Nasrillah, Minggu, 6 Agustus 2017).

Dengan kondisi seperti itu, UAPKM ikut mengalami dampaknya karena secara otomatis *Mimbar Mahasiswa* juga tidak bisa terbit saat *Mimbar* menghentikan penerbitannya. Koordinasi antara UAPKM dengan Humas kurang begitu baik, sehingga kesepakatan mengenai *deadline* antara *Mimbar* dan UAPKM sering menjadi permasalahan dan berujung pada gagal terbit;

“...nah di tahun ini juga diputuskan untuk tak lagi menerbitkan mimbar. Alasannya karena kerjasama dengan rektorat terhambat. Liputan kita sering sia-sia karena bahan *Mimbar* dari rektorat sering tak siap, dan akhirnya berujung batal terbit.” (Wawancara dengan Faiz Nasrillah, Kamis, 18 Mei 2017).

Setelah kerjasama antara UAPKM dengan Humas terjadi, *Mimbar* juga ikut menghentikan penerbitannya dan vakum selama 1 tahun. *Mimbar* kembali terbit pada tahun 2011 dengan format yang semestinya, murni dikelola oleh Humas sebagai media yang berfokus pada pengembangan citra universitas.

#### 4.4 Hambatan Klise Pers Mahasiswa

Secara praktik pers mahasiswa sama halnya dengan pers umum, memiliki manajemen redaksional dan organisasi dalam menjalankan penerbitan mereka. Dalam penerapannya, selain sumber daya manusia, pers mahasiswa juga membutuhkan dana untuk merealisasikan hal tersebut. Berkaitan dengan dana, mayoritas pers mahasiswa di Indonesia masih menggantungkan pendanaannya pada rektorat dan dekanat. Abrar (1992, h. 33) memaparkan

berbagai tantangan yang biasanya dialami pers mahasiswa mulai dari bagaimana menerbitkan media mahasiswa sesuai dengan periodisasi yang sudah ditetapkan, bagaimana menjadikan media mahasiswa membumi di kalangan mahasiswa sampai pada bagaimana mengelola informasi yang tidak tertampung dalam media mahasiswa. Setelah majalah Ketawanggede dihentikan penerbitannya pada tahun 1994, UAPKM UB kembali menggunakan *Mimbar Mahasiswa* sebagai media utamanya. Kerjasama antara UAPKM dan Humas dalam mengelola *Mimbar* berlangsung cukup lama hingga tahun 2010.



Gambar 15 Cover Jurnal Ospek tahun 2008 & Buletin Kronik Kampus edisi XX. Sumber: Arsip UAPKM UB

Setelah reformasi hingga tahun 2005 kiprah UAPKM UB tidak begitu terdengar. Tidak banyak peristiwa penting yang diarsipkan oleh UAPKM UB. Terbitan tahunan yang masih rutin dijalankan hanya *Jurnal Ospek*. *Jurnal Ospek* merupakan produk UAPKM yang diterbitkan setiap hari pada waktu ospek (PK2MABA). Masalah yang sering dialami oleh UAPKM saat menerbitkan *Jurnal Ospek* lebih kepada faktor eksternal organisasi;

“Selain itu, konflik tahunan saat ajang pembagian buletin harian ospek juga menjadi konflik menahun yang tak kunjung usai. Berbagai konflik pernah dialami mulai dari aturan yang menyesatkan dari badan eksekutif

mahasiswa (BEM), penolakan liputan sampai penyuaaraan terhadap penolakan media yang disebar oleh LPM Fakultas. Intinya, permasalahan di LPM masih pada benturan dengan pemegang otoritas.” (Wawancara Ahmad Yani Ali, Selasa, 15 April 2014).

Karya baru berupa buletin hadir sekitar tahun 2006, dengan nama *Kronik Kampus*. Berbagai rubrik seperti *KoKamPOS* (Kronik Kampus Pos), *Analisis Utama*, *Analisis Khusus*, *Framming*, *Cerpen*, *Puisi*, *Event*, *Resensi*, *Advetorial*, dan *Lensa*, dicetak pada kertas berukuran A5 dalam format hitam putih atau *fotocopy*, setiap bulan. Upaya UAPKM untuk menghadirkan media yang *independent* terus diperjuangkan namun kondisi yang ada pada saat itu tidak memungkinkan. Keterbatasan SDM dan minimnya dana yang turun dari rektorat menjadi penghambat anggota UAPKM dalam memperjuangkan media yang *independent*.

Kondisi seperti itu terus berlangsung hingga tahun 2008-2009 disaat Putu Ayu Rindra menjadi ketua UAPKM. Untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami, UAPKM merombak kepengurusan dan membentuk beberapa departemen baru, salah satunya Badan Usaha yang memiliki tugas mencari dana untuk UAPKM. Kerjasama antara UAPKM dan *Mimbar* secara resmi dihentikan pada tahun 2010 pada saat Faiz Nasrillah menjadi Pemimpin Redaksi *Mimbar Mahasiswa*. Fase sulit dialami *Mimbar* berupa keterbatasan SDM sehingga, kesepakatan yang dibangun antara UAPKM sebagai pengelola *Mimbar Mahasiswa* dan Humas tidak terpenuhi dan berujung pada gagal terbit. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, *Mimbar* juga ikut menghentikan terbitannya dan sempat vakum selama 1 tahun.

Rata-rata pers mahasiswa masih mengandalkan subsidi dari rektorat sebagai sumber dana utama dalam penerbitannya. Pemasukan dari iklan

relatif kecil karena pemasang iklan lebih melirik pers umum untuk mempromosikan produknya (Utomo, 2013, h. 65). Keterbatasan dana yang dialami UAPKM tidak menyurutkan semangat aktivis pers mahasiswa dalam menerbitkan media bagi mahasiswa. Media dengan format baru diterbitkan berupa manuskrip tembok yang diberi nama *Ketawanggede*. Manuskrip tembok *Ketawanggede* merupakan media kreatif yang terbit setiap bulan dan didistribusikan ke semua fakultas dengan cara ditempel. Media kreatif ditekankan karena, manuskrip tembok *Ketawanggede* dihadirkan sebagai solusi pada saat buletin *Kronik Kampus* berhenti terbit karena krisis keuangan yang dialami UAPKM UB saat itu. Selain itu, dengan pendistribusian yang unik dengan cara ditempel di dinding setiap fakultas, karikatur dihadirkan sebagai daya tarik untuk meningkatkan minat baca pada mahasiswa terhadap manuskrip tembok *Ketawanggede*;

“Iya setelah ganti kepengurusan dari 2008-2009 ke 2009-2010 kan ada evaluasi tuh, kita lihat *Kronik Kampus* itu terlalu mahal biayanya, dananya juga bantuan dari rektorat masih sangat sedikit. Yang paling memungkinkan ya cuma terbit *Ketawanggede*. Mangkanya *Kronik Kampus* digantikan *Ketawanggede* dalam format baru dilanjutkan. Terlebih lagi dengan target tiap bulan untuk *kronik kampus* susah. Kalau di *Kavling* sendiri tahun-tahun 2000an dikenalnya bukan karena pemberitaannya, tapi terkenal karena layouter, desain sama karikatur, orang-orang pers mahasiswa lain bilanganya gitu.” (Wawancara Fadrin Fadhlhan B, Selasa, 15 April 2014).

Pada masa kepemimpinan Faiz Nasrillah (2011-2012) UAPKM mengalami krisis SDM parah. Saat itu tersisa 4 orang pengurus aktif, mahasiswa angkatan 2008 tersisa 3 orang dan mahasiswa angkatan 2009 hanya 1 orang. Dengan keadaan seperti itu, solusi yang diambil adalah menjadikan anggota baru atau staf magang sebagai pengurus, padahal dalam

keadaan normal, dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menjadi pengurus di UAPKM UB;

“Nah meski secara SDM terpenuhi, tapi ada konsekuensinya, salah satunya kita harus bimbing dari awal. Belajarin nulis sekaligus ngajarin manajemen. Akhirnya memang gak optimal, konflik juga sering terjadi karena beban pengurus jelas lebih besar. Dengan kapasitas mereka yang minim, kemampuan anak baru tentu masih perlu banyak yang diarahin.”  
(Wawancara dengan Faiz Nasrillah, Kamais, 18 Mei 2017).

Sejalan dengan fase sulit yang dialami UAPKM mengenai krisis SDM, majalah *Kavling 10* hadir sebagai media baru demi menjaga eksistensi UAPKM UB sebagai pers mahasiswa di Universitas Brawijaya. Majalah *Kavling 10* merupakan majalah pertama yang berhasil diterbitkan lagi sejak majalah *Ketawanggede* dihentikan penerbitannya pada tahun 1994. Pada awalnya majalah *Kavling 10* dihadirkan dalam bentuk buletin yang diterbitkan setiap 3 bulan. Setelah 3 edisi buletin *Kavling 10* diterbitkan, format baru berupa majalah diterbitkan pada tahun 2012 dengan judul ‘Ekonomi Milik Rakyat’;

“Buletin edisi pertama ya waktu aku masuk itu. Jadi dulu itu proyek anggota baru, awalnya untuk anggota baru (staf magang), awalnya namanya buletin kavling 10, edisi pertama ya untuk anak magang terbit tiap 3 bulan. Setelah terbit 3 edisi, baru ganti ke majalah dan terbit tiap tahun. Prosesnya untuk majalah sudah dari 2011, tapi edisi pertama majalah *Kavling 10* 2012 awal.”(Wawancara Fadrin Fadhlan B, Selasa, 15 April 2014).



Gambar 16 3 edisi Buletin Kavling 10 yang terbit pada tahun 2011. Sumber: Arsip UAPKM UB

Dalam mengatur keredaksian, UAPKM membagi departemen redaksi ke dalam 3 bagian. Ada redaksi *online*, redaksi majalah *Kavling 10* dan redaksi Manuskrip tembok *Ketawanggede*. Masing-masing dari departemen redaksi tersebut memiliki pemred masing-masing. Setelah rapat evaluasi keredaksian, digunakan pemred tunggal yang menaungi 3 departemen dalam redaksi yang berbeda.



Gambar 17 Manuskrip tembok *Ketawanggede*. Sumber: Arsip UAPKM UB

Manuskrip tembok *Ketawanggede* mengalami perubahan format menjadi buletin di tahun 2014 pada masa kepemimpinan Akhtur Gumilang. Alasan yang menyebabkan pergantian format tersebut berkaitan dengan pendistribusian manuskrip tembok *Ketawanggede*. Masalah yang hadir dalam lingkup internal organisasi adalah kurangnya tanggung jawab dari anggota. Redaktur pelaksana kewalahan dalam mendistribusikan manuskrip tembok *Ketawanggede* hingga meminta bantuan kepada anggota lain di luar redaksi *Ketawanggede*. Selain itu, dalam lingkup eksternal organisasi permasalahan disebabkan karena kebijakan tiap fakultas yang berbeda-beda. Proses penempelan manuskrip tembok *Ketawanggede* terkadang terkendala ketika anggota UAPKM tidak diperbolehkan menempel sendiri oleh pihak fakultas dengan dalih pihak fakultas yang akan menempelkan sesuai kebijakan yang berlaku. Terkadang media yang sudah kita tempel di koran dinding fakultas tidak bertahan lama. Oleh karena itu *Ketawanggede* berubah format menjadi buletin.



Gambar 18 Majalah Kavling 10 dari edisi ke I sampai edisi ke III. Sumber: Arsip UAPKM UB

Pada tahun 2014 UAPKM kembali mengalami permasalahan dalam keuangan. Hal tersebut terjadi saat majalah Kavling 10 edisi ke 3 sudah siap

untuk diterbitkan. Faktor penyebabnya karena terjadi pergantian pengurus di bagian kemahasiswaan rektorat sehingga, proposal yang sudah diajukan tidak menemukan kejelasan dan sumbangan dana untuk majalah *Kavling 10* tidak bisa diturunkan. Solusi yang ditawarkan oleh pihak kemahasiswaan saat itu dengan menggunakan jasa percetakan UB press, namun anggota UAPKM sendiri menilai solusi tersebut justru semakin menyulitkan;

“Justru semakin menyulitkan, karena UB pressnya pengerjaannya lama banget, karena kertasnya itu gak dari UB press sendiri, bahkan paling cepet itu 3 bulan, sedangkan kalau di tempat lain kita paling cepet 1 bulan bisa. Edisi pertama cetak 800 eksemplar, edisi ke 2 juga 800, nah di edisi ke 3 target kita 1500 eksemplar.” (Wawancara Fadrin Fadhlhan B, Selasa, 15 April 2014).

Majalah *Kavling 10* hanya terbit 3 edisi, namun untuk buletin *Ketawanggede* masih terus diperjuangkan oleh anggota UAPKM. Buletin yang pada awalnya dikonsep terbit setiap bulan, secara perlahan mengalami kemunduran dalam hal periode terbit. Buletin *Ketawanggede* edisi ke 3 yang diagendakan terbit pada bulan juli terpaksa mundur sampai bulan oktober. Secara keseluruhan buletin *Ketawanggede* berhasil terbit sebanyak 7 edisi. Akhtur Gumilang menerbitkan sebanyak 5 edisi terhitung dari bulan Mei 2014 pada edisi pertama sampai maret 2015 pada edisi ke 5.



Gambar 19 Buletin *Ketawanggede* edisi V dan VII. Sumber: Arsip UAPKM UB

Pada kepengurusan selanjutnya, format buletin masih tetap dipertahankan.

M. Iqbal Yunazwardi menerbitkan buletin *Ketawanggede* sebanyak 2 edisi.

Beberapa masalah terjadi pada tahun 2015 yang berujung pada ancaman pembekuan UAPKM pada tahun 2016. Hubungan UAPKM dengan PR III mulai tidak harmonis berawal dari digantinya delegasi UAPKM pada acara yang diadakan PT. Pelindo secara sepihak oleh PR III;

“Awalnya ada surat dari PT. Pelindo, ditujukan untuk mahasiswa yang aktif atau berkegiatan di pers mahasiswa, selain di persma pokoknya aktif berorganisasi. Pokoknya aktif kemudian berorganisasi cuma diharapkannya di persma. Cuma saat itu entah bagaimana surat itu nyampeknnya ke kita lewat panggilan, jadi mas Iqbal itu dipanggil langsung kesana, tapi dengan niatan baik sih mas dari kemahasiswaan gitu, “ini ada surat, kamu silahkan mendelegasikan seperti itu loh, tapi ini waktunya mepet segera dihubungi ya PT. Pelindonya.” (Wawancara Ainun Syahida, Sabtu, 11 Februari 2017)

Setelah mendapatkan surat tersebut, UAPKM menghubungi PT. Pelindo dan mengkonfirmasi akan mengirimkan 5 orang untuk mengikuti acara yang dipersiapkan. Untuk keperluan birokrasi, anggota UAPKM memerlukan surat keterangan dari kemahasiswaan, namun yang terjadi saat itu pihak kemahasiswaan mengatakan bahwa kuota pendelegasian untuk acara tersebut sudah diambil oleh PR III.



Gambar 20 Edisi perdana buletin Swara Brawijaya. Sumber: Arsip UAPKM

Permasalahan lain muncul pada saat buletin *Ketawanggede* edisi ke tujuh (oktober-november 2015) dipersiapkan. Pada saat itu, PR III mempersoalkan nama buletin tersebut dan menyuruh UAPKM agar menggantinya. Menurut PR III, nama *Ketawanggede* yang digunakan pada buletin UAPKM tidak mencerminkan citra dari Universitas Brawijaya. Setelah mengadakan rapat pengurus dan menyediakan berbagai opsi nama pengganti, PR III menyetujui *Swara Brawijaya* sebagai nama buletin UAPKM;

“Tapi nek singetku, kan kita disuruh ganti nama, trus akhire mas Iqbal mengadakan rapat pengurus, disitu kita ada 4 opsi nama tapi aku lupa namanya apa ae, nanti mungkin tak liat. Trus akhirnya kita bawa 4 nama itu, aku mengajukan 4 nama itu dan pak WR III pilih nama itu. Namanya *Swara Brawijaya*, awalnya kan pakek “U” ya mas, trus pak WR minta pakek “W”, biar lebih jawa mungkin atau *Brawijaya* pakek ‘W’.” (Wawancara Bunga Astana, Sabtu, 11 Februari 2017).

Buletin *Swara Brawijaya* terbit satu edisi pada akhir kepengurusan M. Iqbal Yunazwardi pada bulan januari 2016 dengan menggunakan pendanaan secara mandiri;

“Dari maret sepertinya. Maret 2016. Dari pertama kali Bunga jadi PU ya. Sebelumnya sebenarnya udah di Acc mas, Cuma dibandingkan tahun sebelumnya itu minim banget. Kita biasanya cetak buletin kan 3 juta, tapi pas tahunku cuma 1,5 juta. Itupun untuk cetak minimal, kan ada cetak minimalnya mas di percetakan, gak mencukupi. Akhirnya kita pake kas pribadi.” (Wawancara Bunga Astana, Sabtu, 11 Februari 2017).

Pada akhir september 2016, redaksi UAPKM mengunggah tulisan dalam bentuk opini ke website UAPKM, *kavling10.com*. Tulisan tersebut ditulis oleh Rizqi Nurhuda Ramadhani, salah satu anggota UAPKM. Opini tersebut sebagai sikap dalam melihat masalah yang dialami UKM Pusat dengan kebijakan Universitas Brawijaya, dan menyorot hubungan UKM dengan jajaran petinggi kemahasiswaan, secara khusus;

“Cepet itu sih mas hehe. Diupload di website 27 September 2016, tapi gak langsung viral soalnya kan cuma diupload di website. Setelah itu kita

share satu hari setelahnya (28 September 2016) lewat Line @ (Official Account) Kavling. Dari Line @ itu akhirnya menyebar kemana-mana. Kita gak cuma share di Line @ Kavling, tapi minta tolong ke OA lain kayak Bangsa Mahasiswa, OKB18+, sama Red Black Junkie, akhirnya menjadi viral gara-gara lewat Line itu sehari setelah upload di website. Kita share di Line kan sore ya mas, Maghrib lah, setelah itu paginya (29 September 2016) ada pihak lain yang nulis.” (Wawancara Bunga Astana, Sabtu, 11 Februari 2017).

Dampaknya berujung pada pemanggilan Rizqi dan Bunga Aztana selaku Pemimpin Umum UAPKM, yang disertai ancaman personal oleh PR III. Bahkan UAPKM UB telah dibekukan secara lisan oleh PR III pada bulan oktober 2016. Berbagai cara dilakukan oleh UAPKM seperti meminta saran kepada PPMI kota Malang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sampai pada advokasi karena UAPKM merasa tulisan yang dibaca PR III saat itu sudah tidak murni opini yang diunggah ke website UAPKM, sudah ada campur tangan pihak ketiga yang mengubah isi tulisan tersebut. Akhirnya setelah mendapatkan saran dari Alumni UAPKM UB yang berujung pada petisi, permintaan maaf secara tertutup dilakukan PR III kepada UAPKM UB.

#### 4.5 Pembahasan

Kondisi pers mahasiswa yang ada pada saat ini mengalami perubahan jika dibandingkan pers mahasiswa sebelum reformasi. Hal tersebut dipengaruhi perubahan pada kondisi sosial politik pasca reformasi. Seperti pada saat pers mahasiswa zaman penjajahan belanda yang dipengaruhi oleh gerakan kebangsaan sehingga pers mahasiswa dijadikan sebagai alat dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan cara menyebarkan propaganda anti-kolonialisme. Pada era yang berbeda, pers mahasiswa sering disebut sebagai pers alternatif pada saat Orde Baru. Ciri-ciri yang khas dengan

pemberitaannya yang berani dan kritis menjadikan pers mahasiswa dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Peran Majalah *Bergerak!* menjelang reformasi mendapatkan pengakuan dari berbagai pers lokal maupun internasional dengan menjadikan artikel dan berita Majalah *Bergerak!* sebagai kutipan ataupun rujukan. Eksistensi majalah *Bergerak!* diakui oleh majalah *TIME* dan dinilai memiliki gaya pemberitaan yang berani dan kritis dalam menyampaikan kritik sosial dibandingkan pers umum pada saat itu. Hal tersebut yang dinamakan dengan *adversary journalism* (jurnalisme penantang) oleh Dhakidae (1977) yang didefinisikan sebagai penerapan dari sebuah ideologi yang dimiliki pers mahasiswa dan ditonjolkan lewat pemberitaannya sehingga tulisan yang diterbitkan cenderung mengkritisi hal-hal yang salah.

Setelah reformasi, keberbasan pers di Indonesia dibuka seluas-luasnya, dapat dilihat saat Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan sehingga kehidupan pers di Indonesia khususnya media cetak terbebas dari ancaman pencabutan SIUPP. Pers profesional atau media *mainstream* tidak lagi takut dan cenderung lebih bebas dalam memberitakan suatu isu sehingga, pers mahasiswa harus beradaptasi dengan kondisi saat itu. Ciri khas lewat pemberitaannya yang berani dan kritis tidak lagi menjadi faktor yang diunggulkan karena media *mainstream* juga memiliki faktor tersebut dengan adanya kebebasan pers. Pers mahasiswa setelah reformasi beradaptasi dengan kembali memetakan posisi mereka dan lebih memilih bergerak dalam lingkup internal kampus.

Pers mahasiswa sebagai organisasi media merupakan sub sistem dari sistem sosial di dalam universitas. Oleh karena itu sebagai organisasi media, pers mahasiswa tidak bisa hidup secara mandiri melainkan dipengaruhi oleh sistem sosial dimana dia berada. Jika diibaratkan sebagai sebuah negara, universitas juga memiliki tatanan kenegaraan yang dijalankan oleh birokrat kampus. Terdapat lembaga yang memiliki fungsi sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif sehingga pers mahasiswa bertujuan untuk mengawal demokrasi agar berjalan dengan benar. Dhakidae (1977) mengatakan bahwa pers kampus layaknya *watch dog* yang mengawasi peristiwa politik dan menginformasikannya kepada masyarakat dengan menonjolkan segi-segi yang menantang dengan tujuan untuk memancing reaksi.

Bagi Pers mahasiswa yang sumber dana utamanya berasal dari rektorat, ada kecenderungan Pers mahasiswa tersebut tidak dapat bergerak dengan bebas. Pers mahasiswa menjadi tidak kritis terhadap rektorat. Bahkan Pers mahasiswa sering dijadikan sebagai “corongnya” rektorat. Informasi yang disajikan oleh Pers mahasiswa hampir dipastikan akan sejalan dengan kebijakan rektorat. Dan untuk menjaga kelangsungan hidupnya Pers mahasiswa lebih memilih menuruti kemauan rektorat. Rektorat melalui kebijakannya mampu mengontrol arah pemberitaan Pers mahasiswa.

Posisi UAPKM UB sebagai pers mahasiswa tingkat universitas memberikan pengaruh terhadap kultur pers mahasiswa di Universitas Brawijaya pada dekade 1990an. Meskipun idealismenya sebagai pers mahasiswa terbelenggu selama 9 tahun karena tidak memiliki media yang mewakili gagasannya sebagai pers mahasiswa, UAPKM tidak melupakan

kedudukannya sebagai organisasi media yang berada di bawah sistem sosial universitas. UAPKM menjalin kerjasama dengan koran kampus Mimbar sebagai sarana mengasah diri dalam bidang jurnalistik, terjadi simbiosis mutualisme karena Mimbar kekurangan SDM dan menggunakan anggota UAPKM sebagai reporter. Selain itu, perannya sebagai pers mahasiswa tingkat universitas, UAPKM menjadi wadah bagi aktivis pers mahasiswa di Universitas Brawijaya.

Dibentuknya wadah komunikasi antar media fakultas oleh UAPKM memberikan kontribusi yang positif bagi kultur pers mahasiswa di Universitas Brawijaya. Hubungan antara LPM Fakultas, UAPKM serta Mimbar dapat hidup harmonis pada tahun 1990an. Berawal dari menyatukan Pemred dari masing-masing fakultas sampai membuka peran dalam ruang lingkup yang lebih besar membentuk jejaring antar aktivis pers mahasiswa. UAPKM sebagai organisasi media menjalin relasi dengan pers mahasiswa lain, membentuk jejaring antar aktivis pers mahasiswa hingga membentuk FKPM (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Malang) yang menjadi cikal bakal dibentuknya wadah pers mahasiswa nasional PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia). Hal ini mengacu pada konsep jurnalisme struktural yang memiliki makna semua aktivitas dalam pers mahasiswa, yang bertujuan untuk merealisasikan idealisme pers mahasiswa bisa dianggap sebagai aktivitas pers mahasiswa Supriyanto (1998, h. 126).

Dalam menjalankan perannya sebagai media komunikasi, pers mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang dijelaskan dalam *the influence of mass media content* yaitu *individual level, media routines level,*

*organization level, extra media level, dan ideological level* (Shoemaker & Reese, 1996, h. 64). Pada level eksternal organisasi, UAPKM menjalin relasi dengan kampus sebagai penyuplai dana utama (relasi ekonomi) dimana rata-rata pers mahasiswa di Indonesia masih menggantungkannya pada subsidi dari pihak kampus. Selanjutnya pers mahasiswa memiliki relasi dengan alumni, organisasi lainnya seperti AJI (Aliansi Jurnalis Independen) serta sesama pers mahasiswa untuk membentuk jaringan antar aktivis pers mahasiswa sebagaimana pembentukan PPMI yang dilatar belakangi keresahan para aktivis pers mahasiswa akan wadah pers mahasiswa di tingkat nasional (relasi sosial). Selanjutnya latar belakang anggota yang heterogen, menyebabkan pers mahasiswa juga memiliki relasi dengan OMEK, gerakan mahasiswa (relasi politik) seperti pada saat Harian KAMI, Mimbar Demokrasi, dan Mahasiswa Indonesia pada awal Orde baru.

Untuk menjaga independensinya, meskipun mayoritas anggota UAPKM bergabung dengan OMEK, terdapat kesepakatan ‘lepas jaket’ ketika berada di UAPKM, artinya anggota yang berafiliasi dengan OMEK tidak boleh membahas dan mencampuradukkan kepentingan golongannya saat melakukan aktivitas di pers mahasiswa agar independensi dari UAPKM tetap terjaga, ideologi sebagai pers mahasiswa lebih kuat dibandingkan dengan OMEK

Eksistensi pers mahasiswa menurut Abrar (1992, h. 40) dilihat dari fungsinya sebagai media komunikasi yang secara konsisten bisa menghadirkan informasi bagi pembacanya dan menjaga atau bahkan meningkatkan jumlah pembacanya dari waktu ke waktu. Sebagai lembaga

repository.ub.ac.id

social, pers mahasiswa dikatakan terjaga eksistensinya apabila terbebas dari berbagai tekanan sistem sosial di lingkungannya saat merefleksikan realitas sosial. Dalam mempertahankan eksistensinya, UAPKM berusaha membina hubungan baik dengan pihak rektorat, hal tersebut dilakukan untuk menjaga eksistensi UAPKM. Titik kompromi seperti dilahirkannya *Mimbar Mahasiswa*, majalah *Ketawanggede*, buletin *Kronik Kampus*, manuskrip tembok *Ketawanggede*, buletin *Kavling 10*, majalah *Kavling 10*, buletin *Ketawanggede*, hingga buletin *Swara Brawijaya* menjadi bukti perjuangan UAPKM dalam mempertahankan eksistensi media mereka.

Meskipun mengalami krisis SDM dan pendanaan yang terhambat, UAPKM berusaha mencari alternatif lain dalam menerbitkan media seperti diterbitkannya Manuskrip tembok *Ketawanggede* sebagai solusi dari *Kronik Kampus*. Perombakan kepengurusan dengan membuat departemen Bidang Usaha, hingga pendanaan secara swadaya dilakukan sebagai upaya dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. permasalahan mengenai periodisasi terbit disebabkan karena faktor eksternal seperti pendanaan yang terlambat, pergantian birokrat bagian kemahasiswaan sehingga proposal yang sudah diajukan tidak terlaksana.

Krisis SDM parah yang dialami pada tahun 2011 juga disebabkan karena kebijakan rektorat yang tidak mengizinkan kegiatan *open house* pada tahun 2009 sehingga *open recruitment* tidak berjalan maksimal, serta diterapkannya sistem SPP Progresif yang menuntut mahasiswa lulus tepat waktu dalam empat tahun menyebabkan regenerasi berjalan kurang maksimal. Mayoritas pers mahasiswa memiliki banyak anggota baru pada tahun pertama

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pengkaderan. Di tahun kedua sudah mulai terlihat jumlah kader yang banyak tadi mulai luntur akibat menumpuknya tugas kuliah dan alasan lainnya.

Tahun ketiga jumlah tersebut kembali menurun karena tanggung jawab yang diemban akan lebih berat sebagai pengurus harian dan mereka yang berada dipuncak kepemimpinan. Jumlah anggota yang benar-benar aktif akan terlihat pada tahun ke empat karena jumlah tersebut sudah turun drastis karena mereka yang dihadapkan pada tuntutan untuk menyelesaikan masa studi akhir.

UAPKM sebagai pers mahasiswa di tingkat universitas menjadi wadah ekspresi bagi aktivis pers mahasiswa artinya pers mahasiswa tidak hanya bergerak dalam bidang penerbitan jurnalistik, namun lebih dari itu peran pers mahasiswa sebagai *watch dog* harus memastikan apakah fungsi kontrol pers mahasiswa sudah dijalankan dengan baik. Yang perlu ditekankan adalah pers mahasiswa berbeda dengan klub penulisan dan sastra atau hanya sebatas dapat menerbitkan suatu karya seperti mading, majalah, buletin dan sebagainya. Penerbitan sebuah produk dalam pers mahasiswa merupakan sebuah sarana, bukan tujuan mengapa pers mahasiswa harus ada dalam suatu universitas. Aktivis pers mahasiswa dituntut untuk bersikap kritis dan peka terhadap fenomena yang sedang terjadi, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga pers mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi dari mahasiswa sebagai masyarakat dalam suatu universitas.

Penerbitan produk merupakan salah satu sarana dalam melakukan kontrol sosial terhadap kondisi internal kampus. Kedudukan pers mahasiswa yang berada di bawah universitas memungkinkan terjadinya campur tangan dari

repository.ub.ac.id

pihak rektorat dalam mengontrol aktivitas pers mahasiswa lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, terlebih lagi bagi pers mahasiswa yang masih menggantungkan sumber dana utamanya dari kampus. Seperti pada saat WR III mempermasalahkan nama pada Buletin Ketawanggede yang dianggap tidak mencerminkan Universitas Brawijaya sehingga buletin tersebut berubah nama menjadi Swara Brawijaya. Rektorat dapat membatasi ruang gerak pers mahasiswa seperti pada saat UAPKM tidak memiliki media sehingga secara otomatis untuk mempertahankan eksistensinya sebagai pers mahasiswa UAPKM mengisi atau menjalin kerjasama dengan Mimbar.

Seharusnya dengan adanya pers mahasiswa dalam suatu universitas memudahkan pihak rektorat dalam melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan berjalan sebagai mana mestinya karena pers mahasiswa dapat menjadi penyambung aspirasi antara pihak rektorat dan mahasiswa sehingga terjadi simbiosis mutualisme di dalamnya. Dalam konteks yang lebih makro, Universitas juga menerapkan apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang diturunkan lewat Dirjen Dikti dan Depdikbud. Setelah reformasi, kondisi sosial politik berubah dan berpengaruh terhadap bagaimana pihak kampus mengatur pers mahasiswa di dalamnya. Jika melihat kondisi pers mahasiswa di Universitas Brawijaya khususnya dengan banyaknya LPM fakultas yang berdiri dapat diartikan sebagai bentuk dukungan dari birokrasi kampus.

Cara lain untuk melakukan fungsi kontrol bisa berupa kegiatan non penerbitan seperti diskusi, jajak pendapat yang dapat lebih dimaksimalkan dengan membentuk jejaring antar aktivis pers mahasiswa. Berdirinya organisasi pers mahasiswa dalam lingkup nasional seperti IWMI (Ikatan

Wartawan Mahasiswa Indonesia), SPMI (Serikat Pers Mahasiswa Indonesia), IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia), hingga PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) pasti didasari oleh jejaring antar aktivis pers mahasiswa. Relasi sosial dalam pers mahasiswa penting sehingga pada umumnya setiap kota harus melakukan konsolidasi agar terbentuk kehidupan pers mahasiswa yang harmonis. Maka tak jarang advokasi dilakukan apabila pers mahasiswa mengalami ketertindasan dari pihak eksternal. Selain itu hubungan antara pers mahasiswa dengan alumni merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dilupakan. Dengan menjaga silaturahmi dengan alumni, informasi akan perkembangan organisasi akan lebih jelas karena adanya rantai komunikasi antara pengurus dan alumni sehingga pengarsipan dan dokumentasi dalam organisasi tersebut baik dan lengkap.

Hubungan pers mahasiswa dengan alumni bisa berupa transfer informasi yang dapat menjadi masukan untuk kemajuan organisasi dalam menghadapi permasalahan dalam pers mahasiswa, terutama bagi alumni yang berkarir dalam pers profesional. Meskipun secara struktur alumni sudah berada di luar organisasi namun perannya terlihat saat memberikan saran terkait permasalahan yang dialami pers mahasiswa bahkan sampai melakukan advokasi apabila pada faktanya pers mahasiswa tersebut mengalami ketertindasan dari pihak birokrat kampus. Seperti yang dialami UAPKM UB saat mendapatkan ancaman pembekuan secara lisan oleh WR III pada tahun 2016. Permasalahan tersebut berawal dari kesalahpahaman antara WR III dalam menanggapi opini yang diunggah salah satu anggota UAPKM terkait berbagai permasalahan yang dialami UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)

Universitas Brawijaya di *website* UAPKM . WR III menilai opini tersebut sebagai fitnah karena memuat rincian dana padahal opini yang dibaca oleh WR III sudah mengalami perubahan dari pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Opini tersebut bukan opini asli yang diunggah ke *website* UAPKM karena dalam opini tersebut tidak ada bahasan mengenai rincian dana.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut UAPKM meminta saran kepada PPMI kota Malang, melakukan diskusi dengan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan menemukan kesepakatan untuk melakukan advokasi untuk menyelesaikan masalah dengan WR III. UAPKM juga menghubungi alumni dan menuliskan kronologis kejadian di grup *facebook* alumni UAPKM UB. Secara cepat informasi tersebut tersebar dan berujung pada petisi atas nama alumni UAPKM UB. Permasalahan tersebut kembali berkejolak sampai WR III membuat klarifikasi tentang petisi yang diunggah di *prasetya online* dan dilakukannya permintaan maaf secara tertutup dari WR III kepada UAPKM dan beberapa UKM lainnya yang mengalami permasalahan.

Hubungan antara alumni dan UAPKM yang memiliki kedekatan secara personal memungkinkan hal tersebut terjadi meskipun alumni sudah bukan bagian dari organisasi tersebut. Pengalaman serta rasa kebanggaan terhadap organisasi yang membesarkan namanya memungkinkan alumni memiliki *power* dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami pers mahasiswa meskipun harus berhadapan dengan birokrat kampus.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Eksistensi UAPKM UB sebelum Reformasi memberikan kontribusi positif pada perkembangan pers mahasiswa era 1990an di Kota Malang. Dalam kedudukannya sebagai pers mahasiswa tingkat universitas, UAPKM menjadi wadah bagi aktivis pers mahasiswa di Universitas Brawijaya dan berhasil membentuk kultur positif antar pers mahasiswa fakultas dan universitas. Meskipun media pertama berupa majalah Ketawanggede lahir 9 tahun setelah organisasi ini berdiri, kehadirannya dinilai sebagai terobosan baru dan mendapat banyak pujian karena pendanaannya yang mandiri.

Memang pasca reformasi merupakan fase kemunduran bagi UAPKM UB jika dilihat dari produk terbitan dan rekam jejak perjalanan mereka yang ikut andil dalam peristiwa bersejarah lahirnya PPMI pada tahun 1992, namun UAPKM tetap memperlihatkan dinamika dengan mengikuti zaman yang berbeda. Pernah mengalami pembredelan pada majalah Ketawanggede pada tahun 1994 tidak menyurutkan semangat UAPKM dalam menghadirkan media sebagai karya jurnalistik mereka. *Jurnal Ospek, Kronik Kampus, Manuskrip Tembok Ketawanggede, Buletin Kavling 10, Majalah Kavling 10, Buletin Ketawanggede, Swara Brawijaya* menjadi bukti bahwa UAPKM UB berusaha menjaga eksistensinya sebagai pers mahasiswa meskipun dalam perjalanannya memang memiliki hambatan yang berbeda-beda.

## 5.2 Saran

Dari beberapa pokok hasil penelitian yang disimpulkan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai masukan untuk anggota UAPKM UB

- a) Diperlukan adanya pengembangan dalam hal kebijaksanaan redaksional seperti melakukan survei *target audience*.
- b) Mengadakan literasi media kepada masyarakat, dalam hal yang paling sederhana adalah kampus agar pihak birokrat lebih terbuka dan tidak menganggap pers mahasiswa sebagai musuh.
- c) Perlunya manajemen dalam pengelolaan arsip, baik berupa produk terbitan atau LPJ organisasi.
- d) Hendaknya mencari alternatif lain saat penerbitan terkendala dengan pendaan yang terlambat atau tidak turun. Mungkin yang paling mudah dengan memaksimalkan penggunaan media online seperti website, social media dll.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrar, Ana Nadhya. (1992). *Pers Mahasiswa dan Permasalahan Operasionalisasinya*. Yogyakarta: Liberty
- Arismunandar, S. (2000). Dinamika Pers Indonesia Di Era Reformasi. Dalam Hidayat, D. N., Gazali, E., Suwardi, H., Ishadi, S. K. (Ed.). *Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. (h. 205-219). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arismunandar, S. (2005). *Bergerak!: Peran Pers Mahasiswa dalam Penumbangan Rezim Soeharto*. Yogyakarta: Genta Press.
- Atmakusumah. (2009) *Tuntutan Kebebasan Pers dan Ekspresi*. Jakarta: Spasi & VHR Book.
- Bhakti, I. N. (2000). Berbagai Faktor Penyebab Jatuhnya Presiden Soeharto. Dalam Hidayat, D. N., Gazali, E., Suwardi, H., Ishadi, S. K. (Ed.). *Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. (h. 61-81). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Basri, M. C & Iswara, D. (2000). Exit, Voice, dan Loyalty: Ekonomi Politik Modal dan Peran Media di Masa Krisis. Dalam Hidayat, D. N., Gazali, E., Suwardi, H., Ishadi, S. K. (Ed.). *Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. (h. 27-46). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyarso, Edy. (2000). *Menentang Tirani: Aksi Mahasiswa '77/'78*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Bungin, Burhan H.M. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group
- Depari, E & Andrews, C, M. (2006). *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djarmika, Prija. (2004). *Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers dan Aspek-aspek Hukumnya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Effendy, Onong Uchjana. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fadhly, Fahrur. Z. (1999). *Mahasiswa Menggugat: Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Fadjar, A. Malik & Effendy, Muhajir. (1989). *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan*. Malang: Pusat Publikasi dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang (P3UMM).

- Fathoni, M. (2012). *Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia*. Depok: Komodo Books
- Gani, M. (1978). *Surat Kabar Indonesia Pada Tiga Zaman*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Hill, D. T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. (G.W. Soerjoatmodjo, Terjemahan). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusumaningrat, H & Kusumaningrat, P. (2005) *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: a methods sourcebook* (3rd ed). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.inc
- Moleong, Lexy .J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mondry. (2008) *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Neuman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7<sup>th</sup> ed). (E. T. Sofia, Terjemahan). Jakarta: PT Indeks.
- Nurudin. (2009). *Jurnalisme masa Kini*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurudin. (2010) *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Othmar, M. R, Ishak, M. S. A, Nordin, M, Haris, A. H. (2013). *Malaysia Indonesia; Romantika Hubungan Bangsa Serumpun*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Pitono, Djoko. (2013). *Mencetak Pendekar Bangsa: 70 Tahun Djanalis Djanaid*. Malang.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi*. Malang: Intrans Publising
- Rachman, M. F. (2000). *Revolusi Mei 1998, Media Massa, dan Penghapusan Peran Politik, Teritorial, dan Bisnis TNI/POLRI*. Dalam Hidayat, D. N., Gazali, E., Suwardi, H., Ishadi, S. K. (Ed.). *Pers Dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. (h. 102-124). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Raillon, Francois. (1985) *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. (N. Tamara, Terjemahan). Jakarta: LP3ES.

Safa'at, Muhammad, A. (2011). *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Press.

Shoemaker, P. J., & Reese S.D. (1996) *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content* (2ndEd.) New York: Longman

Supriyanto, D. (1998). *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suryabrata, Sumadi. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Smith, E.C. (1986). *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia, terjemahan Atmakusumah*. Jakarta: Grafiti Pers

Syahrial, F. (2009). *Peran Politik Pers Mahasiswa Tahun 1998-2008 (Studi pada Lembaga Pers Mahasiswa di Kota Malang)*. Skripsi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 2009.

#### Artikel Elektronik

Arismunandar, Satrio. (2012). *Sejarah dan Fenomena Pers Mahasiswa*. Diakses dari [http://www.academia.edu/4979961/Sejarah dan Fenomena Pers Mahasiswa](http://www.academia.edu/4979961/Sejarah_dan_Fenomena_Pers_Mahasiswa).

Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Brawijaya. (2008). *45 Tahun Universitas Brawijaya*. Jakarta: PT Topindo Mulia Kreasi. Diakses dari [http://175.45.184.17/files/dokumen\\_resmi\\_kampus/Buku-45-Tahun-Universitas-Brawijaya.pdf](http://175.45.184.17/files/dokumen_resmi_kampus/Buku-45-Tahun-Universitas-Brawijaya.pdf)

Baihaki, E. (2012, Januari 16). *Eksistensi dan Peran Strategis Pers Mahasiswa*. Diakses dari <http://ekibaihaki.com/article/87426/eksistensi-dan-peran-strategi-pers-mahasiswa.html>

Dhakidae, D. (1977). Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers. *Prisma* No 10/Oktober 1997. Diakses dari [http://pipmi.tripod.com/artikel\\_penerbitan\\_kampus\\_cagar\\_alam\\_kebebasan\\_pers.htm](http://pipmi.tripod.com/artikel_penerbitan_kampus_cagar_alam_kebebasan_pers.htm)

Hari. (2011, 6 November). *Sejarah Singkat Pergerakan Pers Mahasiswa Indonesia (1908-1998)*. Diakses dari <http://bumirakyat.wordpress.com/2011/11/06/sejarah-singkat-pergerakan-pers-mahasiswa-indonesia-1908-1998/>

Magriby, Prayudha. (2011). *Pers Mahasiswa Dekade 1990-an: Berani atau Dibredel!.* Diakses dari <http://gosrok.blogspot.com/2011/10/pers-mahasiswa-dekade-1990-berani-atau.html> 24.11.2014 pukul 13:11

Pena Kita. (2013, 10 Juli). *Universitas Brawijaya Penerima Cama Terbanyak di Indonesia.* Diakses dari <http://penakita.com/universitas-brawijaya-penerima-cama-terbanyak-di-indonesia/>.

Purnomo, W.A. (2008). *Menggugat Eksistensi Pers Mahasiswa: Refleksi Kritis dan Sejarah.* Diakses dari <http://ruangkata.wordpress.com/2008/01/06/menggugat-eksistensi-pers-mahasiswa-refleksi-kritis-dari-sejarah/>

Santosa, A. B & Supriatna, E. (2008). *Sejarah Pergerakan Nasional; Dari Budi Utomo 1908 Hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945.* Diakses dari <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. SEJARAH/197601052005011-ENCEP SUPRIATNA/BUKU AJAR SPNI.pdf>

Susantoro, A. G. (2007, 23 Desember). *Sejarah Pers Mahasiswa Indonesia.* Diakses dari <http://penaonline.wordpress.com/2007/12/23/sejarah-pers-mahasiswa-indonesia/>

Siahaan, A. Y. (2008). *Gerakan Mahasiswa di Jakarta (1981-1990).* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2008) Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/17094>

Spirit Mahasiswa. (2014). *Keberpihakan Pers Mahasiswa Sebagai Pembalikan Wacana Liberisasi Pers.* Diakses pada 10 Maret 2014 dari, <http://spirit-mahasiswa.blogspot.com/2014/01/keberpihakan-pers-mahasiswa-sebagai.html>

#### **Situs Internet/Halaman Web**

[http://www.malangkota.go.id/mlg\\_detail.php?own=fasdidik&id=25](http://www.malangkota.go.id/mlg_detail.php?own=fasdidik&id=25). Diakses pada 8 April 2014.

<https://web.snmptn.ac.id/ptn> diakses pada 20 April 2014

<http://ub.ac.id/tentang/profil-universitas>. Diakses pada 20 April 2014.